



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONSTRUKSI REALITAS MEDIA TENTANG CALON
PRESIDEN DARI PARTAI GOLKAR TAHUN 2008**
(Analisa Framing dan Politik Komunikasi Terhadap Berita Seputar
Rapat Pimpinan Nasional IV Partai GOLKAR Tahun 2008 Pada
Media Kompas dan Suara Karya)

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Komunikasi

M. Hendrik Al Zen
NPM. 0606016445

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI POLITIK**

Jakarta
Juli, 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis i ni adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : M. Hendrik Al Zen

NPM : 0606016445

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Juli 2009

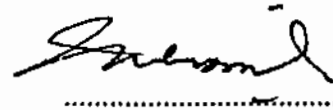
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : M. Hendrik Al Zen
NPM : 0606016445
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kekhususan : Manajemen Komunikasi Politik
Judul Tesis : Konstruksi Realitas Media Tentang Calon Presiden
Dari Partai Golkar Tahun 2008 (Analisa Framing
dan Politik Komunikasi Terhadap Berita Seputar
Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar Tahun
2008 Pada Media Kompas dan Suara Karya)

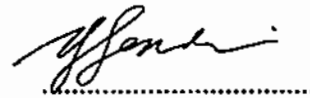
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

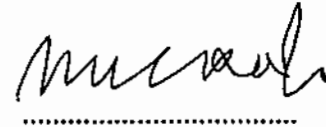
Ketua Sidang : Prof. Zulhasril Nasir, Ph.D



Pembimbing : Effendi Gazali, Ph.D, MPS, ID



Penguji Ahli : Prof.Dr. Alois A. Nugroho



Sekretaris Sidang : Irwansyah, S.Sos, MA



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjan pada program Kekhususan Manajemen Komunikasi Politik FISIP UI dengan memenuhi persyaratan menyelesaikan penulisan tesis. Sebuah capaian yang berarti dalam hidup saya dan keluarga. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini saya menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis, tentu sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini. Maka pada kesempatan ini saya, mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Effendi Gazali, Ph.D, MPS, ID., yang dalam segala telah menyediakan dan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan yang mencerahkan tetapi juga memotivasi untuk menjadi yang berkualitas.
- 2) Prof. Zulhasril, Ph.D., Prof.DR. Alois A. Nugroho., dan Irwansyah, S.Sos, MA., sebagai tim penguji yang telah bersedia membaca dan memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
- 3) Seluruh staf pengajar Pascasarjana Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP UI, yang telah memberikan ilmu, tauladan, bimbingan dan kebijaksanaan selama penulis menuntut ilmu.
- 4) Seluruh staf administrasi di lingkungan Pascasarjana Jurusan Ilmu Komunikasi di Kampus UI – Salemba.

- 5) Ir. Rully Chairul Azwar, Msi., kakak, senior dan guru politik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UI.
- 6) Rekan-rekan mahasiswa Manajemen Komunikasi Politik Angkatan 2006, yang telah menjadi teman diskusi dan memberikan masukan yang luar biasa inovatif. Dan tentunya dukungan semangat sepanjang masa studi di Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- 7) Novarita, SE., istri tercinta atas semua doa, inspirasi dan motivasi yang ikhlas dan abadi serta kedua bidadari tercinta Huriyah Zhafifa Ridhananda dan Tahirah Nabilah Ridhananda yang memberikan semangat baru untuk maju, semoga ilmu pengetahuan selalu menjadi hal utama dalam hidup mereka.
- 8) Semua keluargaku; Amak dan Abak di Jambi yang tak berhenti berdoa untuk kesuksesan dan kemuliaan anaknya tercinta. Bak dan Mak di Bengkulu, yang dengan sabar dan penuh pengertian memberikan arahan dan dukungan untuk kemajuan. Kakak dan Adik: Inga Eka, Ayuk Rin, Linda, Mul, Ira, Eko, Yan dan Ira yang mendorong untuk selalu maju.
- 9) Rekan-rekan Partai Golkar baik di DPD Kabupaten Bengkulu Tengah maupun Provinsi Bengkulu, atas pengertian yang diberikan untuk penyelesaian penulisan tesis ini. Terus maju bersama meraih kejayaan dengan karya nyata.

Terakhir, penulis berharap semoga semua amal baik semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amien.

Jakarta, Juli 2009

Penulis

M. Hendrik Al Zen

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hendrik Al Zen
NPM : 0606016445
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Kekhususan : Manajemen Komunikasi Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KONSTRUKSI REALITAS MEDIA TENTANG CALON PRESIDEN DARI PARTAI GOLKAR TAHUN 2008 (Analisa Framing dan Politik Komunikasi Terhadap Berita Seputar Rapat Pimpinan Nasional IV Partai GOLKAR Tahun 2008 Pada Media Kompas dan Suara Karya)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : Juli 2009
Yang Menyatakan

(M.Hendrik AL Zen)

ABSTRAK

KONSTRUKSI REALITAS MEDIA TENTANG CALON PRESIDEN DARI PARTAI GOLKAR TAHUN 2008

(Analisa Framing dan Politik Komunikasi Terhadap Berita Seputar Rapat
Pimpinan Nasional IV Partai GOLKAR Tahun 2008
Pada Media Kompas dan Suara Karya)

Isi: 110 + xv hal, bibliografi 42 buku, 10 tesis/disrtasi/jurnal/makalah,8 artikel

Media massa (surat kabar) bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga merupakan sebuah subjek yang merekonstruksi realitas, lengkap pandangan dengan terbukanya peluang bias dan kepemihakannya. Framing merupakan sebuah strategi penyusunan realitas sehingga dihasilkan sebuah berita. Isu calon presiden menjelang pemilihan presiden 2009, menjadi agenda berbagai partai politik –utamanya Partai Golkar, serta tentunya juga agenda publik. Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008 menjadi penting menjelang pemilihan presiden tahun 2009, apalagi Partai Golkar belum menetapkan calon presidennya. Dengan menggunakan framing dari Gamson dan Modigliani sebagai pisau analisa, tesis ini mencoba melihat isu calon presiden dari Partai Golkar seputar Rapimnas IV direkonstruksi oleh media Kompas dan Suara Karya. Sebagai upaya mempertajam analisis tersebut digunakan pula analisis Politik-Komunikasi sebagaimana dinyatakan oleh Chaffee.

Konstruksi realitas yang dilakukan Kompas dan Suara Karya tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang melingkupi kedua media tersebut. Kompas, dengan gaya Jawa-nya mencoba menjadikan isu nama-nama potensial calon presiden sebagai *core frame* (ide sentral) seluruh berita yang diturunkan. Sementara Suara Karya sebagai media partisan dengan ideologi sebangun dengan Partai Golkar, menjadikan konsolidasi Partai Golkar untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2009 sebagai ide sentral berita yang direkonstruksi.

Posisi kedua media yang berbeda terhadap Partai Golkar, menjadikan perbedaan dalam merekonstruksi realitasnya. Dengan demikian politik komunikasi yang dilakukan kedua media juga memiliki perbedaan. Dimulai dari pemilihan narasumber yang berhak berbicara yang akhirnya berlanjut dengan topik yang disampaikan oleh narasumber. Media Kompas menggunakan nara sumber yang lebih banyak jumlahnya dan bervariasi sehingga dapat menampilkan nama-nama calon presiden potensial dengan variasi yang lebih luas, sementara Suara Karya cenderung menggunakan narasumber di dalam Partai Golkar yang sejalan dengan upaya konsolidasi menghadapi dunia empirik politik yang sedang bergerak dinamis terhadap Partai Golkar.

Penelitian ini juga mendorong implikasi penggunaan analisis baru seperti Analisis Politik Komunikasi bersamaan dengan Analisis Framing terhadap Konstruksi Realitas oleh beragam media.

Keywords : framing, *core frame*, *framing devices*, *reasoning devices*, ideologi, politik komunikasi



ABSTRACT

THE REALITY CONSTRUCTION ON MEDIA PERTAINING TO THE PRESIDENTIAL CANDIDATE FROM GOLKAR PARTY ON 2008 (The Framing Analysis and Comraunucating Politics on News of Fourth National Chairman Meeting (Rapimnas IV) on 2008 at Media Kompas and Suara Karya newspapers)

Contents : 110 + xv pages, bibliography 42 books, 10
thesis/dissertations/journal/term papers,8 articles

Mass medias are not only as free channels, however, it also have becoming the reality constructing subject include with perspectives on open-ended, bias opportunities and take to one's side. Framing is one of strategies in order to compiling realities, so it will become a news. Issue on presidential candidate before the 2009 Presidential Election has became agenda for certain political parties - in particular Golkar Party, and, of course, as the public agenda. The 2008 Fourth National Chairman Meeting (Rapimnas IV) of Golkar Party has became a landmark event before the 2009 Presidential Election, moreover, Golkar Party was not yet stipulated its presidential candidate. Wit using Gamson and Modigliani's framing as the analysis knife, this thesis is trying to comprehend the issue on presidential candidate from Golkar Party on 2008 Rampinas IV that have been reconstructed by Media Kompas and Suara Karya newspapers, hi order to sharpen this analysis, it also used political-communication analysis as being used by Chaffee. The reality construction that made Kompas and Suara Karya newspapers were highly related to an ideology in scoping potential names of presidential candidates as its core frame for all published news. Meanwhile, Suara Karya newspaper as a partisan media with unvarying ideology with Golkar Party has made consolidation of Golkar Party to win the 2009 Legislative Election as a core frame for reconstructed news. Second differ position of media to Golkar Party had made difference perspective in reconstructing its reality. Therefore, political communication from both medias have not similarities at all. From the selection for eligible source persons as well as expressed topics by relevant source persons, Media Kompas newspaper used more and variety source persons, so it could published certain and various names of potential presidential candidates, meanwhile, Suara Karya newspaper was prefered to using internal source persons from Golkar Party to match their efforts and measues for consolidation in order to face dynamic, empiric world of politics on Golkar Party.

This study is also supported the implication of new analysis usage, for example Analysis on Political Communication and Framing Analysis on Reality Construction by various mass medias.

Keywords : framing, core frame, framing devices, reasoning devices, ideology, Political communication.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan	6
1.5. Signifikansi Penelitian	7
2. KERANGKA TEORI	
2.1. Media Massa dan Konstruksi Realitas	8
2.1.1. Media Massa	8
2.1.2. Konstruksi Realitas	11
2.1.3. Berita dan Konstruksi Realitas	12
2.1.4. Ideologi dan Media Massa	14
2.2. Framing	18
2.2.1. Konsep	18
2.2.2. Model Framing	22
2.3. Komunikasi Politik	26
2.3.1. Definisi Komunikasi Politik	27
2.3.2. Studi Komunikasi Politik	30
2.3.3. Model-Model Komunikasi Politik Modern	31
2.4. Politik Komunikasi	38
3. METODOLOGI	
3.1. Paradigma Penelitian	42
3.2. Pendekatan Penelitian	44
3.3. Metode Penelitian	44
3.4. Objek Penelitian	48

3.5. Metode Pengumpulan Data	49
3.6. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian	49
4. PROFIL MEDIA MASSA	
4.1. Kompas	50
4.2. Suara Karya	53
5. ANALISA FRAMING DAN POLITIK KOMUNIKASI CALON PRESIDEN DARI PARTAI GOLKAR	
5.1. Partai Golkar dan Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008./	55
5.2. Analisa Teks; Isu Calon Presiden	57
5.2.1. Frame Kompas	58
5.2.2. Frame Suara Karya	73
5.3. Kecenderungan Framing	87
5.3.1. Kompas	91
5.3.2. Suara Karya	92
6. DISKUSI	
6.1. Framing dan Ideologi Media	94
6.2 Politik Komunikasi Media	97
7. PENUTUP	
7.1. Kesimpulan	104
7.2. Rekomendasi	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Berita-berita Kompas dan Suara Karya	63
Tabel 2. Pebandingan Framing Kompas dan Suara karya tentang Isu Calon Presiden dari partai Golkar.....	97
Tabel 3. Analisis Politik Komunikasi Kompas dan Suara Karya Tentang Isu Calon Presiden dari Partai Golkar	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 : Posisi Media Dalam Komunikasi Politik.....	32
Gambar 2-2 : Model Lasswell berkaitan dengan eleme process komunikasi.....	32
Gambar 2-3 : Media di tengah tiga kekuatan penarik dan pendorong yang Saling over-lap.....	33
Gambar 2-4 : Garis Akuntabilitas antara media dan kekuatan sosial dalam kaitannya dengan penerbitan.....	34
Gambar 2-5 : Model Media Performance.....	34
Gambar 2-6 : Model Two-Step-Flow Pengaruh Media.....	36
Gambar 2-7 : Ruang Publik.....	37

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Perangkat framing Gamson dan Modigliani	47
Skema 2. Frame “Sultan Masih Unggul di Golkar”	60
Skema 3. Frame “Presiden Berharap Golkar Arif pada Waktunya”	64
Skema 4. Frame “Kalla Bakal Bertarung Lagi dengan Akbar”	67
Skema 5. Frame “Penetapan Capres Tunggu Hasil Pemilu Legislatif”	70
Skema 6. Frame “Rapimnas Tidak Agendakan Pembahasan Capres”	74
Skema 7. Frame “SBY Berharap Golkar Tak Tergoda”	77
Skema 8. Frame “Jusuf Kalla Persilahkan Kader Saring Nama Capres”	80
Skema 9. Frame “ Golkar Tak Akan Sembarangan Berkoalisi”	83



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2004 pada Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung untuk pertama kali dilaksanakan di Indonesia, duet SBY-JK yang diusung Partai Demokrat dan partai kecil lain dalam Koalisi Kerakyatan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sementara partai politik besar pemenang pemilu legislatif seperti Partai Golkar dan PDIP yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan mengalami kekalahan.

Koalisi yang terbentuk saat Pilpres menjadikan konfigurasi tidak seimbang di DPR RI antara partai pendukung presiden dan bukan pendukung presiden. Konstelasi ini tidak menguntungkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Maka, pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Partai Golkar tahun 2005 di Bali, Jusuf Kalla ikut bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2005 - 2010. Dan seperti diketahui semua Jusuf Kalla terpilih setelah mengalahkan Akbar Tanjung.

Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar telah merubah konstalasi politik Indonesia, dan Partai Golkar memposisikan diri sebagai Partai Pendukung Pemerintah. Tetapi dalam perjalanannya koalisi yang dibangun Partai Golkar dengan Partai Demokrat mengalami pasang surut. Ini terkait karena Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 dan memiliki 128 Kursi di DPRRI merasa hanya menjadi tameng pemerintah, sementara bila ada kebaikan pemerintah Partai Demokrat yang diuntungkan.

Perjalanan duet SBY-JK serta koalisi Golkar-Demokrat tersebut tinggal satu tahun lagi, karena Pilpres langsung Indonesia untuk kedua kalinya akan dilaksanakan tahun 2009. Bersamaan dengan itu Partai Demokrat dengan tegas menyatakan akan kembali mengusung SBY sebagai Calon Presiden. Beberapa

partai lain menyatakan sikapnya, mengenai calon presiden mereka, PDIP mencalonkan Megawati Soekarnoputri, Partai Hanura mencalonkan Wiranto, Partai Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto, Partai Indonesia Sejahtera mencalonkan Sutiyoso.

Bagaimana dengan Partai Golkar sebagai partai pemenang Pemilu 2004 tetapi mengalami kekalahan dalam Pemilu Presiden pada tahun yang sama? Sampai memasuki tahun ketiga kepemimpinan Jusuf Kalla dan akan memasuki Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-IV Partai Golkar, belum ada tanda-tanda siapa yang akan diusung dan dengan metode apa akan dipilih calon presiden dari Partai Golkar.

Tahun 2004, Partai Golkar mengadakan Konvensi untuk menentukan calon presidennya dan Wiranto memenangkan konvensi tersebut setelah mengalahkan Akbar Tanjung, maka Wiranto menjadi Calon Presiden dari Partai Golkar Pada Pilpres 2004. Proses konvensi tersebut memberikan pelajaran yang berharga bagi demokrasi di Indonesia, dan bagi Partai Golkar proses konvensi tersebut telah mengantarkan pada kemenangan Pemilu Legislatif 2004.

Proses Konvensi yang dilakukan oleh Partai Golkar, dengan memulai pemilihan nominasi dari Kabupaten/Kota secara langsung memobilisasi aktifitas partai. Konvensi tersebut tentu menjadi "*good news*" bagi media massa karena Partai Golkar menjadi satu-satunya partai politik yang memilih calon presidennya secara demokratis dan terbuka. Konvensi yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama menjadikan media massa telah memberikan citra tersendiri bagi Partai Golkar walaupun tetap ada keraguan konvensi sebagai akal-akalan Partai Golkar. Tetapi itu tertepis dengan sendirinya dengan terpilihnya Wiranto.

Tetapi proses konvensi yang pernah dilakukan oleh Partai Golkar, jauh-jauh hari dinyatakan tidak akan dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar dibawah kepemimpinan Jusuf Kalla. Walau Konvensi akan ditinggal, Partai Golkar juga tidak menyebutkan calon presiden ataupun calon-calon presiden yang akan

diusung. Kondisi ini menjadi pertanyaan dan ketidakpastian bagi stakeholder Partai Golkar termasuk media massa.

Ketidakpastian yang dimunculkan menjadikan pertanyaan bagi pengamat politik, praktisi, masyarakat, termasuk pengurus internal Partai Golkar sendiri. Maka ketika dilaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV tahun 2008, forum ini menjadi sangat penting bagi perjalanan Partai Golkar menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden 2009. Rapimnas sebagai institusi tertinggi setelah Munas, merupakan forum pengambilan keputusan untuk kebijakan partai, termasuk penentuan calon presiden dari Partai Golkar.

Isu calon presiden akan mengemuka dan menjadi agenda utama terutama bagi daerah-daerah, dimana mereka merasakan perlu stimulus untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2009. Selain itu telah beredarnya nama-nama calon presiden dari partai politik lain juga akan memengaruhi sikap Partai Golkar, walau secara tegas DPP Partai Golkar akan mengumumkan setelah diketahui hasil Pemilu Legislatif 2009.

Isu-isu yang berkembang di Rapimnas dengan sendirinya akan menjadi sorotan media massa terutama berkaitan dengan calon presiden. Pemberitaan yang diwartakan media dengan sendirinya akan memberikan gambaran mengenai calon presiden dari Partai Golkar. Siapa, dari internal atau eksternal Golkar, dan bagaimana calon presiden tersebut dihasilkan akan diberitakan oleh media massa.

Penyajian berita Rapimnas IV Partai Golkar terkait calon presiden menjadi sangat penting karena mendekati Pemilu 2009, tetapi menjadi pertanyaan adalah bagaimana media merekonstruksi realita tersebut. Hal tersebut akan terjawab dengan mengurai berita melalui analisa framing.

Lebih jauh, penyampaian sebuah berita ternyata menyimpan subjektivitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai barang suci yang penuh dengan

objektivitas. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis/latar belakang seorang penulis. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

Padahal kita tahu, media merupakan faktor yang sangat penting bagi pembentukan image, citra maupun stigma. Dari medialah kita memperoleh informasi mengenai realitas yang tengah berlangsung di tempat lain. Sementara, realitas yang dihadirkan media ke hadapan kita belum tentu realitas yang sesungguhnya, tetapi realitas yang sudah dibentuk, dibingkai, dan dipoles sedemikian rupa oleh media tersebut. Melalui analisis *framing* kita tahu betapa secara diam-diam media mendikte otak kita mengenai “realitas” tanpa kita sadari.

1.2 Perumusan Masalah

Peristiwa politik yang dilakukan partai politik menjadi menarik bagi media massa sebagai bahan liputan. Apalagi peristiwa tersebut dilakukan oleh Partai Golkar selaku partai pemenang pemilu 2004 dan terjadi setahun menjelang Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2009. Tentulah peristiwa tersebut akan menjadi fokus liputan, ditengah perkembangan transisi demokrasi Indonesia. Peristiwa ini akan semakin dianggap penting karena jauh-jauh hari Partai Golkar mengumumkan tidak akan melaksanakan konvensi seperti 2004 dalam mencari calon presiden dari Partai Golkar.

Pelaksanaan Rapimnas IV tahun 2004 tanggal 18 – 20 Oktober 2008 merupakan Rapimnas keempat yang dilaksanakan dalam kepemimpinan Jusuf Kalla. Rapimnas kali ini menjadi penting karena partai politik lain telah menyebutkan nama-nama calon presiden mereka masing-masing, sementara Partai Golkar belum sama sekali, dan ini sangat dinanti dan dicari oleh media massa,

siapa yang akan dijagokan atau diunggulkan menjadi calon presiden dari Partai Golkar untuk Pilpres 2009.

Perubahan sikap Partai Golkar dalam menentukan calon presidennya serta belum adanya kepastian siapa-siapa yang akan diajukan Partai Golkar menjadikan media massa untuk terlibat mengkonstruksi permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan momentum Rapimnas tahun 2008 sebagai institusi pengambil keputusan tertinggi setelah Musyawarah Nasional (Munas).

Selanjutnya konstruksi yang dibangun media lewat teks tidak muncul dengan sendirinya, teks selalu ada dalam suatu situasi sosial dengan konteks yang spesifik. Dimana, teks lahir dari konteks kehidupan sosial masyarakat yang ditampilkan oleh media massa kemudian diterjemahkan oleh masyarakat berdasarkan konteks yang kehidupan sosial yang ada ditengah masyarakat saat itu.

Media massa tidak berada dalam ruang hampa, bias media menjadi tak terelakan. Media berada dalam dua kepentingan antara pemilik modal dan jurnalis, dua sisi saling mempengaruhi untuk kehidupan media itu sendiri. Dalam hal ini media tidak bisa lepas dari kepentingan pemodal tapi juga tidak bisa mengabaikan kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya.

Sehubungan dengan hal tersebut berbagai media massa tidak bisa lepas dari kondisi diatas bahkan kepemilikan tersebut berkaitan dengan partai politik, seperti Suara Karya yang hampir boleh dikatakan berafiliasi penuh dengan Partai Golkar atau Korannya Partai Golkar, dan ada juga koran yang sama sekali tidak ada kaitan dengan Partai Golkar seperti Kompas.

Oleh karena itu rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana framing yang dilakukan Kompas dan Suara Karya dalam mengemas isu calon presiden dari Partai Golkar selama Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai Golkar tahun 2008? .
- b. Bagaimana Politik Komunikasi dilakukan oleh Kompas dan Suara Karya untuk membangun konstruksi realitasnya mengenai isu calon presiden dari Partai Golkar melalui pemberitaan Rapat Pimpinan (Rapimnas) IV Partai Golkar tahun 2008?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada upaya mengetahui konstruksi yang dibangun Kompas dan Suara Karya dalam memotret dan membingkai citra Partai Golkar (dengan mengambil kasus Rapat Pimpinan Nasional IV Partai Golkar tahun 2008 sebagai *case study*).

1.4 Tujuan

Dari rumusan pertanyaan yang diajukan, maka penelitian ini berupaya:

1. Mengetahui bagaimana Konstruksi media Kompas dan Suara Karya mengemas isu calon presiden dari Partai Golkar seputar pemberitaan Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008.
2. Mengetahui bagaimana politik komunikasi dilakukan kedua media dalam merekonstruksi realitas calon presiden dari Partai Golkar 2009.

1.5 Signifikansi Penelitian

I. 5.1 Signifikansi Akademis

- Penelitian ini secara akademis diharapkan memberikan kontribusi dengan melakukan secara serentak analisis framing dan analisis politik komunikasi dari proses rekonstruksi realitas oleh media. Hal ini relatif baru dilakukan dalam kajian-kajian konstruksi realitas media yang berupaya membandingkan antara proses dan hasil oleh media tertentu dengan media lainnya, biasanya karena perbedaan ideologi dan rutinitas media.

I. 5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat untuk mendalami persoalan-persoalan seputar konstruksi Partai Politik dalam ruang media dengan menggunakan paradigma konstruktivisme. Bagi praktisi komunikasi politik dan politisi, melalui analisa framing bersamaan dengan analisis politik komunikasi dapat dijadikan landasan untuk membuat alternatif strategi komunikasi dalam mengemas pesan dalam rangka pembentukan citra dan opini positif dalam masyarakat.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Media Massa dan Konstruksi Realitas

2.1.1 Media Massa

Mc Luhan (1964) seperti dikutip Ardial (2009:161) menyatakan media adalah merupakan perluasan alat indra manusia. Dengan kata lain, kehadiran media dalam komunikasi, merupakan upaya untuk melakukan perpanjangan dari telinga dan mata. Pandangan Mc Luhan ini dikenal sebagai teori perpanjangan alat indra (*sense extension theory*).

Karena dunia terlalu luas untuk kita masuki, maka media memberikan informasi tentang peristiwa yang berisi fakta, personal dan tempat kejadian yang tidak kita ketahui karena perbedaan tempat dan waktu. Dan media massa datang menyampaikan berbagai pesan tentang peristiwa sosial dan politik.

Sesungguhnya media pada prinsipnya adalah segala sesuatu sebagai saluran bagi seseorang yang menyatakan gagasan, isi jiwa, atau kesadarannya. Atau media adalah alat untuk mewujudkan gagasan manusia. Media dibagi dalam tiga bentuk (Arifin, 2003:94).

Pertama, media yang menyalurkan ucapan (*the spoken words*) termasuk juga yang berbentuk bunyi yang bisa ditangkap oleh telinga, yang dinamakan juga *the audial media* (media dengar), dalam kategori ini termasuk radio, telepon. Kedua, media yang menyalurkan tulisan (*the printed writing*) dan hanya dapat ditangkap oleh mata, disebut *the visual media* (media pandang), dalam kategori ini termasuk selebaran, surat kabar, majalah, dan buku. Ketiga, yang menyalurkan gambar hidup dan karena dapat ditangkap oleh mata dan telinga sekaligus, disebut *the audio visual* (media dengar pandang), termasuk dalam kategori ini televisi, film.

Selanjutnya kehadiran media-media tersebut, terutama media massa (koran, radio, televisi, film), mendorong retorika, propaganda, kampanye dan

public relation politik berkembang lebih jauh. Perkembangan ini memposisikan komunikasi politik menjadi penting dan berkontribusi bagi demokrasi. Media massa dipandang memiliki pengaruh yang kuat dalam membangun opini dan pengetahuan bagi masyarakat.

Media massa (surat kabar) hadir pada masa awal ditandai oleh wujud yang tetap, bersifat komersial (dijual secara bebas), memiliki beragam tujuan (memberi informasi, mencatat, menyajikan adaptensi, hiburan, dan desas-desus), bersifat umum dan terbuka. Surat kabar lahir di abad tujuh belas di mana sudah terdapat pemisahan yang jelas antara surat kabar pemerintah dan surat kabar komersial. Namun, surat kabar pemerintah lebih sering dijadikan corong penguasa saat itu. Hal ini berbeda dengan surat kabar komersial. Pengaruh surat kabar komersial merupakan tonggak penting dalam sejarah komunikasi karena lebih menegaskan perannya dalam pelayanan masyarakat dan buka sebagai terompet penguasa.

Komunikasi massa pada dasarnya merupakan suatu bentuk komunikasi dengan melibatkan khalayak luas yang biasa menggunakan teknologi media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Hadirnya media media baru seperti internet memberikan perspektif pandangan yang baru terhadap komunikasi massa. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan internet memiliki peluang memberikan tanggapan atau umpan-balik (*feedback*) secara segera (*immediately*), misalnya e-mail dan mailist yang berbeda dengan surat kabar atau majalah di mana umpan baliknya lebih bersifat tertunda (*delayed*). Littlejohn (2002:303) menawarkan definisi yang berangkai lebih memadai mengenai mengenai komunikasi massa dengan menyatakan bahwa komunikasi massa merupakan proses di mana organisasi-organisasi media memproduksi dan menyampaikan pesan pesan ke halayak luas dan proses di mana pesan-pesan dicari digunakan, dipahami, dan di pengaruhi oleh khalayak.

Diingatkan di sini bahwa organisasi media massa bekerja sebagai suatu lembaga masyarakat (*social intitution*), yang hidup di tengah masyarakat (dengan segala nilai, norma, dan dinamikanya), dan berinteraksi dengan institusi-institusi lain yang ada dalam masyarakat. Pandangan mengenai bidang kajian komunikasi

massa cenderung bervariasi. Littlejohn (2002:303-330), misalnya menawarkan lima sub bidang: (a) media (isi dan struktur), (b) hubungan-hubungan institusional media dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan, (c) hubungan-hubungan personal individu khalayak dengan media, (d) dampak (*impact*) media terhadap masyarakat (pengaruh media secara makro), dan (e) pengaruh media secara mikro).

Masyarakat memperoleh gambaran dan citra realitas sosial secara dominan dari media massa. Dari isi media massa terefleksi peristiwa-peristiwa yang terjadi dan melingkupi masyarakat. Shoemaker dan Reese menyebutkan dua konsep utama dalam melihat refleksi realitas media, yaitu konsep media secara aktif yang memandang media sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi pesan sehingga muncul pandangan bahwa tidak ada realitas sesungguhnya dalam media dan konsep media secara pasif yang memandang media hanya sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan sesungguhnya, dalam hal ini media berfungsi sebagai sarana netral, media menampilkan suatu realitas apa adanya. (Shoemaker and Reese, 1996:33-37).

Selanjutnya, Cohen menyatakan agenda fungsi media massa bahwa media massa tidak akan sukses dalam memberitahukan tentang sesuatu yang dipikirkan orang, tetapi media massa jelas berhasil dalam memberitahukan pembaca tentang berpikir sesuatu.

Media massa memiliki hubungan dua arah dengan realitas sosial. Di satu pihak media menjadi cermin bagi keadaan di sekelilingnya, namun di lain pihak ia juga membentuk realitas sosial itu sendiri. Melalui sikapnya yang selektif dalam memilih hal-hal yang ingin diungkapkan dan melalui caranya menyajikan informasi tersebut. Media memberi interpretasi, bahkan membentuk realitasnya sendiri. Termasuk di dalam interpretasi selektif ini yakni pengukuhan nilai, sikap serta pola-pola perilaku masyarakat (Debra Yatim, dalam Ibrahim dan Susanto, 1999:108-109). Cakupan (*coverage*) yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program kerja, pesan politik, pembentukan image partai atau individu.

Selanjutnya politik saat ini telah berada dalam era mediasi (*politic in the age of mediation*) melalui media massa. Menurut Hammad, saat ini hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Malahan aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas politiknya memperoleh liputan dari media. Dalam era mediasi itu, fungsi media massa dalam komunikasi politik bisa menjadi penyampai (*transmitters*) pesan-pesan politik dari pihak di luar dirinya, sekaligus menjadi pengirim (*senders*) pesan politik yang dikonstruksikan para wartawan kepada khalayak.

2.1.2 Konstruksi Realitas

Proses “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau sosok tak terkecuali yang berkaitan dengan politik merupakan sebuah usaha konstruksi realitas. Karena pekerjaan media massa (surat kabar) adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka mengkonstruksi realitas dalam berita adalah kegiatan utama surat kabar.

Dalam Ibnu Hamad (2004), terdapat tiga tindakan yang biasa digunakan oleh pekerja media, khususnya para komunikator massa, tatkala melakukan konstruksi realitas, termasuk realitas politik, yang berujung pada pembentukan citra sebagai sebuah kekuatan politik, yaitu: pemilihan simbol (fungsi bahasa), pemilihan fakta yang akan disajikan (*strategi framing*), dan kesediaan memberi tempat (*agenda setting*).

Dalam konstruksi realitas, framing dipandang sebagai sebuah strategi penyusunan realitas sedemikian rupa, sehingga dihasilkan sebuah berita. Selanjutnya framing bisa dipakai sebagai salah satu metode untuk memahami “information strategy” dalam sebuah berita, maka analisa framing berfungsi untuk “membongkar muatan berita”.

Dalam pemahaman konstruksionis, realita bersifat subjektif. Dimana realita hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda tergantung bagaimana konsepsi ketika realitas

itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan yang berbeda (Herbert, 1992).

Fakta diproduksi dan ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung pada bagaimana ia dilihat dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi. Dalam kata-kata yang ekstrim, realitas atau fakta itu tergantung pada bagaimana ia dilihat (Krippendorf, 1987). Pikiran dan konsepsi kita yang membentuk dan mengkreasikan fakta. Fakta yang sama bisa menghasilkan fakta yang berbeda-beda ketika ia dilihat dan dipahami dengan cara yang berbeda (Carey, 1989).

2.1.3 Berita dan Konstruksi Realitas

Media massa dalam pandangan positivisme adalah sebagai saluran komunikasi. Media diposisikan secara murni sebagai sarana penyampai pesan dari *sender* (komunikator) ke *receiver* (publik). Sementara dalam pemahaman konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap pandangan, bias dan kepemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Bennett, 1982).

Selanjutnya Eriyanto (2007), menyatakan media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Media juga memilih (secara sadar atau tidak) aktor yang dijadikan sumber berita sehingga hanya sebagian saja dari sumber berita yang tampil dalam pemberitaan. Selain itu lewat bahasa yang dipilih, media juga berperan mendefinisikan aktor dan peristiwa.

Berita dalam pandangan konstruksionis merupakan sebuah drama. Dimana berita bukan menggambarkan realitas, tetapi merupakan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam peristiwa bersangkutan. Carey (1989) menyatakan;

"News is not information but drama. It does not describe the world but portrays an arena of dramatic forces and anction; it exist solely in historical time; and it invites our participation on the basis of our assumung, often vicariously, social roles within it".

Dalam pandangan konstruksionis, semua proses konstruksi (mulai dari memilih fakta, sumber, pemakian bahasa, gambar sampai penyuntingan) memberi andil bagaimana realitas berita hadir dihadapan publik. Dalam pandangan ini berita tidak dilihat dari baik dan buruknya laporan, baik atau tidaknya. Penulisan berita dari satu sisi, hasil wawancara satu pihak serta memasukan opini pribadi, tidak dinilai benar atau salah, tetapi semua ini dilakukan dalam kerangka pembenar tertentu.

Media massa dalam pandangan positivisme adalah sebagai saluran komunikasi. Media diposisikan secara murni sebagai sarana penyampai pesan dari *sender* (komunikator) ke *receiver* (publik). Sementara dalam pemahaman konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap pandangan, bias dan kepemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Bennett, 1982).

Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mepersepsi peristiwa/fakta yang akan diliput. Kenapa suatu peristiwa disebut sebagai berita sementara peristiwa yang lain tidak ? ini semua melibatkan konsepsi wartawan yang menentukan batasan-batasan mana yang dianggap berita dan mana yang tidak. Disini perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa tersebut. Peristiwa adalah sebuah fenomena, ia hanya ada dalam organisasi pikiran kita. Ia tidak ada secara konkrit, pikiran kita dan otak kitalah yang membentuknya. Ketika mana yang dianggap sebagai berita, wartawan memakai skema enterpretasi. Tetapi skema interupsi ini bukanlah personal.wartawan yang lain mempunyai skema interpretasi yang sama yang membentuk pasangan sama apa yang dimaksud dengan berita tersebut. Dalam tingkatan yang paling awal, ia menentukan mana yang dianggap sebagai peristiwa (*event*) dan mana yang bukan peristiwa (*non-event*). Peristiwa, dalam lapangan jurnalistik, bukanlah realitas yang nyata, ia adalah fenomena interpretasi yang melibatkan aktifitas yang kompleks. Karena peristiwa adalah bagian di mana seseorang mendefinisikan sesuatu dan menyatakan ini adalah kenyataan. Individu dan dan sesama jurnalis mempunyai pandangan yang sama sehingga ia bisa menentukan mana peristiwa dan mana yang tidak di anggap sebagai peristiwa. Pembunuhan di potong empat adalah berita,

sementara pembunuhan biasa bukan berita. Di sini kenapa pembunuhan di anggap sebagai berita, sementara yang lain tidak di hitung sebagai berita, semuanya adalah sebagai fenomena interpretasi. Kitalah yang secara aktif membentuk dan memberi batasan mana yang di anggap berita mana yang tidak.

Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan memilah-milah dan menentukan peristiwa tema-tema tertentu dalam suatu kategori tertentu. Seperti yang di katakana oleh MacDougall, setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini, dan semuanya secara potensial dapat menjadi berita. Peristiwa-pristiwa itu tidak serta merta menjadi berita karena batasan yang disediakan dan dihitung, mana berita dan mana bukan berita. Berita, karenanya, peristiwa yang telah di tentukan sebagai berita, bukan peristiwa itu sendiri.

2.1.4 Ideologi dan Media Massa

Jame Lull dalam tulisanya mengelaborasi beberapa definisi yang di berikan oleh ilmuwan sosial. Raymond William, misalnya, menamakan ideologi sebagai himpunan ide-ide yang muncul dari seperangkat kepentingan material tertentu atau, secara lebih luas, dari sebuah kelas atau kelompok sosial tertentu (1976: 156). Sedangkan Stuart Hall (1977) berpendapat bahwa ideologi, bukan hanya otoritas ekonomi, berfungsi membentuk dan mempertahankan pembagian kelas sosial dalam masyarakat kapitalis. (Lull, 1997:3)

Dalam formula Jhon B. Thomson, ideologi merujuk kepada cara-cara bagaimana di gunakan, dalam hal tertentu, untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan yang secara sistematis yang bersifat asimetris, atau dalam bahasa Thomson sendiri di sebut sebagai relasi dominasi. Oleh karenanya ideologi secara luas dapat dinyatakan sebagai makna yang di gunakan untuk kekuasaan. (Jhon B. Thomson, 2004:19).

Frans Magnis Suseno merangkum semua pengertian ideologi dalam kerangka sebagai berikut :

1. Ideologi sebagai kesadaran palsu

Ideologi dalam arti ini manusia berfikir dan menilai, baik yang mewujud dalam pandangan moral, nilai-nilai budaya, bahkan agama yang mempunyai fungsi mendukung struktur kekuasaan dalam masyarakat. Jadi dalam perspektif ini ideologi memiliki konotasi yang negatif yaitu sebagai claim kebenaran yang tidak wajar dan cenderung memihak pada kepentingan penguasa. Ideologi dalam konteks ini di pahami juga sebagai sarana kelas kelompok yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

2. Ideologi dalam arti netral

Arti yang kedua ini merujuk kepada keseluruhan berfikir, nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar rohani sebuah gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan. Dalam arti ini ideologi bergantung isinya: kalau isinya baik, ideologi itu dikatakan baik dan positif, kalau isinya buruk (misalnya membenarkan kebencian), maka ideologi itu dinilai negatif.

3. Ideologi : keyakinan yang tidak ilmiah

Dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang berhaluan positifistik, segala pemikiran yang tidak dapat diuji kebenarannya secara logis matematis atau empiris digolongkan kedalam ideologi. Jadi segala penilaian etis dan moral, anggapan-anggapan normatif, begitupula teori-teori dan paham metafisika dan keagamaan termasuk filsafat sejarah di masukkan kedalam ideologi. Sepintas arti ketiga ini bersifat netral, tetapi sebenarnya bernada negatif karena memuat asumsi bahwa 'ideologi-ideologi' itu tidak rasional, di luar nalar dan hanya merupakan keyakinan subyektif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiahnya. (Frans Magnis Suseno, 1992, hal. 229-231)

Tetapi secara umum ideologi dapat diartikan sebagai sistem pemikiran yang menyeluruh dan bercita-cita menjelaskan wajah dunia sekaligus mengubahnya. Sebagai suatu gagasan, pandangan, ideologi memiliki semacam perangkat unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, di dalam ideologi termuat pandangan-pandangan antropologi, sosiologi, politik secara komprehensif tentang manusia serta alam semesta tempat manusia hidup. Kedua terdapat rencana penataan kehidupan sosial dan kehidupan politik, yang kadangkala menuntut

adanya perubahan dan perombakan. Ketiga, ada usaha untuk menerima secara yakin gagasan itu. Keempat, ideologi diarahkan untuk menjelaskan lapisan masyarakat seluas mungkin (Riberu, 1986, hal. 4-5)

Dalam pandangan Shoemaker dan Reese, ideologi menjadi nilai dan kepercayaan yang turut serta membangun dan menentukan tujuan, tata kerja dan tentu saja isi media, di samping faktor individu pekerja media, rutinitas media, organisasi dan faktor eksternal media. Pengaruh ideologi terhadap media berbeda dengan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi media. (Shoemaker, Pamela J. dan Reese, Stephen D, 1996, edisi kedua)

Ideologi memberikan pengaruh terhadap individu pekerja media, rutinitas kerja media, organisasi media dan kekuatan ekstra media. Ideologi yang berbeda menciptakan terjadinya muatan dan isi pesan yang berbeda. Perbedaan ideologi merepresantasikan perbedaan sudut pandang dalam melihat dan melukiskan sebuah peristiwa. Semuanya termanifestasi dalam teks media. Maka teks media bisa menjadi pusat pertarungan budaya yang ditentukan karena perbedaan ideologi. Hal tersebut tidak saja menyangkut persoalan ideologi *an sich*, tetapi juga masuk pada wilayah sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap penyebaran image media pada masyarakat yang bersangkutan.

Faktor ideologi merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi media dalam mengkonstruksikan realitas, disamping kepentingan bisnis, politik partisan, teknis, serta struktur organisasi media itu sendiri. Faktor internal media ini berpadu dengan kondisi dengan kondisi eksternal; berupa ideologi dan sistem politik yang dianut yang turut mempengaruhi media dalam mengkonstruksi berbagai peristiwa. Media merupakan transmisi dari cara kerja ideologi. Ideologi bekerja melalui media, sedangkan media adalah pengatur dari propoganda ideologi itu sendiri.

Media dengan ideologi sosial tentunya akan jadi corong perjuangan bagi kelas tertentu untuk melakukan perubahan bagi terciptanya masyarakat sosialis, ideologi yang bekerja dalam media kapitalis akan cenderung mempertahankan status quo, demi kepentingan ekonomi dan politik yang di usungnya. Media yang memiliki haluan Islam sebagai arah ideologi, tentunya cenderung mengkritisi

berbagai peristiwa dari sudut pandang nilai-nilai yang dianut dalam agamanya. Media sekali lagi adalah pusat penyebaran ideologi dan budaya.

Ideologi dalam media dapat memberikan semacam warna, pesan dan nilai-nilai budaya, moral, ekonomi, politik yang berwujud dalam media melalui teks. Dalam media, ideologi menjadi bagian dari sistem yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan untuk terlegitimisasinya suatu institusi. (V. Irmayanti M. Budianto, 1996: 194-195)

James Lull menyatakan bahwa sejumlah perangkat ideologi diangkat dan diperkuat oleh media massa, diberikan legitimasi dan didistribusikan secara persuasif kepada khalayak. Dalam proses-proses itu, konstelasi-konstelasi ide yang dipilih memperoleh arti penting dan memperkuat efek sosialnya. Cuplikan-cuplikan berita yang ditulis wartawan misalnya, merupakan "mata uang ideologis" (*ideological currency*) yang ditampilkan dalam "pertukaran sosial" (*social exchange*). (James Lull, 1997, hal. 4)

Selanjutnya Lull menulis keefektifan penyebaran ideologi tersebut bergantung pada pemanfaatan *sistem citra* yang strategis, yang terdiri dari dua tipe pokok yakni *Idealisasi* dan *mediasi*. Sistem citra melibatkan sistem artikulasi dari lapisan-lapisan representasi ideologis dan pemanfaatan teknologi komunikasi secara taktis untuk mendistribusikan representasi itu, yang bilamana berhasil, akan mendorong penerimaan khalayak dari tema yang dominan dimunculkan. Jadi ideologi, mengutip Hall (1985), adalah "peta dari hal-hal yang dapat dimengerti", sedangkan media massa adalah "perkakas bagi representasi ideologis"

Lebih lanjut Lull menjelaskan, ideologi yang ditransmisikan melalui media dalam segala konteks politik-ekonomi-budaya sebagian diwakili dalam bahasa dan diartikulasikan serta diinterpretasikan melalui bahasa berikut kode dan carayang sangat cermat, yang kemudian diinterpretasikan lebih jauh dan digunakan oleh orang dalam interaksi sosial sehari-hari. Proses-proses ini semuanya merupakan bagian dari efek ideologis. (James Lull, 1997:8-34)

2.2 Framing

2.2.1 Konsep

Framing cenderung banyak digunakan untuk menunjukkan gejala-gejala yang kendatipun sama, tetapi dilihat dari sudut yang berbeda-beda. Wicks (1992), menggunakan istilah ini untuk menunjukkan kategorisasi kognisi yang ada pada khalayak. Hamill dan Lodge (1986), memahamai framing mirip dengan yang sering dikonsepskan dengan *frame*, *scrift* atau *schema*. Iyengar dan Kinder (1987) menggunakan istilah ini sama dengan *agenda setting* dan *priming*. Selanjutnya McCombs, Shaw, dan Weaver (1997), menyatakan bahwa bukan saja agenda setting dan framing, sebagai pengaruh media, memiliki keterkaitan, melainkan framing sebenarnya merupakan kelanjutan dari agenda setting (Pawito, 2009, hal.185)

Frank D. Durham (1998) menyatakan, framing membuat dunia lebih diketahui dan lebih dimengerti, dimana realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu. Sehingga bagi publik penyajian realitas yang demikian, membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti.

Robert N. Entman mendefinisikan framing sebagai sebuah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.

Gamson dan Modigliani (1987), seperti dikutip oleh Scheufele (1999), dalam Pawito (2009, hal.187) mendefinisikan framing sebagai: suatu pokok pengorganisasian gagasan atau pemberitaan yang memberikan makna terhadap serangkaian peristiwa. Framing bersangkutan memberikan isyarat kepada khalayak mengenai kontroversi apa yang ada serta apa yang mejadi pokok dari isu yang diberitakan).

Cara bercerita tersebut terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima.

Sementara Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki memaparkan bahwa *framing* adalah strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Selanjutnya konsep *framing* (pembingkai) sering digunakan oleh media untuk menggambarkan sebuah peristiwa dengan menonjolkan aspek tertentu dan sekaligus menempatkan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi dan perhatian yang lebih besar ketimbang isu yang lain. Dalam praktiknya, *framing* dijalankan media dengan menyeleksi isu tertentu sambil mengabaikan isu yang lain; menonjolkan aspek tertentu dari isu tersebut sambil menyembunyikan dan bahkan membuang aspek yang lain. Ini dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data lapangan, verifikasi dan seleksi data, penyajian dalam bentuk berita, hingga penempatannya di sebuah rubrik tertentu.

Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkai tersebut tentu melalui proses konstruksi. Disini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Selanjutnya bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas itu ditandakan, hal inilah yang menjadi pusat perhatian dan analisis *framing*.

Selanjutnya *framing* merupakan metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada "cara melihat" terhadap realitas yang dijadikan berita. "Cara melihat" ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi berita. Analisa *Framing* adalah analisa yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas, juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.

Analisis bingkai (*frame analysis*) berusaha untuk menentukan kunci-kunci tema dalam sebuah teks dan menunjukkan bahwa latar belakang budaya membentuk pemahaman kita terhadap sebuah peristiwa. Dalam mempelajari media, analisis bingkai menunjukkan bagaimana aspek-aspek struktur dan bahasa berita mempengaruhi aspek-aspek yang lain. (Anonymous, 2004). Analisis bingkai merupakan dasar struktur kognitif yang memandu persepsi dan representasi realitas. (King, 2004). Menurut Panuju (2003), *frame analysis* adalah analisis untuk membongkar ideologi di balik penulisan informasi.

Disiplin ilmu ini bekerja dengan didasarkan pada fakta bahwa konsep ini bisa ditemui di berbagai literatur lintas ilmu sosial dan ilmu perilaku. Secara sederhana, analisis bingkai mencoba untuk membangun sebuah komunikasi—bahasa, visual, dan pelaku—dan menyampaikannya kepada pihak lain atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan informasi baru. Melalui analisa bingkai, kita mengetahui bagaimanakah pesan diartikan sehingga dapat diinterpretasikan secara efisien dalam hubungannya dengan ide penulis.

Dalam framing ada dua aspek utama. *Pertama*, memilih fakta/realitas. Sebuah proses dimana memilih fakta yang didasarkan pada asumsi, dan melihat peristiwa dengan sebuah perspektif. Dan dalam memilih fakta ini akan ada dua kemungkinan; apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Selanjutnya memilih bagian mana yang ditekankan dalam sebuah realitas. Dan memilih mana yang diberitakan dan mana yang tidak diberitakan.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaiman fakta yang dipilih disajikan kepada publik. Hal ini berhubungan dengan bagaimana gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Fakta yang sudah dipilih ditekankan dengan perangkat tertentu melalui penempatan yang mencolok (penempatan di *headline* depan atau belakang), pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi dan sebagainya. Realitas yang disajikan secara menonjol dan mencolok, memiliki kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi publik dalam memahami suatu realitas.

Sebuah realitas peristiwa dibingkai (frame) dan dimaknai secara berbeda oleh media massa, bahkan bisa sangat ekstrim perbedaannya. Sebuah peristiwa, adalah sebuah kompleksitas realitas yang memiliki banyak dimensi, tetapi ketika peristiwa tersebut diberitakan maka akan menjadi realitas satu dimensi. Bila ada realitas dalam arti objektif bisa jadi apa yang dibingkai oleh media dan diberitakan akan berbeda dengan realitas objektif tersebut.

Karena realitas peristiwa bukannya direkam dan ditulis, tetapi sebaliknya dikonstruksi. Dalam proses konstruksi tersebut, ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda dalam memahami realitas yang terjadi. Sehingga framing terkait dengan pendefinisian realitas. Bagaimana sebuah peristiwa dipahami, sumber siapa yang diwawancarai. Elemen-elemen tersebut bukan semata masalah teknis jurnalistik, tetapi merupakan sebuah proses yang dipraktikkan.

Framing berkaitan dengan opini publik. Dimana sebuah isu tertentu ketika dikemas dengan bingkai tertentu bisa mengakibatkan pemahaman publik yang berbeda atas isu tersebut. Framing atas isu umumnya banyak dipakai dalam literatur gerakan sosial, dimana guna mencapai pandangan yang sama atas suatu isu. Hal ini ditandai dengan menciptakan suatu masalah bersama, musuh bersama dan pahlawan bersama, sehingga publik bisa digerakan dan dimobilisasi. Ketika peristiwa dilihat sebagai masalah sosial dan didefinisikan sebagai masalah bersama maka perhatian publik akan merubah menjadi lebih besar.

Frame yang disajikan media, ketika memaknai realitas mempengaruhi bagaimana publik menafsirkan peristiwa tersebut. Tetapi disini perlu diingat, publik dalam hal ini individu bukanlah makhluk yang pasif. Sebaliknya mereka adalah entitas yang aktif menafsirkan realitas politik, dimana pemahaman mereka terbentuk dari apa yang diberitakan media.

Karena realitas peristiwa bukannya direkam dan ditulis, tetapi sebaliknya dikonstruksi. Dalam proses konstruksi tersebut, ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda dalam memahami realitas yang terjadi. Sehingga framing terkait dengan pendefinisian realitas. Bagaimana sebuah peristiwa

dipahami, sumber siapa yang diwawancari. Elemen-elemen tersebut bukan semata masalah teknis jurnalistik, tetapi merupakan sebuah proses yang dipraktekan.

Sebuah peristiwa yang sama, karena proses pembingkaiian bisa menghasilkan berita yang berbeda dan penafsiran publik yang berbeda pula. Menurut Eriyanto (2002), efek framing yang paling mendasar adalah realitas yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan dan memenuhi logika tertentu.

2.2.2 Model Framing

William A. Gamson adalah seorang sosiolog, meskipun demikian ia banyak menulis mengenai framing. Gagasan Gamson terutama berkaitan dengan hubungan berita media dan pendapat umum (opini publik). Dalam pandangan Gamson, berita media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum atas suatu isu atau peristiwa. Tetapi sebagai seorang sosiolog, Gamson memiliki perhatian besar pada gerakan sosial (*social movement*). Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah mengapa orang terlibat dalam gerakan sosial/protes sosial? Apa yang menyebabkan mereka turun ke jalan dan memiliki perasaan dan masalah yang sama atas sebuah isu. Maka jawaban atas semua itu dikarenakan framing.

Gagasan Gamson mengenai frame ditulis bersama Andre Modigliani. Dimana sebuah frame mempunyai struktur internal. Pada titik ini ada sebuah pusat organisasi atau ide, yang membuat peristiwa menjadi relevan dan menekankan suatu isu. Sebuah frame biasanya menunjukkan dan menggambarkan *range* posisi, bukan hanya satu posisi. Selanjutnya dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani, frame dipandang sebagai cara bercerita (*stelling story*) atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Gamson melihat wacana media (khususnya berita) terdiri atas sejumlah kemasan (*package*) melalui mana konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk.

Menurut Gamson, dalam gerakan sosial paling tidak membutuhkan tiga frame/bingkai:

1. *Agregate frame*; proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial. Bagaimana individu yang mendengar frame atas peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.
2. *Consensus frame*; Proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif. Frame konsensus ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.
3. *Collective action frame*; Proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang harus dilakukan. Frame ini mengikat perasaan kolektif khalayak agar bisa terlibat secara bersama-sama dalam gerakan sosial. *Collective action frame* ini dikonstruksi lewat tiga elemen :
 - a. *Injustice frame*. Ini umumnya ditandai dengan konstruksi peristiwa: adanya ketidakadilan, ketimpangan, dan kecurangan yang bisa menyentuh emosi khalayak. Ketimpangan atau ketidakadilan tersebut bukanlah keputusan intelektual, melainkan konstruksi yang dibentuk oleh *agent*. Frame ini menyediakan alasan kenapa kelompok harus bertindak sesegera mungkin;
 - b. *Agency frame*. Ini berhubungan dengan pembentukan konstruksi siapa kawan siapa lawan, siapa pihak kita dan siapa pihak mereka. Frame ini secara umum bertujuan untuk membuat bahwa kita bisa melakukan sesuatu kalau bukan kita siapa lagi;
 - c. *Identity frame*. Dalam frame ini bukan hanya siapa kita dan siapa mereka, melainkan juga mengidentifikasi bahwa kita berbeda dengan mereka. Kita begini, mereka begitu, dan seterusnya. Seluruh proses tersebut kalau dilihat membentuk proses dari kelahiran sampai pematangan dan tumbuhnya kesadaran kolektif. Mereka yang terlibat dan terikat dalam protes sosial, karenanya, mempunyai perasaan yang sama, masalah sama, identifikasi penyelesaian masalah yang sama, dan pada akhirnya kawan dan lawan yang sama pula.

Selanjutnya Gamson dan Modigliani (1989) melihat, kemasan (*package*) sebagai sebuah wadah atau struktur data yang mengorganisir sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, dan yang membantu komunikator untuk menjelaskan muatan-muatan di balik suatu isu atau peristiwa. Keberadaan dari suatu kemasan (*package*) terlihat dari adanya gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana seperti kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu, proposisi, dan sebagainya. Semua elemen dan struktur wacana tersebut mengarah pada ide tertentu dan mendukung ide sentral dari suatu berita.

Ide sentral (*central organizing idea*) dalam model Gamson dan Modigliani didukung oleh dua perangkat wacana lain, yaitu: 1) Perangkat framing (Framing Devices); 2) Perangkat penalaran (Reasoning Devices). Satu bagian dalam wacana dengan bagian lain saling kohesif atau saling mendukung menuju satu titik pertemuan ide sentral dari suatu berita.

Selanjutnya perangkat framing (*framing devices*) didukung oleh elemen:

- a. *Methaphors* adalah perumpamaan dan pengandaian
- b. *Catephrase* adalah perangkat frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon-jargon atau slogan.
- c. *Exemplaar* adalah mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian bisa teori atau perbandingan yang memperjelas bingkai untuk membenarkan perspektif.
- d. *Depiction* adalah penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. Umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melebeli sesuatu.
- e. *Visual image* adalah gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Perangkat ini bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.

Sementara perangkat penalaran (*reasoning devices*), didukung oleh elemen:

- a. *Roots* merupakan analisis kausal atau sebab akibat.
- b. *Appeals to principle* merupakan premis dasar, klaim-klaim moral.

c. *Consequence* merupakan efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral di terjemahkan dalam teks berita. Pertama, *framing device* (perangkat framing). Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang di tekankan dalam teks berita. Perangkat framing ini ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik atau gambar, dan metafora tertentu kesemua elemen tersebut dapat ditemukan dan ditandai serta merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu. Kedua, *reasoning devices* (perangkat penalaran). Kalau yang pertama berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, atau metafora tertentu yang menunjuk pada gagasan tertentu, maka perangkat penalaran berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu. Sebuah gagasan tidak hanya berisi kata atau kalimat, gagasan itu juga selalu ditandai oleh dasar pembenaran tertentu, alasan tertentu, dan sebagainya. Dasar pembenaran dan penalaran tersebut bukan hanya meneguhkan suatu gagasan atau pandangan, melainkan lebih jauh membuat pendapat atau gagasan tanpa benar, absah, dan demikian adanya. Lewat aspek penalaran tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak sebagai kebenaran, alamiah, dan wajar. Sebaliknya, kalau dalam suatu teks tidak terdapat elemen penalaran demikian, gagasan akan tampak aneh, tidak beralasan, dan orang dengan mudah mempertanyakan pesan atau gagasan tersebut.

Ilustrasi mudahnya seperti orang yang tengah berkhotbah dan menyampaikan gagasan atau pandangan tertentu. Agar khalayak menerima, mengikuti, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, maka perlu membuat pesan yang disampaikan tampak wajar dan beralasan (*reasoning devices*). Itu bisa dilakukan dengan menyusun kalimat, paragraf, atau proposisi tertentu sehingga masing-masing bagian dari pesan yang disampaikan menjadi tampak normal, wajar, dan beralasan. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain yang saling mendukung, satu bagian menjelaskan bagian yang lain, satu bagian menjadi sebab atau akibat dari proposisi yang lain, dan sebagainya. Selain menekankan kohesifitas dan koherensi dari suatu teks, pengkhotba itu perlu juga menekankan gagasan dengan pemakaian perangkat tertentu (*framing devices*). Dan itu bisa dilakukan dengan memberi tekanan, kata-kata tertentu, kalimat atau

metaphora tertentu, dan bisa juga menyusun contoh dan ilustrasi yang sejalan dengan gagasan yang hendak diajukan.

2.3 Komunikasi Politik

Komunikasi politik telah dikenal sejak Cicero dan Aristoteles. Kemudian berkembang sekitar Perang Dunia I dan II. Sebagai bidang kajian ilmiah, komunikasi politik melintasi berbagai disiplin dan dibesarkan secara lintas disiplin.

Komunikasi politik mulai berkembang dalam bentuk awal dalam dalam kandungan ilmu politik sesudah Perang Dunia I, meskipun belum memakai penamaan tersebut. Hal ini terlihat dari studi mengenai pendapat umum, propaganda, dan perang urat syaraf, serta berkembangnya teori media kritis sebagai bagian dari ilmu politik (Dahlan, 1990:3-9)

Berbagai sumbangan memang telah diberikan oleh para sarjana dalam perkembangan teori dan penelitian komunikasi politik, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat empat orang yang sebenarnya menjadi *founding fathers* studi komunikasi politik di Amerika. Mereka sebenarnya memiliki latar belakang pendidikan psikologi ; Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld dan Carl Hovland. Sedangkan satunya lagi yaitu Harold D. Laswell adalah seorang ilmuwan politik yang pada tahun 1927 menulis buku *Propaganda Technique in the World War*, bahkan dalam bukunya yang berjudul *The structure and functions of Communication in Society* dengan model *who says what, to whom, in which channel, with what effect*, Laswell telah menghadirkan sebuah karya monumental yang terus di kembangkannya dalam buku-buku dan penelitiannya yang lain, seperti yang ditulisnya pada tahun 1936 tentang politik yaitu, *Politics: Who Gets What, When, How*.

Laswell demikian tertarik pada komunikasi politik dan ternyata beberapa muridnyapun mempunyai ketertarikan yang sama. Ithiel de Sola Pool, V.O.Key dan Gabriel Almond. Key misalnya dengan detail mempertemukan komunikasi dan politik dalam bukunya *Public Opinion and American Democracy*. Pool menulis buku *The people look at educational television: Candidates, issues, and*

strategies; a computer simulation of the 1960 election campaign, dan Trends in content analysis. Serta Almond telah pula mengkaji berbagai konsep untuk memahami fungsi komunikasi dalam sistem politik.

Ada beberapa penelitian komunikasi politik yang pertama dilakukan terutama berkenaan dengan kampanye politik dan pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh Jalaludin :

Pada saat itu hasil-hasil kampanye diukur dengan melihat opini publik lewat survey sikap, di Jerman penelitian ini disebut *meinungsforschung* (demoskopie) dan karena latar belakang inilah penelitian komunikasi politik di Eropa sangat didominasi oleh opini publik (Jalaluddin dalam Nimmo : 2000 : viii).

2.3.1 Definisi Komunikasi Politik

Menurut Effendi Gazali (2004), di Indonesia, studi komunikasi politik relatif baru dan belum lengkap. Maka dibutuhkan kerja keras untuk mendefinisikan serta membumikannya dalam kehidupan politik di Indonesia.

Banyak definisi mengenai komunikasi politik yang dikumpulkan dari berbagai literatur. Definisi yang dikemukakan Chaffe's (1975), menurut Kaid, merupakan pengertian komunikasi politik yang mungkin terbaik dan sederhana. Komunikasi politik adalah *peran komunikasi dalam proses politik.* Dimana, penelitian komunikasi politik dilakukan mengenai perspektif pengaruh kampanye politik atau opini publik. Seperti dikatakan Swanson dan Nimmo (1990) dalam *New Direction in Political Communication*, titik perhatian atau mainstream komunikasi politik adalah studi tentang strategi penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi pengetahuan publik, kepercayaan, dan tindakan politik dan studi terhadap keterkaitan kampanye politik sebagai suatu objek.

Sementara menurut Nimmo (1978) politik adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana; pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memluas tindakan lainnya. Politik merupakan

kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka dalam kondisi konflik sosial, politik. Sementara komunikasi, adalah proses. Seperti komunikasi, politik melibatkan pembicaraan. Suatu komunikasi dianggap sebagai komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensi baik aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi-kondisi konflik.

McNair (1995) mendefinisikan komunikasi politik sebagai "purposeful communication about politics" yang meliputi: "(1) all forms of communication undertaken by politician and other political actors for the purpose of achieving specific objectives; (2) communication addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper columnist and; (3) communication about them and their activities, as contained in news reports, editorials, and other forms of media discussion of politics".

Sedangkan *Denton and Woodward (1990)* dalam *McNair (1995)* mendefinisikan komunikasi politik sebagai *"public discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes)"*

Objek material komunikasi politik menurut Sartori (dalam Rush and Althoff ;1971 : 46) adalah : " dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena politik dan dimensi politis dari komunikasi" sesuai dengan apa yang diketengahkan oleh Gurevith dan Blumler (1977 : 72) yang mengetengahkan empat komponen dalam komunikasi politik yaitu :

1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya.
2. Institusi media dalam aspek politiknya.
3. Orientasi Khalayak terhadap komunikasi.
4. Aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.

Adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi dalam pencapaian sasaran-sasaran politik juga diakui oleh Graber (1981: 23) ; " sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara secara persuasif kepada para pemilih dan

kepada elit politik. Selain itu juga bergantung kepada efektifitas komunikasi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.” Bahkan Greber juga menambahkan bahwa ;” ketika kita menjelaskan bahasa politik (bahasa yang digunakan dalam konteks politik) dan apa yang membuat bahasa verbal maupun nonverbal menjadi politis bukanlah karena bentuk atau kosa kata, melainkan karena substansi informasi yang dihadirkan, *setting* di mana informasi disebarkan maupun karena fungsi yang dijalankan. Menurut Harsono Suwardi (1997: 12):

komunikasi politik dapat dilihat dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah : “Setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam arti luas, komunikasi politik adalah : Setiap jenis penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima pesan.

Dilihat dari definisi komunikasi politik di atas, baik dalam arti luas maupun sempit, selalu ada proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh komunikator politik. Bahkan masih terdapat definisi lain yang dapat digolongkan sebagai batasan komunikasi politik dalam arti sempit yaitu : “ suatu komunikasi dapat dikatakan memiliki nilai atau bobot politik bila komunikasi yang dimaksud mempunyai konsekuensi atau akibat politik (faktual / berkemampuan) yang mengatur tingkah laku manusia di bawah pertentangan.”(Harsono Soewardi, 1995 : 6).

INT”L ENCYL OF Communication (1989) menggaris bawahi bahwa ; Komunikasi politik adalah setiap penyampaian pesan yang disusun secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau penggunaan *power* di dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung empat bentuk komunikasi yaitu ; (a)*Elite communication*, (b)*Hegemonic communication*, (c)*Petitionary Communication*, (d) *Associational communication*. Studi dalam penelitian ini adalah bentuk komunikasi politik yang melibatkan bentuk pertama yaitu *elite communication*.

Sebenarnya untuk mendefinisikan komunikasi politik, akan banyak perspektif yang dapat diketengahkan, termasuk juga cara untuk menganalisis komunikasi politik itu sendiri. Seperti apa yang diketengahkan oleh Mueller (1973 :73) bahwa : ” Komunikasi politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila mereka menekankan pada hasil.”

Di sisi lain bagi mereka yang lebih menekankan fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi politik didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Almond dan Powell mendefinisikan komunikasi politik sebagai fungsi politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik merupakan prasyarat (*prerequisite*) bagi berfungsinya fungsi fungsi politik yang lain.

Selain itu, beberapa ilmuwan juga melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki fungsi yang sangat istimewa, komunikasi politik meletakkan basis untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa. Bahkan Plano (1982 : 24) melihat bahwa “komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik.”

Dapat disimpulkan bahwa secara formal objek komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik (*political outcomes*) di samping sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat untuk berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik dilihat sebagai jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik maka objek formal komunikasi politik juga adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna (*the commonness in meaning*) tentang fakta dan peristiwa politik.

2.3.2 Studi Komunikasi Politik

Harold Lasswell (1927) melakukan studi komunikasi politik pertama sekali. Dan, satu pemikiran yang terus diingat hingga saat ini adalah komunikasi politik dapat dianalisa dalam satu kalimat ”siapa berkata apa, dengan

menggunakan saluran apa, kepada siapa dan mengakibatkan efek apa” (*Who says what in which channel to whom and with what effect*). Lasswell merumuskan model satu-arah ini karena kepercayaannya pada ketakutan masyarakat bahwa media masa dapat dikuasai oleh kekuatan tersentral dengan membuat manipulasi simbol-simbol. Selanjutnya model tersebut telah banyak direvisi oleh penelitian berikutnya, seperti ”efek terbatas” atau ”konsekuensi minimal”(Werner, 1979). Di dalam pengembangan teori komunikasi massa, salah satu faktor utama yang menjadi kajian adalah menyangkut efek ke pada khalayak (*audience*).

Saat ini studi komunikasi politik sudah jauh berubah dari awal perumusannya. Kondisi lingkungan informasi politik yang berubah menyebabkan perubahan studi tersebut. Hal ini dapat dilihat, pada beragamnya acara dan saluran televisi yang memuat konten politik, tidak peduli itu acara masak-memasak. Sehingga perbedaan tradisional antar isi berita dan hiburan tidak banyak lagi membantu. Dengan demikian definisi komunikasi politik sudah harus diperluas (Mutz).

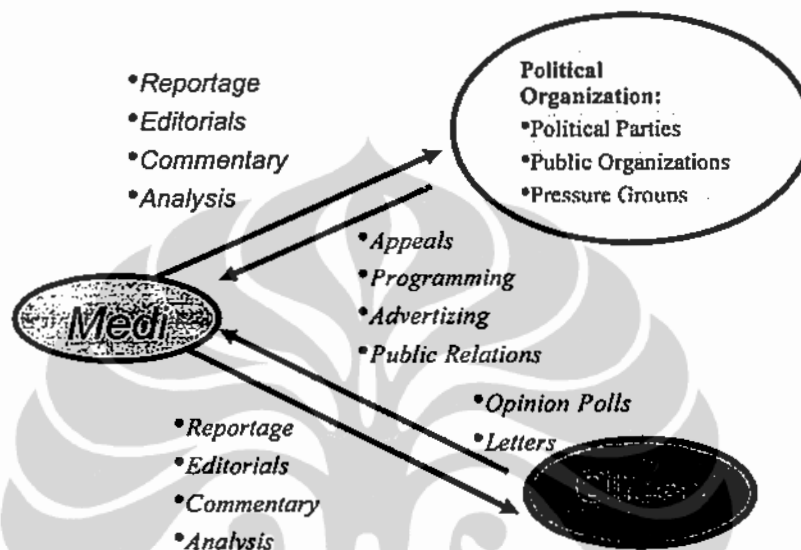
Ada empat perspektif dasar pada penelitian komunikasi politik. *Pertama*, pendekatan retorika (*rhetorical*), kritikal (*critical*) dan interpretatif. *Kedua*, penelitian mengenai efek komunikasi politik. *Ketiga*, teori agenda setting. *Keempat*, pendekatan *the uses and gratification*. Beberapa topik komunikasi politik yang umumnya diteliti, antara lain liputan media atas kampanye dan peristiwa politik, debat politik, iklan politik (*political advertising*) dan retorika politik. Topik-topik tersebut, bisa dilihat dari berbagai perspektif secara luas, mulai dari metode kualitatif seperti metode kritikal dan interpretative sehingga metode kuantitatif seperti analisis isi, desain eksperimental dan survey.

2.3.3 Model-model Komunikasi Politik Modern

Banyak model komunikasi politik yang berkaitan dengan media massa, berikut beberapa model yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

A. Model Brian Mc Nair: Tiga Elemen Komunikasi Politik

Dalam model yang lebih luas menurut *Denton & Woodward*, digambarkan ke tiga elemen komunikasi politik yang lain yaitu; *Political Organizations; Media dan Citizens* dan dapat digambarkan pada Gambar 2-1.



Gambar 2-1: Posisi Media Dalam Komunikasi Politik

B. Model Linear Lasswellian

Harold Lasswell (1972), mengungkapkan hubungan antara komunikasi dan Politik bahwa: "Politik adalah *who gets what, when and how*". Atau dapat dikatakan bahwa: "*The study of politics is the study of influential and the influential*". Maka yang kemudian dikenal sebagai formula Lasswell (1948) "*Who says what with what channel to whom with what effect*". Dalam gambar dapat dilihat pada Gambar: 2-2.

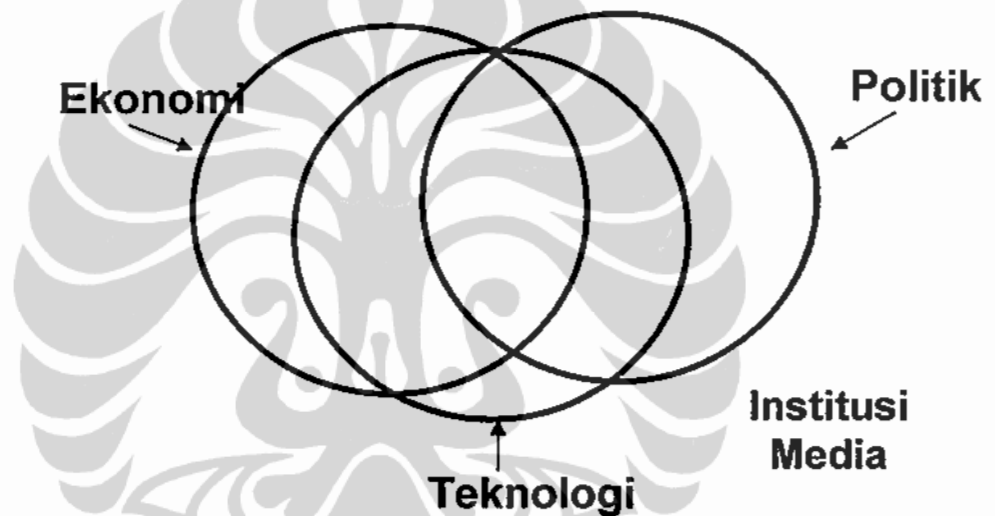


Gambar 2-2: Model Lasswell berkaitan dengan eleme process komunikasi

Model Komunikasi Lasswell, dapat kita terjemahkan: pertama, *Who* = Komunikator Politik; kedua, *Say What* = Bahasa Politik; ketiga, *In Which Cannels* = Media Komunikasi Politik; keempat; *To Whom* = Khalayak Komunikasi Politik; dan kelima, *With What Effects* = Pengaruh Komunikasi Terhadap Politik.

C. Model Mc Quail

Posisi media di antara kekuatan-kekuatan sosial di sekitarnya digambarkan McQuail seperti Gambar 2-3 dan Gambar 2-4.

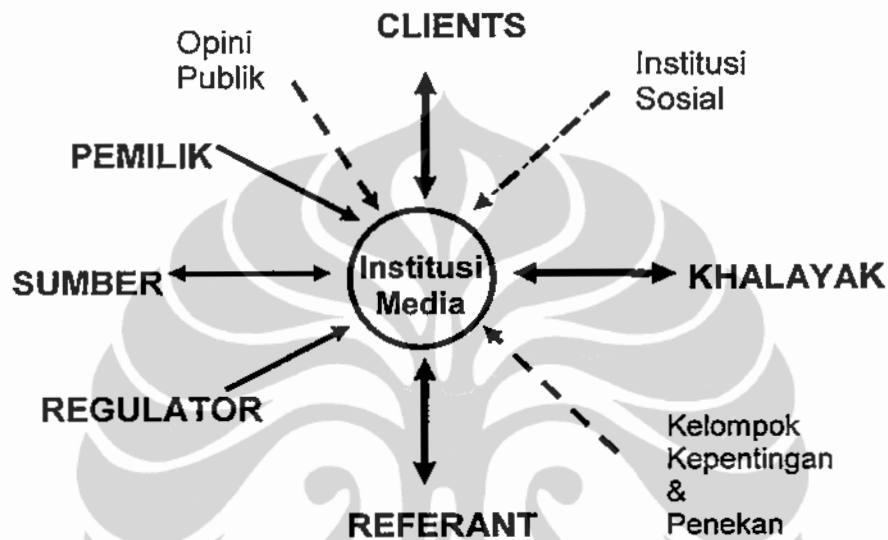


Gambar 2-3: Media di tengah tiga kekuatan penarik dan pendorong yang saling over-lap

Dari model McQuail di atas dapat dijelaskan bahwa bahwa media sangat dipengaruhi oleh tujuan utama media itu sendiri. Tujuan utama media yang telah teridentifikasi adalah;

- (1) Profit bagi para pemodal, baik pemilik maupun pemegang saham,
- (2) Idealisme, baik yang bersifat kultural, sosial maupun politik,
- (3) Memuaskan audiens atau khalayak,
- (4) Pemasukan iklan.

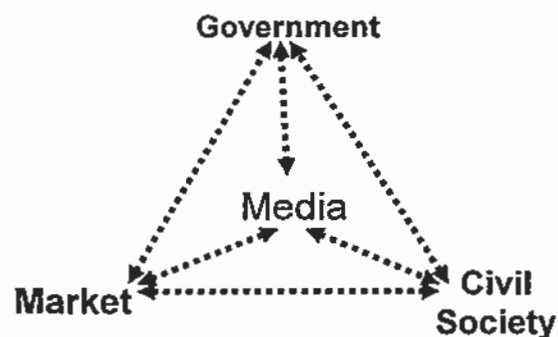
Dari keempat tujuan tersebut jarang terjadi keselarasan bahkan sering bertolak belakang. Terdapat faktor eksternal yang berarti bahwa ada *work culture* dan tujuan-tujuan lain dari media, khususnya mereka yang berorientasi manajemen atau laba, berorientasi teknis atau *skill (craft)*, atau mereka yang mengutamakan tujuan-tujuan komunikasi.



Gambar: 2-4. Garis Akuntabilitas antara media dan kekuatan sosial dalam kaitannya dengan penerbitan

D. Model Gazali

Effendi Gazali menggambarkan hubungan antara unsur-unsur Komunikasi Politik yang lebih tepat dalam Gambar 2-5 di bawah ini;



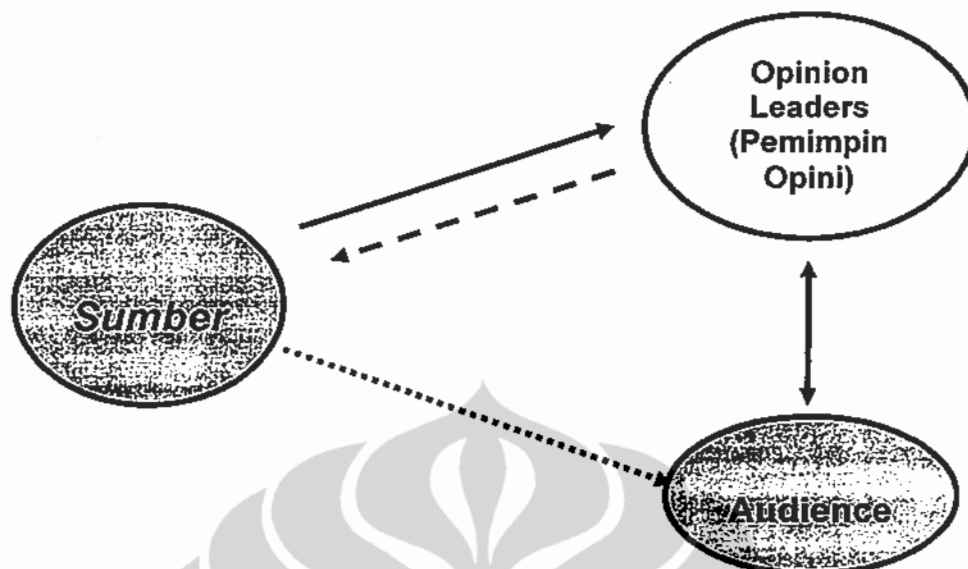
Gambar 2-5: Model Media Performance.

Dalam model ini Gazali menempatkan media sebagai *gatekeeper* ataupun *channel* yang terpenting dalam komunikasi politik karena kemampuan media dalam meng-*amplify* efek sebuah pesan politik. Tetapi, model ini memberi pengertian baru bahwa Komunikasi Politik tidak selamanya *mediated*. Ada juga saluran komunikasi politik yang secara langsung menghubungkan *market* (pemilik modal, advertiser, klien), *government* (pemerintahan) dan *civil society* (masyarakat).

E. Model Alir Dua Tahap

Model linear Lasswell dalam perkembangannya mengalami perubahan, dan memunculkan Model Alir Dua Tahap (*Two Steps Flow Model*). Komunikator Politik dapat dibagi sesuai dengan tipenya, yaitu: pertama, Politikus; kedua, Komunikator Profesional; dan Aktivis. Dalam konteks Aktivis adalah juru bicara salah satu interest Group, atau Pemuka Pendapat. Pemuka pendapat adalah mereka yang memiliki kredibilitas tertentu yang tinggi (*competence credibility dan safety credibility*). Peranan Aktivis sebagai Pemuka Pendapat dapat dilihat dalam model Two-Step Flow Communication or Information yang dapat diperlihatkan pada Gambar: 2– 6.

Model ini diperkenalkan oleh *Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson dan H Gudet* dalam *People's Choice (1944)*. Dalam penelitian mereka ditemukan bahwa pesan media massa sangat kecil didalam mempengaruhi putusan masyarakat tentang siapa calon presiden yang dipilihnya. Mereka lebih dipengaruhi oleh para pemimpin opini, sementara pemimpin opini mempengaruhi pendapat pengikutnya yang bersifat antar-pribadi. Media massa tidak langsung mempengaruhi *audience* tetapi melalui perantaraan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pemimpin opini / pemuka pendapat (*opinion leader*). Model ini didasari bahwa efek media massa itu terbatas.



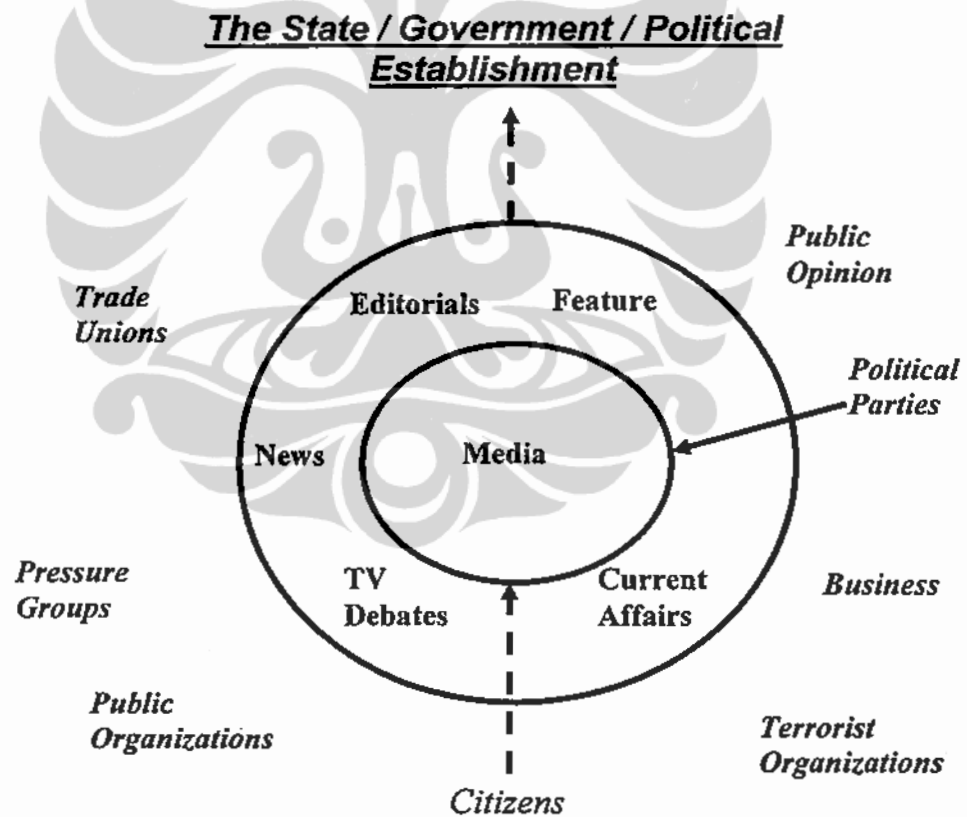
Gambar 2-6: Model Two-Step-Flow Pengaruh Media

F. Model Opini Publik dan Public Sphere

Dengan melihat pada karakteristik masyarakat demokrasi liberal, maka demokrasi politik harus diselenggarakan dalam suatu arena umum (publik). Pengetahuan dan informasi sebagai dasar rakyat membuat keputusan politik harus tersedia bebas untuk semua. *Jurgens Habermas* menyebutnya sebagai “public sphere”, yaitu: satu perangkat institusi yang dapat bertindak sebagai “zona penyangga” (*buffer zone*) antara negara dan ruang privat, untuk menjaga ruang privat dari keputusan yang dapat menginterferensi dengan semua cara yang memungkinkan aktivitas privat. Dengan demikian public sphere dapat dilihat adalah institusi komunikasi dalam masyarakat, melalui mana fakta dan opini dapat dipertukarkan, atau dengan perkataan lain adalah media massa. Model Public Sphere dapat dilihat pada Gambar:2-7. Dalam konsep modern tentang berita, dibangun secara presisi sebagai alat untuk memberitahu khalayak atas informasi yang penting, guna pengambilan keputusan dalam kegiatan politik serta membantu menyebar luaskan hasil diskusi publik.

Dengan demikian dapat dirumuskan lima fungsi Media dalam tipe masyarakat demokrasi, yaitu:

1. Menginformasi apa yang terjadi disekitarnya. Dapat juga disebut sebagai fungsi monitoring.
2. Melaksanakan pendidikan .
3. Menyediakan sebuah landasan (paltform) untuk wacana politik publik, memfasilitasi pembentukan opini publik, dan mengembalikan opini tersebut kepada publik asalnya.
4. Menyebarkan kegiatan institusi pemerintah dan politik. Fungsi ini biasa juga disebut sebagai peran jurnalisme “watchdog”.
5. Melayani masyarakat sebagai saluran advokasi untuk pandangan politik.



Gambar 2-7: Ruang Publik

2.4 Politik Komunikasi

Politik komunikasi terkadang sulit dibedakan dengan istilah-istilah seperti “Komunikasi Politik”, atau juga “Manajemen Komunikasi Publik”, “Manajemen Media”, serta “Manajemen *Public Relation*” yang dilakukan oleh aktor politik seperti kandidat atau partai. Tumpang-tindihnya istilah-istilah ini tergambar dengan jelas dalam kumpulan tulisan yang terangkum dalam buku “*Politik, Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*” (2002) yang dieditori oleh Harsono Suwardi, Sasa Djuarsa Sendjaja dan Setio Budi H.H. Suwardi (2002; 83-93) misalnya, menggunakan istilah Manajemen Komunikasi Publik untuk menggambarkan “konsep dan strategi Komunikasi Politik yang efektif”. Di dalam tulisannya itu, dia lantas memaparkan tentang kampanye dan praktek *Political Marketing*. Sedangkan Magdalena Wenas menggunakan istilah “Manajemen PR bagi Parpol” (2002: 149-167) untuk menggambarkan upaya-upaya Parpol membangun citra positif di mata publik.

Rendro Dhani (2004; 39) mengutip Grunig (1992; 4) yang mengatakan bahwa istilah manajemen komunikasi (*communication management*) dapat saling tukar (*interchangeably*) dengan istilah komunikasi organisasi (*organizational communication*) dan hubungan masyarakat (*public relations*). Selanjutnya dalam bukunya Dhani juga menyebut “manajemen media” yang didefinisikannya sebagai “semua kegiatan pejabat pemerintah yang mengatur, mengendalikan, atau menguasai media massa demi tujuan membentuk opini publik dengan cara menyensor berita, melarang menyiarkan berita, mengawasi kerja media, dan bentuk tekanan lain agar pemberitaan media dapat berpihak ke pemerintah” (2004; 42).

Definisi di atas tampaknya sejalan dengan definisi Chaffee (2001; 243) tentang “Politik Komunikasi” (*the politics of communication*) yang menurutnya bisa dimengerti dengan modifikasi atas phrasa terkenal dari Lasswell tentang komunikasi politik. Komunikasi politik menurut Lasswell bisa digambarkan sebagai “*Who says what to whom in what channel with what effects*” (siapa mengatakan apa pada siapa dengan efek apa). Sedangkan Politik Komunikasi, menurut Chaffee adalah “*Who gets to say what to whom?*” (siapa yang

memperoleh hak untuk berkata apa pada siapa). Manajemen media atau politik komunikasi ini, dapat digunakan untuk menjelaskan pengertian politik komunikasi.

Istilah “manajemen media” itu juga tampak bersinggungan dengan konsep “komunikasi politik”. McNair (1995:4) mendefinisikan komunikasi politik sebagai “*purposeful communication about politics*” yang meliputi salah satunya adalah “*all forms of communications undertaken by politician and other political actors for the purpose of achieving specific objective*”. Selain itu, komunikasi politik juga didefinisikan sebagai “*communication about them (politician or non politician) and their activities as contained in news reports, editorials, and other form of media discussion of politics*”.

Lebih lanjut McNair (1995: 6-7) menyatakan Komunikasi Politik, khususnya bagi parpol bisa mengambil dua bentuk yaitu (a) Iklan Politik, (*this form of political communication uses mass media to 'differentiate' political products (i.e. parties and candidates) and give them meaning for the 'consumer', just as the soap manufacturer seeks to distinguish a functionally similar brand of washing powder from another in a crowded marketplace*). – ini menggunakan asumsi-asumsi *political marketing*. Dan (b) *Public Relations; (media and information management tactics designed to ensure that a party receives maximum favourable publicity, and the minimum of negative)*.

Adapun Gazali (2004;2) membagi fokus kajian Komunikasi Politik menjadi dua yaitu *traditional focus* dan *new focus*. Inti pandangan Gazali dengan kategorisasi fokus kajian komunikasi politik itu adalah bahwa fokus kajian komunikasi politik tradisional adalah *communication of politics*. Dia dengan ringkas bisa digambarkan lewat pernyataan Harold Laswell tentang proses inti aksi komunikasi yaitu “*Who says what, in which channel to whom with what effect?*” (Siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan efek apa?). Sedangkan fokus kajian komunikasi politik baru, menurut Gazali adalah *politics of communication* yang diwakilkan dengan baik dengan pernyataan Chaffee seperti yang telah dikutip di atas, “*Who gets to say what to whom?*”.

Politik Komunikasi dalam pengertian Chaffee itu, terkait dengan masalah “Siapa mendapat hak mengatakan apa kepada siapa”. “Politik

Komunikasi” di sini bisa diartikan sebagai sebuah hak untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan ide-ide. “Politik Komunikasi” yang ideal, karenanya, mengandaikan adanya satu hak bagi siapapun untuk mengkomunikasikan pendapatnya dalam sebuah situasi yang bebas dan kedudukan yang sama antar partisipan komunikasi. Pengertian semacam itu mengingatkan kita akan konsep Habermas tentang “Ruang Publik” (*Public Sphere*) dan konsepnya tentang “*Ideal Speech Situation*”.

Menurut Habermas (Littlejohn & Foss, 2005; 322), “Situasi berbicara yang ideal” (atau Politik Komunikasi) yang harus dikembangkan di masyarakat harus mengandung paling tidak tiga hal. *Pertama*, dia membutuhkan kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan tidak boleh ada batasan tentang apa yang boleh dibicarakan; *kedua*, semua individu yang terlibat dalam proses komunikasi itu haruslah memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pandangannya dan; *ketiga*, norma-norma dan kewajiban masyarakat tidaklah bersifat hak dari sekelompok masyarakat saja namun terdistribusi di semua strata sosial yang terdapat dalam masyarakat itu.

Dalam konteks “Politik Komunikasi” maksudkan sebagai upaya yang lebih luas dari sekedar aktifitas manajemen media, manajemen informasi atau aktifitas PR bagi partai politik dalam pengertian-pengertian yang sudah disebutkan di atas. Istilah-istilah tersebut mengandung muatan-muatan yang lebih bersifat teknis dan kurang bisa menggambarkan sejumlah langkah politik yang pada galibnya bukan ditujukan langsung sebagai bentuk komunikasi politik, namun punya dampak komunikasi yang sangat besar. Disini, politik komunikasi ingin dipahami dalam dimensi yang lebih strategis. Berdasarkan hal tersebut, “Politik Komunikasi” yang dimaksudkan bisa dipahami dalam dua pengertian yaitu:

1. “Politik Komunikasi” sama dengan pengertian “Manajemen Media” seperti yang dikemukakan Dhani yaitu: “semua kegiatan pejabat pemerintah yang mengatur, mengendalikan, atau menguasai media massa demi tujuan membentuk opini publik dengan cara menyensor berita, melarang menyiarkan berita, mengawasi kerja media, dan bentuk tekanan lain agar pemberitaan

media dapat berpihak ke pemerintah” (2004; 42). Manajemen Media seperti ini memiliki dimensi keterkaitan dengan kekuasaan sebagaimana dikemukakan dalam definisi Chaffee tentang “*Politics of Communication*”.

2. Di sisi lain, “Politik Komunikasi” dalam konteks ini, merujuk pada dua hal; *Pertama*, bagaimana politik komunikasi dilakukan media dalam merekonstruksi realitas. *Kedua*: bagaimana Partai Golkar melakukan langkah khusus selama Rapimnas IV sehingga memperoleh atensi khusus yang bersifat positif dari media. Hal ini tentu saja mengandung *poseful communication about politics*” di situ seperti yang dikemukakan McNair.



BAB 3 METODOLOGI

3.1 Paradigma Penelitian

Berdasarkan pada analisa yang digunakan dalam penelitian ini, maka paradigma penelitian yang digunakan adalah konstruktivis. Paradigma konstruktivis melihat ilmu sosial sebagai suatu analisa yang sistematis terhadap makna dari setiap gejala atau aksi sosial dengan mengamati langsung perilaku keseharian dan latar belakang situasi yang terjadi pada masyarakat.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis melihat ilmu sosial sebagai suatu analisa yang sistematis terhadap makna dari setiap gejala atau aksi sosial dengan mengamati langsung perilaku keseharian dan latar belakang situasi yang terjadi pada masyarakat. Paradigma ini dalam ilmu sosial memiliki asumsi dan kriteria dasar sebagai berikut:

1. Secara Ontologis, yaitu berkaitan dengan asumsi mengenai objek atau realitas yang diteliti, paradigma konstruktivis melihat bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks yang spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.
2. Secara Epistemologis, yaitu berkaitan dengan asumsi mengenai hubungan antara peneliti yang diteliti dalam proses memperoleh pengetahuan mengenai objek, dapat dikatakan bahwa realitas atau pengetahuan merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Paradigma konstruktivis memandang mutlak adanya hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti.

3. Secara metodologis, yaitu berhubungan dengan asumsi bagaimana cara memperoleh pengetahuan dari suatu objek pengetahuan maka paradigma ini mengutamakan empati dan interaksi-dialektif antara eksternalisasi atau interaksi antar manusia sehingga manusia dipengaruhi oleh masyarakat, begitu pula sebaliknya.

Dalam paradigma konstruktivis, realitas tidak muncul begitu saja dalam bentuk sebagaimana realitas yang ada melainkan ia telah diseleksi melalui cara orang itu memandang setiap hal yang ada. Para konstruktivis meyakini bahwa untuk mengetahui dunia makna (*word of meaning*) mereka harus menginterpretasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemunculan berbagai peristiwa dalam media massa merupakan hasil rekonstruksi dan interpretasi atas peristiwa tersebut yang dilakukan oleh para pekerja media massa (Littlejohn, 1999).

Paradigma konstruktivis ini memandang kebenaran dalam pengetahuan objektif sesungguhnya merupakan sebuah perspektif tersendiri. Dimana menurut Schwandt (1994) dan Fausi (2003), Kebenaran dan pengetahuan objektif itu bukan ditemukan, melainkan diciptakan oleh individu. Apa yang terlihat ternyata tidak lain merupakan konstruksi pikiran individu dan ia sebenarnya bersifat majemuk, bertentangan, terkonstruksi dan bermakna. Kebenaran adalah persoalan banyaknya informasi dan konstruksi yang secara mufakat dianggap terbaik atau tercanggih pada saat tertentu.

Dalam sudut pandang ini, fakta difahami sebagai realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, berlaku sesuai konteks tertentu. Oleh karenanya media dapat dilihat sebagai agen konstruksi realitas. Makna yang tertuang dalam teks media bukanlah cermin atau refleksi dari realitas secara utuh tetapi realitas yang telah dikonstruksi.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Denzin & Lincoln (2000) menyebutkan pendekatan kualitatif digunakan dengan menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami tentang apa persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks yang alamiah dengan metode ilmiah.

Kirk dan Miller dalam Moleong (2004), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri yang berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristiwanya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersandar kepada interpretasi atau kritik ilmu sosial. Metode ini lebih banyak digunakan sebagai perspektif transenden yang mengaplikasikan logika kepada praktis. Penelitian ini biasanya berusaha menghadirkan interpretasi secara spesifik dan konteks permasalahan yang diteliti berdasarkan teori pengetahuan yang ada sehingga hasil interpretasi tersebut dapat menguatkan atau membantah teori tersebut (Neumann, 2000).

3.3 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan konstruksi yang dibangun media dalam melihat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai GOLKAR tahun 2008, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *framing* dari Gamson

dan Modigliani. Gamson mendefinisikan *frame* sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. *Frame* merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut *package*, *Framing analysis* yang dikembangkan oleh Gamson dan Modigliani memahami wacana media sebagai satu gugusan perspektif interpretasi (*interpretative package*) saat mengkonstruksikan dan memberi makna suatu isu (Sobur, 2001).

Analisis framing ini didasarkan pada pendekatan konstruktivis dimana melihat representasi media-berita yang terdiri dari *package interpretative* yang mengandung konstruksi makna tertentu. Didalam *package* ini terdiri dari dua struktur, yaitu *core frames* (gagasan sentral) merupakan elemen-elemen inti yang memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa dan mengarahkan makna isu yang dibangun *condensing symbol* (simbol yang dimampatkan).

Condensing symbol adalah hasil pencermatan terhadap interaksi perangkat simbolik (*framing devices* dan *reasoning devices*) sebagai dasar digunakannya perspektif. *Framing devices* menekankan pada aspek bagaimana "melihat" suatu isu dengan perangkat struktur *metaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depictions*, dan *visual images*. Sementara *reasoning devices* menekankan aspek pembenaran terhadap cara "melihat" isu, dengan perangkat struktur *roots* (analisis kausal) dan *appeals to principles* (klaim moral).

Condensing symbols adalah pencermatan terhadap interaksi perangkat simbolik (*framing devices* dan *reasoning devices*) sebagai dasar digunakannya perspektif. Simbol dalam wacana terlihat transparan bila dalam dirinya menyusup perangkat bermakna yang mampu berperan sebagai panduan menggantikan sesuatu yang lain.

Struktur *framing devices* yang mencakup *metaphors*, *exemplars*, *cathphrases*, *depictions*, dan *visual images* menekankan bagaimana 'melihat' suatu isu. Struktur *reasoning devices* menekankan aspek pembenaran terhadap cara 'melihat' isu, yaitu *roots*, *appeal principles* dan *consequences*.

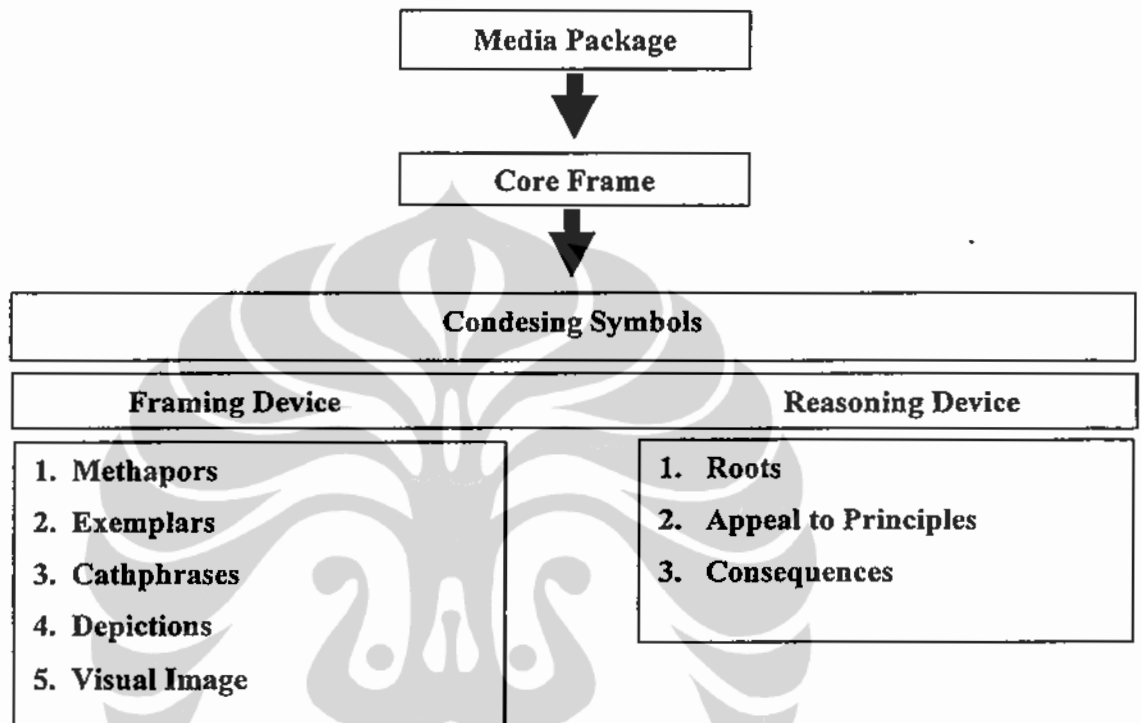
Secara literal *metaphors* dipahami sebagai cara memindahkan makna dengan merelasikan dua fakta melalui analogi atau memakai kiasan dengan menggunakan kata-kata seperti ibarat, bak, sebagi, umpama dan laksana.

Exemplars mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan atau pelajaran. Posisinya menjadsi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif. *Cathphrases*, istilah bentukan kata, atau frase khas cerminan fakta yang merujuk pemikiran atau semangat tertentu. Dalam teks berita, *cathphrases* mewujud dalam bentuk jargon, slogan atau semboyan.

Depictions, penggambaran dengan menggunakan kata, istilah, kalimat konotatif agar khalayak terarah ke citra tertentu. Asumsinya, pemakaian kata khusus diniatkan untuk membangkitkan prasangka, menyesatkan pikiran dan tindakan, serta efektif sebagai bentuk aksi politik. *Depictions* dapat berbentuk stigmatisasi, eufenisme, serta akronimisasi.

Visual images, pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan sejenisnya untuk mengekspresikan kesan, misalnya perhatian atau penolakan, dibesarkan-dikecilkan, ditebalkan atau dimiringkan, serta pemakaian warna. *Visual image* bersifat sangat natural, sangat mewakili realitas yang membuat erat muatan ideologi pesan dengan khalayak.

Skema 1. Perangkat framing Gamson dan Modigliani



(Sumber: Alex Sobur, Analisis Teks Media, 2001)

Roots (analisis kausal), membenaran isu dengan nmenghubungkan suatu objek atau lebih yang dianggap menjadi penyebab timbulnya atau terjadinya hal yang lain. Tujuannya membenarkan penyimpulan fakta berdasarkan hubungan sebab akibat yang digambarkan atau dibeberkan.

Appeal to principles, pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai argumentasi pembenar membangun berita, berupa pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan sejenisnya. Appeal to principles yang apriori, dogmatis, simplistik, dan monokausal (nonlogis) bertujuan membuat khalayak btak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya, memanipulasi emosi agar mengarah ke sifat,

waktu, tempat, cara tertentu, serta membuatnya tertutup dari bentuk penalaran lain. Sementara, *Consequences* adalah afek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.

Dalam upaya melihat aspek komunikasi politik yang dilakukan Kompas dan Suara Karya dalam merekonstruksi realitas, maka akan dilihat siapa mengatakan apa dalam berita yang dibangun media bersangkutan.

3.4 Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel pemberitaan pada surat kabar harian Kompas dan Suara Karya. Pengambilan kedua media tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kompas; Kompas sebagai media massa yang bebas dari ikatan atau kedekatan dengan partai politik (terutama) Partai Golkar, keberadaan Kompas sebagai media massa yang bebas dari pengaruh atau keterikatan baik secara kelembagaan maupun dengan tokoh-tokoh Golkar, diharapkan akan memberitakan apa adanya mengenai Partai Golkar.
2. Pemilihan Suara Karya; Suara Karya diambil sebagai objek untuk melihat sejauh mana konstruksi yang dibuat berkenaan dengan isu seputar Partai Golkar. Keterikatan Suara Karya dengan Partai Golkar apakah akan menempatkan berita-berita Suara Karya bebas dari kepentingan Partai secara institusi atau personal fungsionaris Partai Golkar.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data Primer, yaitu data deskriptif berupa berita seputar Rapimnas IV Partai GOLKAR tahun 2008, yang terbit tanggal 16 – 20 Oktober 2008.
- Data Sekunder, yaitu data yang digunakan guna melengkapi data penelitian yang berasal dari perpustakaan, jurnal, majalah, surat kabar lain, media internet atau tulisan-tulisan yang pernah diterbitkan, serta aturan-aturan Partai GOLKAR.

3.6 Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian

Keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian yang dilakukan ini mencakup beberapa hal :

- Dari segi metodologi, penelitian ini difokuskan pada penelitian teks, dalam hal ini teks berita media. Sehingga tidak mencakup seluruh konteks sosial, budaya dan politik yang melingkupinya.
- Penelitian ini menghasilkan hasil analisa yang deskriptif, dimana keilmiahan penelitian ini bersandar pada interpretasi dengan realitas yang sesungguhnya.

BAB 4

PROFIL MEDIA MASSA

4.1 Kompas

Kompas adalah koran harian yang paling banyak di baca di Indonesia. Kompas diterbitkan oleh Penerbit Kompas-Gramedia sejak 28 Juni 1965 dari kantornya di Jakarta Pusat. Sirkulasi pada awalnya adalah 4,800 eksemplar. Sejak tahun 1969, Kompas menjadi koran terbesar di Indonesia. Pada tahun 2004 sirkulasi hariannya mencapai 530,000 eksemplar sedangkan. Edisi Mingguan mencapai 610,000 eksemplar, dengan jumlah pembaca mencapai 2.25 juta orang. Harian ini mempunyai reputasi yang tinggi untuk penulisan dan jurnalisme investigasi.

Koran ini pertama sekali di sarankan terbit oleh Jendral Ahmad Yani kepada Frans Seda untuk menerbitkan sebuah koran yang kredibel, independent dan seimbang. Frans Seda menyampaikan ide ini kepada temannya, P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Ojong. Keduanya setuju pada proyek ini dan menunjuk Jakob Oetama sebagai redaksi pelaksana pertama sekali. Penerbitan ini awalnya bernama Bentara Rakyat. Oleh saran Presiden Sukarno namanya di ubah menjadi Kompas ("*compass*"), mengacu nama sebuah alat untuk mencari arah. Mending PK Ojong (Petrus Kanisius Ojong atau Ojong Peng Koen) bersama Jakob Oetama sebelumnya keduanya mendirikan majalah bulanan Intisari, yang terbit pertama tahun 1963. Jakob Utama sendiri merintis kariernya sebagai wartawan mingguan Penabur pada tahun 1955. Setelah Ojong meninggal, Jakob Oetama-lah yang menjadi nahkoda membesarkan Kompas. Dewasa ini Kompas telah menjadi surat terkemuka di Indonesia dalam rumpun usaha KKG – Kelompok Kompas Gramedia.

Ketika, koran ini akan didirikan, situasi saat itu, yakni tahun 1963, dimana tiap-tiap surat kabar mempunyai afiliasi politik-mengharuskan Kompas memiliki afiliasi politik juga. Maka Kompas pun berafiliasi dengan Partai Katolik, yang diketuai Frans Seda.

Ada tiga strategi pembahasan yang dilakukan Kompas bila harus mengupas sebuah masalah sensitif yang berkembang di tengah masyarakat. *Pertama*, model jalan tengah (MJT); menggugat secara tidak langsung; mengkritik tapi disampaikan dengan santun, terkesan berputar-putar, dan mengaburkan pesan yang hendak disampaikan. *Kedua*, model angin surga (MAS); dalam mengupas masalah Kompas bukan menggugat atau mempertanyakan hal-hal tertentu; tetapi lebih sebagai imbauan serta harapan. *Ketiga*, model anjing penjaga (MAP); yang bersifat terbuka dan menggunakan bahasa yang lebih berani.

Dengan visi dan strateginya itu, kini Kompas telah menjadi raksasa di dunia pers. Dimulai dengan mencetak Koran, kini telah berkembang menjadi multimedia, merambah berbagai aktivitas lain hingga menjadi *media-empire* yang kuat dan kaya. Sedikitnya 23 penerbitan yang berada dibawah KKG: Serambi Indonesia, Sriwijaya Post, Bernas, Surya, Pos Kupang, Banjarmasin Post (harian); Hoplaa Bola, Citra, Kontan, Otomotif, Raket, Warta Pramuka, Bobo, HAI, Hidup, Jakarta-Jakarta, Kawanku, Nova (mingguan); Info Komputer (Tengah bulanan); Foto Media, Intisari (Bulanan), Product and Industry (Dwi Bulanan).

Dengan mengusung idealisme tercapainya misi "Amanah Hati Nurani Rakyat" yang sekaligus menjadi merk dagang (*brand market*), Kompas membidik pasar kelas menengah ke atas. Pembaca Kompas dari segi umur, terbanyak pada umur 25 hingga 40 tahun, dengan pekerjaan dalam bidang White Collar. Sebagai Koran nasional, peredaran Kompas meliputi hampir seluruh kota di Indonesia, dan selalu menjadi *market leader*.

Dalam melihat situasi politik pasca reformasi, Kompas mengakui bahwa partai politik dalam Pemilu 1999 terdiri dari parpol yang berasas Islam, Kristen, Nasionalis dan Sekuler, tetapi Kompas tak ingin mempertentangkannya, malah justru memberi ruang yang sama pada semua partai seraya membuka ruang dialektika antara masa lalu (Orba yang monolitik) dan masa kini (era reformasi dengan multi-partai). Dalam mengangkat realitas politik, Kompas berusaha tidak hitam putih, tidak menegasikan masa lalu sama sekali tetapi membuka proses untuk berubah. Kompas menghindari cara berpikir linier yang mengutamakan salah satu partai sambil menyudutkan partai lain.

Dalam memberitakan satu partai, Kompas berusaha menyajikan apa adanya *track record* dan hal-hal yang berkaitan dengan partai tersebut. Soal bagaimana sosok partai itu, biarlah publik yang menilai, apakah partai itu reformis atau cenderung pro status quo. Dengan berpijak pada prinsip-prinsip jurnalisme yang bersifat objektif seperti itu, Kompas berupaya mempertahankan pasarnya.

Kompas tampak sangat realistis dengan posisi dirinya sebagai industri media. Melalui prinsip humanisme transsendental, Kompas mencoba keluar dari ikatan-ikatan primordialisme, termasuk politik, dan lebih menekankan substansi dari suatu permasalahan. Termasuk dalam hal ini mengenai relasi Kompas dan Katolik. Orang hanya melihat historisnya ketika membicarakan hubungan Kompas dengan Katolik. Dalam perkembangan selanjutnya tidak lagi.

Dengan kesadaran bahwa pasar itu kejam, Kompas berupaya menjaga netralitas, tidak terjebak ke dalam cara berpikir linier. Kompas berpendapat Media yang terlibat dalam pembuatan gambaran negatif atau positif partai-partai akan ditinggalkan masyarakat.

4.2 Suara Karya

Edisi pertama Harian Umum *Suara Karya* terbit tanggal 11 Maret 1971. Selama 37 tahun lebih berkiprah sebagai media informasi, perkembangan *Suara Karya* mengalami pasang surut. Penyempurnaan isi, rubrik dan perubahan perwajahan halaman telah dilakukan beberapa kali. Namun, semua perubahan itu tetap mengacu pada visi untuk mencerdaskan dan memberi pencerahan kepada masyarakat.

Gagasan penerbitan surat kabar ini berasal dari sekumpulan kader Golkar yang memiliki dorongan untuk membuat harian umum dengan misi demi menyukseskan pembangunan nasional. Mereka mengadakan pertemuan, bertukar pikiran, *ngomong-ngomong* soal iklan, fasilitas percetakan, langganan kantor berita, dan hal-hal lain yang terkait dengan persuratkabaran, sampai akhirnya menyetujui penerbitan sebuah harian bernama *Suara Karya*.

Terbitan pertama *Suara Karya* lebih bersifat perkenalan dan sederhana. Isinya praktis lebih banyak bersifat berita-berita laporan, tanpa berita-berita eksklusif, wawancara mendalam atau liputan khusus. Tajuk pertama harian ini menjelaskan misi khusus memerjuangkan bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita membangun bangsa sesuai motto *Suara Karya* ketika itu, yakni "Suara Rakyat Membangun".

Ini pemberitaan *Suara Karya* diharapkan dapat menggerakkan dan menggairahkan masyarakat untuk membangun, membuat masyarakat mencintai kerja, dan mengejar prestasi kerja, serta membuat masyarakat lebih demokratis dan terbuka, tanpa hambatan kepentingan sempit kelompok atau golongan. Sejak awal, penerbitan *Suara Karya* diarahkan untuk mendorong masyarakat melaksanakan praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai Pancasila dan UUD'45.

Seiring dengan perubahan di era reformasi, *Suara Karya* melakukan perubahan paradigma dalam pemberitaan. Perubahan itu terutama dalam penyajian informasi selalu diupayakan seaktual mungkin, faktual, disajikan secara kritis, obyektif proporsional dan independen. Lewat paradigma itu, *Suara Karya* diharapkan tetap menjadi terdepan dalam upaya mencerdaskan dan pencerahan bangsa, sejalan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI.

Misi *Suara Karya* ke depan adalah menjadikan surat kabar ini sebagai bacaan dan referensi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan, para politisi, kalangan profesional, pengelola BUMN, pimpinan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat menengah ke atas.

Visi dan misi itu diimplementasikan dalam kebijakan pemberitaan *Suara Karya* yang akurat, tepat waktu, dan tidak bias. Sebagai harian yang memiliki hubungan historis dan emosional dengan Partai Golkar, informasi yang disajikan tidak semata hanya untuk anggota-anggota atau pendukung Golkar. Surat kabar ini mengetengahkan informasi-informasi dengan kemasan sedemikian rupa untuk semua elemen masyarakat, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Fokus liputan *Suara Karya* diarahkan pada bidang politik, hukum dan keamanan, serta ekonomi dan bisnis. Namun, surat kabar ini juga memberikan perhatian pada berita-berita nusantara, metropolitan, mancanegara, keuangan dan pasar modal, olah raga, hiburan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Selama 37 tahun lebih melayani pembacanya, eksistensi *Suara Karya* semakin diakui. Dalam sejarahnya, harian ini bahkan selalu menjadi barometer bagi persuratkabaran nasional.

BAB 5

ANALISA FRAMING DAN POLITIK KOMUNIKASI CALON PRESIDEN DARI PARTAI GOLKAR

5.1 Partai Golkar dan Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008

Golkar merupakan *the ruling party* dan selalu tampil sebagai mayoritas tunggal sejak Pemilu 1971 hingga 1997, pernah menguasai legislatif dan pemerintahan pada jaman Orde Baru yang ditumbangkan setahun sebelumnya melalui gerakan reformasi. Tetapi pada Pemilu 1999, Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai yang paling banyak mendapat serangan dari hampir semua komponen masyarakat Indonesia.

Untuk tetap eksis dalam pentas politik, Golkar mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan agenda reformasi nasional. Untuk itulah demi menghadapi Pemilu 1999 Golkar mereposisi dirinya menjadi partai Politik melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar Juli 1998. melalui Munaslub ini juga Golkar memasuki Paradigma baru dengan visi, misi, dan platform perjuangan yang baru pula.

Dari Munaslub itu, partai berlambang pohon beringin memilih Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum, yang mengalahkan Jenderal Edi Sudradjat dalam perebutan Ketua Umum Partai Golkar. Sejak itu Golkar berusaha tampil sebagai partai terbuka, non diskriminasi, berwawasan kebangsaan dan sadar penuh terhadap realitas kemajemukan bangsa. Golkar juga tampil sebagai partai mandiri, demokratis, moderat, serta solid dan mengakar.

Sebagai partai yang ingin memperbaiki citra. Golkar masih berpijak pada platformnya yaitu membangun demokrasi Indonesia yang dilandaskan pada prinsip dan nilai Pancasila yang memperkokoh dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berjuang mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan rakyat secara menyeluruh.

Dalam paradigma barunya, Golkar memandang perlu pengembangan ekonomi kerakyatan yang terbukti dalam situasi krisis moneter punya potensi kuat untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia. Dengan ekonomi kerakyatan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan berkembang dan kuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Sementara untuk melahirkan bangsa yang kuat. Golkar memandang keserasian sosial, keharmonisan sosial dan kerukunan sosial sebagai basis integrasi bangsa. Kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembatannya kesenjangan sosial ekonomi antar individu, antar kelompok, antar kota-desa, antara Jawa dan luar Jawa, dan antara pusat dan daerah, serta terpeliharanya kerukunan hidup beragama, menjadi agenda penting yang coba diwujudkan. Karena selama ini, ketika Golkar berkuasa, persoalan-persoalan tersebut masih mewarnai perjalanan bangsa ini.

Setelah memimpin dua kali Pemilu 1999 dan tahun 2004 di Era Reformasi, Akbar Tanjung digantikan oleh Jusuf Kalla pada Munas di Denpasar Bali, 2004 dan memilih juga Soemarsono sebagai Sekretaris Jendral untuk periode 2004 – 2009.

Golkar berdasarkan Pancasila. Sementara tujuan Partai Golkar adalah: 1) Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945; 3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan hak asasi manusia.

Dalam struktur pengambilan keputusan organisasi Partai Golkar tertinggi terletak pada Musyawarah Nasional (Munas), yang memiliki wewenang memilih Ketua Umum dan Formatur, Menyusun Program Kerja Jangka Panjang Lima Tahunan. Setingkat dibawah Munas institusi pengambil keputusan disebut Rapat

Pimpinan Nasional, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pada periode Jusuf Kalla telah dilaksanakan tiga kali Rapimnas, dan tahun 2008 merupakan Rapimnas IV Partai Golkar. Dalam Rapimnas agenda yang dibahas dan diputuskan terdiri dari tiga hal utama: 1) Pemenangan Pemilu, 2) Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, 3) Pernyataan Politik Partai Golkar.

Rapimnas IV Partai Golkar kali ini menjadi penting karena waktunya yang berdekatan dengan Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilu Presiden 2009. Maka tidak mengherankan banyak isu-isu yang melingkupi Rapimnas IV baik dari kalangan internal maupun eksternal partai seperti, sistem suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2009, calon presiden dari Partai Golkar, dan lain-lain. Dari sekian banyak isu, isu calon presiden menjadi sorotan dan kupasan utama dalam Rapimnas.

Pada periode Jusuf Kalla telah dilaksanakan tiga kali Rapimnas, dan tahun 2008 merupakan Rapimnas IV Partai Golkar. Dalam Rapimnas agenda yang dibahas dan diputuskan terdiri dari tiga hal utama: 1) Pemenangan Pemilu, 2) Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, 3) Pernyataan Politik Partai Golkar.

5.2 Analisa Teks; Isu Calon Presiden

Analisa teks dilakukan dengan mengumpulkan data dari ketiga media yang berkaitan isu seputar calon presiden selama berlangsungnya Rapimnas IV Partai Golkar. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kerangka konstruksi yang dibangun oleh ketiga media, dalam hal ini menggunakan analisa framing dari Ganson dan Modigliani.

Objek berita yang diambil dari Kompas dan Suara Karya dalam rentang tanggal 16 – 20 Oktober 2008.

Tabel 1. Berita-berita Kompas dan Suara Karya

No	Media Massa	Judul	Edisi
1.	Kompas	1. Sultan Masih Unggul di Golkar	16 Oktober 2008
		2. Presiden Berharap Golkar Arif pada Waktunya	18 Oktober 2008
		3. Kalla Bakal Bertarung Lagi dengan Akbar	19 Oktober 2008
		4. Penetapan Capres Tunggu Hasil Pemilu Legislatif	20 Oktober 2008
2.	Suara Karya	1. Rapimnas Tidak Agendakan Pembahasan Capres	16 Oktober 2008
		2. Wacana Koalisi, SBY Berharap Golkar Tak Tergoda	18 Oktober 2008
		3. Jusuf Kalla Persilahkan Kader Saring Nama Capres	20 Oktober 2008
		4. Golkar Tak Akan Sembarangan Berkoalisi	21 Oktober 2008

5.2.1 Frame Kompas:

5.2.1.1 Sultan Masih Unggul di Golkar

Kompas menjelang Rapimnas IV setelah konferensi pers panitia penyelenggara menurunkan berita dengan judul “Sultan Masih Unggul di Golkar” dengan sub judul “Rapimnas IV Tak Agendakan Pengusulan Capres”, berita ini secara langsung mengkonstruksi Rapimnas IV yang akan dilaksanakan 17 - 19 Oktober 2008 untuk berbicara mengenai calon presiden dari Partai Golkar, walau hal tersebut tidak diagendakan dalam Rapimnas. Konstruksi ini diperkuat dengan memaparkan hasil survei, dimana Sultan lebih unggul dibandingkan kader Partai Golkar lain, termasuk Ketua Umum Jusuf Kalla.

Ide sentral (*core frame*) dari berita ini diperkuat dengan melansir pendapat Andi Mattalatta selaku Ketua Panitia Pengarah, yang memaparkan empat agenda pokok Rapimnas, meliputi soal organisasi, kemenangan pemilu,

pernyataan politik, dan pemberian penghargaan bagi tokoh-tokoh berjasa. Selanjutnya, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Panitia Pelaksana, Yorris Raweyai, dimana Kompas menulis:

Pengusulan Capres tak diagendakan dalam Rapimnas IV. Menurut Ketua Panitia Rapimnas Yorris Raweyai, dalam Rapimnas III sudah diputuskan hal itu akan dibahas setelah Pemilu legislatif.(paragraf kesembilan)

Gagasan sentral tersebut di atas dikembangkan oleh Kompas dengan beberapa perangkat framing (*framing devices*). Pada penulisan berita ini, digunakan perumpamaan (*metaphors*) yaitu, “Sultan juga sudah *dikalahkan* oleh Prabowo Subianto” dan “Sultan memang sudah memberikan *lampu hijau* atas permohonan kami agar beliau maju ke kancah nasional”. Dalam beritanya Kompas juga menulis contoh (*exemplars*) yaitu, “Ada empat agenda pokok yang akan dibicarakan didalam Rapimnas. Menurut Ketua Panitia Pengarah Andi Mattalatta, materi itu meliputi soal organisasi, pemenangan pemilu, pernyataan politik, dan pemberian penghargaan bagi tokoh-tokoh berjasa.”

Frase yang menarik (*catchphrases*) ini di tulis Kompas terkait hasil survei dimana Sultan Hamengkubuwono X lebih unggul dibandingkan kader Partai Golkar lain, termasuk Ketua Umum Jusuf Kalla sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada alenia kedua yaitu, “Ini masih dinamika”. Frase ini, merupakan tanggapan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Rully Chairul Azwar atas fakta keunggulan Sultan. Istilah konotatif (*depictions*) seperti “Sultan juga sudah dikalahkan Prabowo Subianto”, yang ditujukan untuk membangun image bahwa keunggulan Sultan tidak bertahan lama dan mengalami perubahan dimana sekarang Sultan juga sudah dikalahkan Prabowo, dan keadaan ini akan senantiasa berdinamika terkait hasil survei calon presiden.

Ide sentral berita “Sultan Masih Unggul di Golkar”, diperkuat pula perangkat penalaran (*Reasoning Devices*), yang memfokuskan bahwa berita ini disusun dalam teks yang benar. Dimana fakta serta komentar yang dipilih dan

dikutip ditujukan untuk memperkuat konstruksi berita. Kompas dalam teks berita ini menulis;

“Partai Golkar bekerjasama dengan sejumlah lembaga survei terus mencermati tingkat popularitas para calon presiden. Dari berbagai hasil survei hingga saat ini posisi Sultan Hamengkubuwono X masih lebih unggul dibandingkan kader Partai Golkar lain, termasuk Ketua Umum Jusuf Kalla”.

Teks diatas merupakan analisis kausal (*roots*) Kompas dalam memperkuat konstruksi berita, yang menegaskan bahwa Sultan Hamengkubuwono X unggul atas kader Partai Golkar lainnya berdasarkan hasil survei dari lembaga survei yang bekerjasama dedngan Partai Golkar.

Pada berita ini Kompas selanjutnya memperkuat konstruksi dengan premis dasar (*appeal to principle*), yang mnegaskan bahwa Rapimnas IV tidak mengagendakan pembahasan calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Golkar, hal ini merujuk pada hasil Rapimnas III dimana masalah calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar akan dibahas setelah Pemilu Legislatif. Klaim ini ditulis pada paragraf kesembilan.

Kompas pada berita ini berusaha meyakinkan pembaca bahwa Rapimnas IV tidak bisa lepas dari pembahasan calon presiden, efek bingkai (*consequences*) ini dikonstruksi dengan teks, “tidak mustahil momentum Rapimnas dimanfaatkan daerah untuk memunculkan nama-nama capres”.

Skema 2. Frame “Sultan Masih Unggul di Golkar”

<p>Core Frame Rapimnas IV tidak mengagendakan Calon Presiden dari Partai GOLKAR, nama Sultan menguat sebagai Calon Presiden</p>

Framing Devices		Reasoning Devices	
Methaphors	- “Sultan juga sudah <i>dikalahkan</i> oleh Prabowo	Roots	Partai Golkar bekerjasama dengan sejumlah lembaga

	<p>Subianto”</p> <p>- “Sultan memang sudah memberikan <i>lampu hijau</i> atas permohonan kami agar beliau maju ke kancah nasional”</p>		<p>survei terus mencermati tingkat popularitas para calon presiden. Dari berbagai hasil survei hingga saat ini posisi Sultan Hamengkubuwono X masih lebih unggul dibandingkan kader Partai Golkar lain, termasuk Ketua Umum Jusuf Kalla.</p>
Exemplars	<p>Ada empat agenda pokok yang akan dibicarakan didalam Rapimnas. Menurut Ketua Panitia Pengarah Andi Mattalatta, materi itu meliputi soal organisasi, pemenangan pemilu, pernyataan politik, dan pemberian penghargaan bagi tokoh-tokoh berjasa</p> <p>“Dalam Rapimnas IV nanti, Panitia Pengarah tidak mengagendakan daerah-daerah untuk mengusulkan nama-nama calon presiden dan wakil presiden. Namun, menurut Rully, tidak mustahil momentum Rapimnas dimanfaatkan daerah untuk memunculkan nama-nama capres.</p>	Appeal to Principles	<p>Pengusulan Capres tak diagendakan dalam Rapimnas IV. Menurut Ketua Panitia Rapimnas Yorris Raweyai, dalam Rapimnas III sudah diputuskan hal itu akan dibahas setelah Pemilu legislatif.</p>
Cathpharases	<p>“Ini masih dinamika”</p>	Consequences	<p>Tidak mustahil momentum Rapimnas dimanfaatkan daerah untuk memunculkan nama-nama capres</p>
Depictions	<p>Menurut Rully, dari survei yang ada, Sultan juga sudah dikalahkan Prabowo Subianto.</p>		
Visual Image	<p>(tidak ada)</p>		

Dari konstruksi yang dibangun Kompas menjelang Rapimnas, Kompas terlihat menggunakan politik komunikasi dengan menggunakan nara sumber Rully Chairul Azwar, selaku Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar untuk

memperkuat pernyataan bahwa Sultan Hamengkubuwono X merupakan capres terkuat dari internal Partai Golkar. Tetapi, pernyataan tersebut juga menyebutkan elektabilitas Sultan mulai menurun dan dikalahkan Prabowo Subianto, yang tidak lagi menjadi kader Partai Golkar. Dari nara sumber di atas, terungkap kekuatan Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar yang unggul untuk posisi Cawapres.

Pembenaran fakta kekuatan Sultan oleh Rully Chairul Azwar menjadi alenia pembuka atas hasil survei yang dilakukan Partai Golkar bekerja sama dengan lembaga survei independen. Mengenai agenda Rapimnas IV sendiri ditempatkan pada bagian berikutnya.

Berkenaan dengan agenda Rapimnas IV, Kompas menggunakan Andi Mattalatta sebagai nara sumber, selaku Ketua Panitia Pengarah. Andi Mattalatta menguraikan agenda internal yang meliputi organisasi, kemenangan pemilu, pernyataan politik dan pemberian penghargaan kepada tokoh yang berjasa. Berkenaan dengan pengusulan capres, Kompas menggunakan Yorris Raweyai selaku Ketua Panitia, untuk mengungkapkan tidak adanya pembahasan usulan nama capres di Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008.

Dalam berita ini, Kompas juga mengungkapkan mengenai kekuatan dan kesiapan Sultan Hamengkubuwono X sebagai Capres pada Pilpres 2009. Disini Kompas menggunakan dua nara sumber; Pertama, Bondan Nusantara selaku koordinator seniman Yogyakarta. Kedua, Rustam Fathoni selaku sekretaris Apdesi.

5.2.1.2 Presiden Berharap Golkar Arif pada Waktunya

Pasca Pembukaan Rapimnas IV Partai Golkar yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat, Kompas menurunkan berita dengan dengan judul, "Presiden Berharap Golkar Arif pada Waktunya". Ide sentral (*core frame*) yang menjadi inti dari tulisan berita ini adalah, koalisi yang akan dibangun Partai

Golkar nanti merupakan pilihan arif, dimana SBY berharap kebersamaan dan dukungan dapat kembali terjalin. Pernyataan harapan SBY, terhadap Partai Golkar agar arif dalam menentukan koalisi, pada paragraf awal berita memperkuat argumentasi bahwa Kompas memberikan perhatian khusus atas harapan SBY tersebut.

Pengandaian (*metaphors*) yang ditulis Kompas "kerendahan hati" merupakan ungkapan yang menunjukkan sebuah harapan dan keinginan SBY terhadap Partai Golkar, agar tetap dalam kebersamaan dan melakukan pilihan politik yang tepat dalam membangun koalisi. Untuk memperkuat konstruksi berita ini, contoh fakta (*exemplars*) atas kebersamaan SBY-Golkar adalah, penghargaan SBY kepada Partai Golkar yang telah mendukung pemerintahan SBY. Ini bisa dilihat pada alenia kesembilan yang ditulis, "Presiden menyatakan penghargaannya atas komitmen Golkar mendukung pemerintahan selama empat tahun terakhir. 'Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Golkar atas kebersamaan dan dukungannya,' katanya."

Untuk memperkuat konstruksi ide sentral, pada berita ini ditulis frase yang menarik (*catchphrases*) yaitu, "Pernyataan ini bukan sebuah catatan kaki maupun catatan pinggir, tetapi sebuah catatan politik". Frase ini ingin menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan oleh SBY merupakan sebuah pernyataan politik yang terkait untuk tetap bersama dan membangun koalisi bersama Partai Golkar. Pada berita ini untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa Partai Golkar memang diinginkan oleh SBY dalam membangun koalisi kedepan, maka pilihan istilah bersifat konotatif (*depictions*) untuk melabeli, adalah "Golkar telah Berperan baik dalam periode sekarang ini".

Untuk menunjukkan kekuatan konstruksi berita ini, Kompas memperkuat dengan gambar (*visual image*) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPRRI, Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Gambar ini memperkuat ide sentral dangkai membingkai kedekatan SBY dengan Partai Golkar.

Skema 3. Frame “Presiden Berharap Golkar Arif pada Waktunya”

Core Frame		Reasoning Devices	
Koalisi yang dibangun Partai GOLKAR nanti merupakan pilihan arif, dimana SBY Berharap kebersamaan dan dukungan dapat kembali terjalin.			
Framing Devices		Reasoning Devices	
Methaphors	“Dengan segala <i>kerendahan hati</i> , saya berpendapat,”	Roots	Meskipun wacana koalisi partai politik sudah muncul menjelang Pemilu 2009, presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, berharap Partai Golkar akan arif menentukan koalisi pada waktunya.
Exemplars	Presiden menyatakan penghargaan atas komitmen Golkar mendukung pemerintahan selama empat tahun terakhir. “Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Golkar atas kebersamaan dan dukungannya,” katanya.	Appeal to Principles	Presiden menambahkan semua pihak berharap posisi dan pilihan Partai Golkar untuk menentukan koalisi. Sebab, koalisi parpol diyakini memiliki tujuan dan niat yang baik bagi kehidupan bangsa”
Cathpharases	Pernyataan ini bukan sebuah catatan kaki maupun catatan pinggir, tetapi sebuah catatan politik.	Consequences	Setiap orang yang bertemu dengannya, kata Taufik, selalu menyarankan agar PDI-P membangun koalisi yang sempurna dan berkoalisi dengan Partai Golkar. “Orang partai juga setuju supaya saya <i>approach</i> dengan Golkar,” paparnya.
Depictions	Golkar telah Berperan baik dalam periode sekarang ini.		

Visual Image	Gambar SBY dan JK berbincang Sangat akrab saat mengahdiri HUT Ke 44 Partai GOLKAR.
--------------	--

Pemberitaan yang dibangun Kompas mengenai kehadiran dan harapan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapimnas IV dan HUT ke-44 Partai Golkar, terlihat Kompas menggunakan politik komunikasi dengan menggunakan nara sumber yang dipilih merupakan tiga orang yang berkepentingan dengan rencana koalisi capres dan nerasal dari tiga partai besar, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar, Taufik Kiemas selaku Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP.

Susilo Bambang Yudhono dalam pemberitaan ini, menyampaikan harapan mengenai koalisi yang akan dibangun oleh Partai Golkar. SBY meyakini Partai Golkar akan arif dan tepat waktu dalam menentukan pilihan koalisi, apalagi Partai Golkar sebagai Partai besar. Ungkapan ini diposisikan diawal berita.

Dalam kesempatan selanjutnya, SBY menyampaikan terimakasih atas kebersamaan Partai Golkar di pemerintahan sekarang ini. Penghargaan Presiden disampaikan seperti;

‘Selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Golkar atas kebersamaan dan dukungannya’.

Dan ungkapan ini juga dibalas ucapan terima kasih Jusuf Kalla kepada SBY selama menjadi pembina Partai Golkar dimasa orde baru.

Harapan dan saling puji antar kedua tokoh tersebut termasuk pandangan koalisi untuk capres, oleh Kompas coba dipertentangkan dengan ungkapan Taufik Kiemas, selaku Ketua Dewan Pertimbangan PDIP. Kompas, menyitir ungkapan taufik yang juga merupakan harapan seperti halnya harapan SBY pada Partai Golkar. Dimana membangun koalisi dengan Partai Golkar. Tetapi pernyataan harapan tersebut dilengkapi dengan pernyataan berikutnya bila menemui

kegagalan koalisi dengan Partai Golkar. PDIP menyiapkan langka koalisi dengan PKS.

5.2.1.3 Kalla Bakal Bertarung Lagi dengan Akbar

Pertarungan Munas GOLKAR di Bali 2004 yang lalu kembali dihadirkan oleh Kompas untuk melukiskan perebutan calon presiden dari Partai GOLKAR tahun 2009. Kompas menurunkan berita dengan judul, 'Kalla Bakal Bertarung Lagi dengan Akbar'. Dalam pemberitaan tersebut memuat ide sentral (*core frame*), penyebutan nama-nama Calon Presiden dari Partai GOLKAR tidak terbendung. Ide sentral tersebut dapat ditemukan dari beberapa paragraf, yang menyebutkan nama-nama calon yang diusulkan DPD Partai GOLKAR Provinsi maupun organisasi masyarakat (ormas) pendiri maupun didirikan oleh Partai GOLKAR.

Pada pemberitaan ini, Kompas mengandaikan munculnya kembali nama Kalla dan Akbar sebagai pertarungan ulang bagi kedua tokoh Partai GOLKAR setelah pertarungan perebutan Ketua Umum Partai GOLKAR di Bali tahun 2004 yang lalu. Pengandaian (*methaphors*) Kompas ini dapat dilihat pada paragraf empat, yaitu:

"Akbar kuda hitam, Akbar – Kalla akan bertarung kembali," kata kata Zaenal Bintang, salah satu pengurus DPP Partai GOLKAR.

Untuk memperkuat penulisan berita ini, Kompas menyajikan contoh fakta (*exemplars*), yaitu pada alenia ketiga; "Selaku Ketua Umum, Kalla adalah yang paling banyak diusulkan DPD. Namun, pencalonan Akbar banyak yang tidak menduga karena Akbar sudah berada di luar struktur DPP Partai GOLKAR." Selanjutnya untuk memperkuat ide sentral, berita ini pada memuat frase yang menarik (*cathphrases*), yaitu: "Ketua Umum Partai GOLKAR kembali bertarung dengan mantan Ketua Umum Partai GOLKAR Akbar Tanjung". Istilah konotatif (*depictions*) yang dipilih pada penulisan ini, keinginan DPD Partai GOLKAR

Provinsi selaku peserta Rapimnas mendesak pengumuman nominasi capres-cawapres dan kemudian melakukan survei. Dalam memperkuat image, Kompas memuat daftar nama-nama Calon presiden dari Partai GOLKAR.

Untuk memperkuat ide sentral nama-nama Calon Presiden dari Partai GOLKAR diperkuat dengan perangkat penalaran (*Reasoning Devices*), yang memfokuskan bahwa berita ini disusun dalam teks yang benar. Analisa kausal (*roots*), yang memperkuat bahwa penyebutan nama-nama Capres tidak bisa dibendung dapat dikutip pada teks berikut”

“Panitia Rapimnas IV sesungguhnya tidak mengagendakan DPD untuk menyampaikan nama-nama Capres dan Cawapres. Namun aspirasi DPD tidak bisa dibendung”.

Pada berita ini Kompas selanjutnya memperkuat konstruksi dengan premis dasar (*appeal to principle*), sehingga penyebutan nama-nama capres sebagai ide sentral tidak terelakan lagi dalam forum Rapimnas IV, yaitu mengutip ungkapan juru bicara DPD Lampung; “Kita harus jujur, kepentingan partai atau pribadi. Partai yang didukung orang atau orang gunakan partai”. Untuk meyakinkan pembaca, bahwa penyebutan nama-nama tidak bisa dibendung efek bingkai (*consequences*) ini dikonstruksi dengan menyebutkan seluruh nama-nama nominasi capres selain Jusuf Kalla dan Akbar.

Skema 4. Frame “Kalla Bakal Bertarung Lagi dengan Akbar”

Framing Devices		Reasoning Devices	
Methahors	Akbar <i>kuda hitam</i> , Akbar-Kalla akan Bertarung kembali	Roots	Panitia Rapimnas IV sesungguhnya tidak mengagendakan DPD untuk menyampaikan nama-nama Capres dan

			Cawapres. Namun aspirasi DPD tidak bisa dibendung.
Exemplars	Selaku Ketua Umum, Kalla adalah yang paling banyak diusulkan DPD. Namun pencalonan Akbar banyak yang tidak menduga karena akbar sudah berada di luar struktur DPP Partai GOLKAR.	Appeal to Principles	Kita harus jujur, kepentingan partai atau pribadi. Partai yang didukung orang, atau orang gunakan partai.
Cathpharases	Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kembali bertarung dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung.	Consequences	Selain Kalla dan Akbar, nama lain yang banyak dinominasikan adalah Agung Laksono, Surya Paloh, Sultan Hamengkubuwono X, dan Aburizal Bakrie. Nama lain yang juga dinominasikan adalah Mulasi, Fadel Muhammad, Syamsul Muarif, dan Priyo Budi Santoso. Adapun dari luar Partai Golkar adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Ginanjar Kartasmita, dan Ryamizard Ryacudu.
Depictions	Meskipun demikian, banyak juga DPD yang mendesak DPP Partai Golkar untuk mulai mengumumkan nomine capres-cawapres dan kemudian melakukan survei.		
Visual Image	Tabel Nama Calon Presiden dari Partai Golkar.		

Judul berita yang cukup menarik dengan mempertentangkan dua tokoh sentral di Partai Golkar, yaitu Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Pada, pemberitaan kali ini Kompas terlihat menggunakan politik komunikasi dengan menggunakan nara sumber Zaenal Bintang, salah satu pengurus DPP Partai GOLKAR. Dalam

ungkapan Zaenal disebutkan, 'Akbar kuda hitam. Akbar-Kalla akan bertarung kembali'. Sementara mengenai nama-nama yang muncul dan diusulkan DPD Provinsi merupakan reportase dari laporan DPD Provinsi.

Dalam berita ini juga terungkap keinginan daerah agar segera diputuskan nama capres dari Partai Golkar, dan masalah yang melingkupinya sehingga belum diputuskan. Kompas menggunakan nara sumber, juru bicara DPD Lampung, yang mengungkapkan;

'Kita harus jujur, kepentingan partai atau pribadi. Partai yang didukung orang atau orang gunakan partai'.

Penyebutan nama-nama capres oleh daerah-daerah, Kompas memilah dan memetakan daerah tersebut sebagai sumber informasi. Seperti, DPD Sulawesi Selatan yang menekankan pasangan SBY-JK tetap harus diberikan kesempatan karena telah terbukti menunjukkan kinerjanya. Begitu juga DPD Sulawesi Tenggara yang meminta memasukan nama Susilo Bambang Yudhoyono.

5.2.1.4 Penetapan Capres Tunggu Hasil Pemilu Legislatif

Kompas menurunkan judul "Penetapan Capres Tunggu Hasil Pemilu Legislatif" sebagai sebuah konstruksi atas perjalanan Rapimnas IV Partai GOLKAR. Dalam berita ini pesan yang ingin disampaikan bahwa Partai GOLKAR akan menentukan Capres setelah Pemilu Legislatif. Adapun ide setral (*core frames*) dari berita ini diperkuat dengan ungkapan Jusuf Kalla, 'Partai GOLKAR ingin mendahulukan persiapan pemilihan anggota legislatif, April 2009, daripada pemilihan presiden-wapres pada Oktober mendatang'.

Ide sentral yang dikembangkan pada berita tersebut dengan beberapa alat framing (*framing devices*) Kompas menggunakan penggandaian (*metaphors*) seperti, "Partai Golkar juga menyatakan akan menjadi mitra dan *kawan seiring dan seperjalanan* yang nyaman bagi kekuatan politik manapun dalam mewujudkan cita-cita nasional". Selanjutnya Kompas juga menulis, apa yang diputuskan Partai Golkar sebagai sebuah keputusan yang tepat dengan menulis

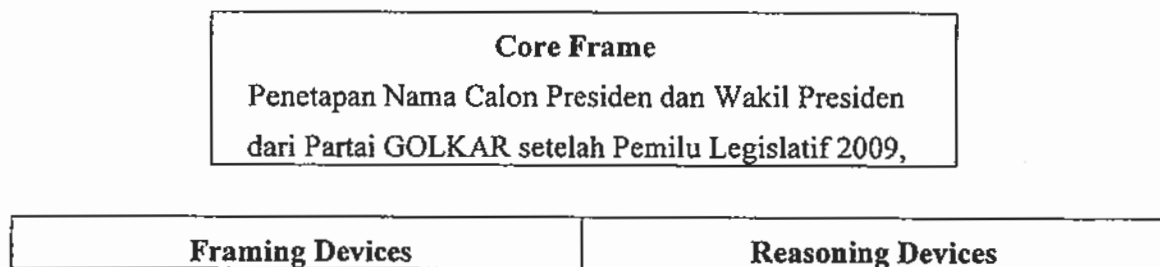
frase yang menarik (*catchphrases*). Dimana ditonjolkan Pemilu 2009 adalah momentum untuk mengembangkan demokrasi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam berita ini Kompas mengangkat beberapa contoh (*exemplars*) sebagai sebuah fakta penguat, atas sebuah keputusan Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2009. “Kalau mau sebut nama silahkan saja. Tetapi, Partai Golkar belum akan menetapkan nama itu. Tunggu waktunya saja”, diungkap Jusuf Kalla. Istilah konotatif (*depictions*) seperti, “Dalam era demokrasi multipartai perlu digalang koalisi agar muncul *kekuatan politik mayoritas* dalam Pemilu 2009”, adalah bagian dari alat framing untuk memperkuat konstruksi berita.

Ide sentral yang ada dalam berita dikembangkan pula dengan alat alasan (*Reasoning Devices*) yang menekankan bahwa konstruksi berita tersebut benar adanya. Fakta yang disajikan adalah untuk memperkuat konstruksi berita ini, seperti alasan kausal (*roots*) dalam teks ini yaitu, “Secara sistematis, partai Golkar ingin mendahulukan persiapan pemilihan anggota legislatif, April 2009, daripada pemilihan presiden-wapres pada Oktober mendatang”.

Premis dasar (*appeal to principle*) yang dikembangkan dalam berita ini, “Kesiapan Partai Golkar untuk berkoalisi itu didasari oleh keinginan menciptakan pemerintahan yang kuat, efektif, dan stabil, tetapi dengan memprasyaratkan adanya dukungan politik yang kuat dan tercermin dalam lembaga legislatif hasil pemilu”. Untuk meyakinkan pembaca mengenai ide sentral, efek bingkai (*consequences*) yang digunakan, “Dalam Rapimnas IV Golkar, kata Kalla, akan disusun mekanisme dan etika pencalonan presiden dan wapres”.

Skema 5. Frame “Penetapan Capres Tunggu Hasil Pemilu Legislatif”



Methaphors	Partai Golkar juga menyatakan akan menjadi mitra dan <i>kawan seiring dan seperjalanan</i> yang nyaman bagi kekuatan politik manapun dalam mewujudkan cita-cita nasional.	Roots	Secara sistematis, partai Golkar ingin mendahulukan persiapan pemilihan anggota legislatif, April 2009, daripada pemilihan presiden-wapres pada Oktober mendatang.
Exemplars	Kalau mau sebut nama silahkan saja. Tetapi, Partai Golkar belum akan menetapkan nama itu. Tunggu waktunya saja.	Appeal to Principles	Kesiapan Partai Golkar untuk berkoalisi itu didasari oleh keinginan menciptakan pemerintahan yang kuat, efektif, dan stabil, tetapi dengan memprasyaratkan adanya dukungan politik yang kuat dan tercermin dalam lembaga legislatif hasil pemilu.
Cathphrases	Pemilu 2009 adalah momentum untuk mengembangkan demokrasi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat	Consequences	Dalam Rapimnas IV Golkar, kata Kalla, akan disusun mekanisme dan etika pencalonan presiden dan wapres.
Depictions	Dalam era demokrasi multipartai perlu digalang koalisi agar muncul kekuatan politik mayoritas dalam Pemilu 2009		
Visual Image	-		

Pada bagian berita ini, Kompas terlihat menggunakan politik komunikasi dengan lebih banyak pada mengutip ungkapan Meutia Hafidz, selaku pembaca pernyataan Rapimnas IV Partai Golkar. Tetapi yang disitir pertama adalah penetapan capres dan cawapres dari Partai Golkar dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009.

Selanjutnya Kompas mengutip pernyataan Meutia, berturut-turut mengenai; demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, mendukung pemerintahan hingga akhir masa jabatan pada oktober 2009, koalisi permanen untuk cita-cita

nasional, dan era multi partai yang membutuhkan koalisi untuk kekuatan politik mayoritas.

Berkenaan dengan hasil Rapimnas IV dimana Partai Golkar akan menetapkan Capres setelah Pemilu Legislatif. Kompas menjadikan Jusuf Kalla sebagai nara sumber kunci untuk menutup berita dengan pernyataan berikut;

'Kalau mau sebut nama silakan saja. Tetapi Partai Golkar belum akan menetapkan nama itu. Tunggu waktunya saja'.

5.2.1.5 Bangunan Berita Kompas tentang Isu Calon Presiden

Dari Partai GOLKAR

Pemberitaan Kompas selama Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2009, bila dicermati fokus pada isu calon presiden dari Partai Golkar, berita-berita yang disajikan bagaikan berita bersambung. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa tinjauan:

Pertama, Keseluruhan ide sentral (*core frames*) dari seluruh berita yang dimuat Kompas semuanya berkenaan dengan Capres Partai Golkar. Dimana pada pemberitaan awal, yang merupakan konferensi pers Panitia Pelaksana, berita dibangun dengan mengarahkan pembaca pada kekuatan Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon kuat dari internal Partai GOLKAR, walau agenda mengenai calon presiden tidak diagendakan oleh Panitia Pengarah RapimnasIV. Selanjutnya pada berita kedua, konstruksi yang dibangun Kompas adalah harapan SBY untuk tetap bersama Partai Golkar. Sementara pada berita ketiga, Kompas lebih tegas mengenai calon presiden dari Partai Golkar dengan saling menghadapkan antara Kalla-Akbar, dengan ide sentral penyebutan nama capres yang tidak terbandung. Dan, pada berita keempat yang dimuat Kompas berkenaan dengan Rapimnas IV Partai Golkar, juga mengusung ide sentral mengenai calon presiden dari Partai Golkar, walau penetapan tersebut menunggu hasil Pemilu Legislatif.

Kedua, dalam penggambaran realitas calon presiden dari Partai Golkar, Kompas mencoba menyajikan kemungkinan-kemungkinan calon presiden dari

Partai Golkar. Pertama, menyebutkan kemungkinan kekuatan Sultan dalam Rapimnas IV yang menguat. Kedua, kemungkinan SBY menjadi calon presiden dari Partai Golkar dengan harapan terjadinya koalisi. Selanjutnya pada pemberitaan ketiga, Kompas menyebutkan nama-nama Capres dari Partai Golkar yang diungkapkan daerah, walau lead yang digunakan adalah pertarungan Kalla-Akbar. Sementara yang keempat, menjadi titik akhir keinginan tersebut, yaitu penetapan menunggu hasil Pemilu Legislatif.

Ketiga, bangunan berita yang dibuat Selama Rapimnas IV dikonstruksi untuk fokus pada calon presiden, sementara agenda yang dibahas sangat banyak terutama yang berkaitan dengan pemilu legislatif.

5.2.2 Frame Suara Karya

5.2.2.1 Rapimnas Tidak Agendakan Pembahasan Capres

Menjelang Rapimnas IV Partai Golkar, Suara Karya menurunkan berita dengan judul “Rapimnas Tidak Agendakan Pembahasan Capres”. Dalam konstruksi berita ini, upaya untuk menyampaikan tidak akan ada penetapan Capres dari Partai Golkar untuk pemilihan presiden 2009.

Ide sentral (*core frames*) dari berita ini adalah, “Rapimnas tidak mengagendakan pembahasan capres dan cawapres”, ini diperkuat dengan melansir pendapat Andi Mattalatta, selaku Ketua SC Rapimnas IV Partai Golkar:

“Sesuai aturan internal partai, Partai Golkar belum akan membahas soal capres atau cawapres sebelum pemilu legislatif berlangsung. ‘Tentu kita harus melihat dulu hasil pemilu legislatif itu seperti apa,’ujarnya”.

Ide sentral tersebut diperkuat Suara Karya dengan menggunakan beberapa alat framing (*framing devices*). Untuk berita ini Suara Karya tidak menggunakan pengandaian (*metaphors*) dan istilah konotatif (*depictions*). Dalam merekonstruksi ide sentral digunakan frase yang menarik (*catchphrases*) seperti, ‘Tentu kita harus melihat dulu hasil pemilu legislatif itu seperti apa’. Frase

tersebut ditulis untuk menjadi kata kunci penutup untuk menyatakan tidak akan ada nama capres sebelum pemilu legislatif.

Pengembangan ide sentral juga menyajikan beberapa contoh (*exemplars*) seperti, 'Agenda utama rapimnas kali ini lebih menitik beratkan pada kesiapan Partai Golkar dalam menyongsong Pemilu 2009 mendatang'. Dimana contoh ini juga menjadi kata kunci untuk menutup keluarnya nama capres dari Partai Golkar sebelum pemilu legislatif selesai. Untuk memperkuat konstruksi, disajikan *visual images* pimpinan Partai Golkar dalam Konferensi Pers berkenaan dengan pelaksanaan Rapimnas IV Partai Golkar 2009.

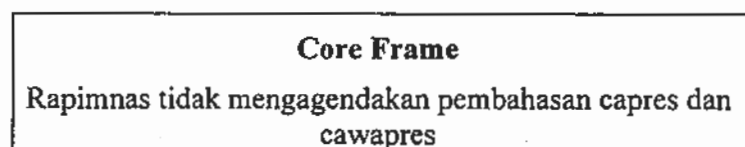
Untuk mendukung konstruksi berita ini, dikembangkan perangkat alasan (*Reasoning Devices*) yang menekankan tidak akan ada nama Penetapan Capres atau Cawapres dari Partai Golkar dalam Rapimnas IV Partai Golkar 2009. Alasan kausal (*roots*) disampaikan seperti, " Sesuai aturan internal partai, Partai Golkar Belum akan membahas soal capres atau cawapres sebelum pemilu legislatif berlangsung".

Premis dasar (*appeal to principle*) yang dikembangkan Suara Karya pada berita ini adalah dalam rangka menguatkan tidak akan nama capres sebelum pemilu legislatif selesai, maka digunakan filosofi Partai Golkar, yaitu:

"Tapi yang pasti, filosofi Partai Golkar adalah rakyat yang mencari pemimpin, bukan pemimpin yang cari-cari rakyat.

Upaya meyakinkan berita ini, Suara Karya membuat efek bingkai (*consequences*) seperti, "Namun jika ada peserta yang ingin mengiring rapimnas untuk membicarakan capres Partai Golkar, itu tidak masalah". Efek ini ditulis untuk meyakinkan pembaca walaupun peserta ingin menggiring pembicaraan capres bukan suatu masalah, tetapi hal tersebut bukan suatu keputusan.

Skema 6. Frame "Rapimnas Tidak Agendakan Pembahasan Capres"



Framing Devices		Reasoning Devices	
Methahors	(tidak ada)	Roots	Sesuai aturan internal partai, Partai Golkar Belum akan membahas soal capres atau cawapres sebelum pemilu legislatif berlangsung
Exemplars	Agenda utama rapimnas kali ini lebih menitik beratkan pada kesiapan Partai Golkar dalam menyongsong Pemilu 2009 mendatang.	Appeal to Principles	Tapi yang pasti, filosofi Partai Golkar adalah rakyat yang mencari pemimpin, bukan pemimpin yang cari-cari rakyat.
Cathpharases	Tentu kita harus melihat dulu hasil pemilu legislatif itu seperti apa	Consequences	Namun jika ada peserta yang ingin mengiring rapimnas untuk membicarakan capres Partai Golkar, itu tidak masalah.
Depictions	(tidak ada)		
Visual Image	Konferensi Pers Panitia Pengarah dan Pelaksana Rapimnas IV Partai Golkar.		

Pada pemberitaan awal berkenaan dengan Rapimnas IV Partai Golkar yang diturunkan Suara Karya, memuat judul 'Rapimnas Tidak Agendakan Pembahasan Capres', Suara Karya terlihat menggunakan politik komunikasi dengan mewawancarai Ketua Panitia Pengarah, Andi Mattalatta berkenaan dengan agenda utama Rapimnas yang lebih menitik beratkan pada kesiapan Partai Golkar dalam menyongsong Pemilu Legislatif 2009.

Berkenaan dengan keinginan daerah membahas usulan capres, Andi Mattalatta selaku panitia pengarah mempersilahkan, seperti ungkapan berikut;

'Namun, jika ada peserta yang ingin mengiring rapimnas untuk membicarakan soal capres Partai Golkar, itu tidak masalah. Tapi yang pasti, filosofi Partai Golkar adalah rakyat yang mencari pemimpin, bukan pemimpin yang cari-cari rakyat'.

Selain Andi Mattalatta, nara sumber lainnya adalah Yorris Raweyai, selaku Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas IV. Yorris, menyampaikan agenda Rapimnas diluar sidang-sidang, Partai Golkar melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dari sumber dan komentar yang disampaikan terlihat, Suara Karya mencoba membingkai Rapimnas sebagai kegiatan untuk mengahdapi pemilu legislatif 2009. Dan tidak menggiring pembaca pada peta kekuatan capres internal.

5.2.2.2 SBY Berharap Golkar Tak Tergoda

Dari pembukaan Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2009, Suara Karya memuat berita dengan judul “SBY Berharap Golkar Tak Tergoda”, berkenaan dengan wacana koalisi. Ide sentral berita ini adalah, harapan SBY untuk kembali bersama Partai Golkar dalam pemilu presiden 2009.

Untuk merekonstruksi ide sentral tersebut, maka dikembang perangkat frame (*Framing Devices*), seperti melakukan penggandaian (*methaphors*) yaitu: ‘Jauhkan politik yang *menghalalkan* segala cara maupun kekerasan yang merusak moral bangsa’. Dan untuk meyakinkan pembaca atas ide sentral tersebut disajikan beberapa contoh (*exemplars*), yaitu:

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Partai Golkar agar berhati-hati dan tidak tergoda oleh pengguliran wacana koalisi yang mulai dikembangkan sejumlah petinggi partai politik”.

Dan selanjutnya untuk memperkuat ide berita dibuat frase yang menarik (*cathpharases*), yaitu: ‘Keharmonisan kerja sela-ma ini, katanya, memberikan kerja maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara’. Untuk memperkuat ide sentral, Suara Karya menampilkan photo sebagai *visual images*, yaitu SBY dan Ibu Ani Yudhoyono yang hadir di tengah-tengah Keluarga Besar Partai Golkar. Selanjutnya agar keyakinan ide sentral dapat diterima oleh pembaca digunakan istilah konotatif (*depictions*), seperti:

”Saat ini pendukung utama pemerintah adalah Partai Golkar dan Partai Demo-krat. Karena itu kegagalan pemerintah adalah kekalahan bagi Golkar juga”.

Konstruksi berita ini juga diperkuat dengan menggunakan perangkat alasan (*reasoning devices*) yang menekankan kepada para pembaca bahwa harapan SBY begitu besar untuk tetap bersama Partai Golkar dalam Pilpres 2009 adalah sebuah kebenaran. Maka, fakta dan komentar yang dikutip adalah upaya memperkuat ide sentral konstruksi berita ini.

Alasan kausal (*roots*), yang digunakan dalam berita ini yaitu keyakinan SBY akan ketepatan pilihan dan waktu yang dilakukan Partai Golkar dalam penentuan koalisi, seperti dalam tulisan berikut: ‘Presiden mengaku akan menghormati pilihan Partai Golkar soal koalisi antar partai. Dia yakin, sebagai partai besar, tentu Golkar menentukan pilihan mau-pun waktu koalisi secara tepat’.

Adapun premis dasar (*Appeal to Principle*), yang digunakan sebagai perangkat alasan pengembangan ide sentral dalam berita ini adalah: “Presiden juga meminta Partai Golkar agar berperan lebih besar dalam pemba-ngunan negara. Sekalipun saat ini peran Partai Golkar sudah besar, katanya, itu masih bisa ditingkatkan lagi”. Sementara itu untuk memberikan efek bingkai (*consequences*) pada berita ini yaitu:

” Kita hormati keyakinan Partai Golkar sepanjang untuk kehidupan masya-rakat yang lenih baik.

Skema 7. Frame “SBY Berharap Golkar Tak Tergoda”

Core Frame Harapan SBY untuk Kembali Bersama Partai Golkar Dalam Pemilu Presiden 2009
--

Framing Devices		Reasoning Devices	
Methahors	Jauhkan politik yang	Roots	Presiden mengaku akan

	<i>menghalalkan</i> segala cara maupun kekerasan yang merusak moral bangsa.		menghormati pilihan Partai Golkar soal koalisi antar partai. Dia yakin, sebagai partai besar, tentu Golkar menentukan pilihan maupun waktu koalisi secara tepat.
Exemplars	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Partai Golkar agar berhati-hati dan tidak tergoda oleh pengguliran wacana koalisi yang mulai dikembangkan sejumlah petinggi partai politik	Appeal to Principles	Presiden juga meminta Partai Golkar agar berperan lebih besar dalam pembangunan negara. Sekalipun saat ini peran Partai Golkar sudah besar, katanya, itu masih bisa ditingkatkan lagi.
Cathpharases	Keharmonisan kerja selama ini, katanya, memberikan kerja maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara.	Consequences	Kita hormati keyakinan Partai Golkar sepanjang untuk kehidupan masyarakat yang lenih baik.
Depictions	Saat ini pendukung utama pemerintah adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat. Karena itu kegagalan pemerintah adalah kekalahan bagi Golkar juga.		
Visual Image	SBY ditengah-tengah petinggi Partai Golkar dan kader Golkar dalam Pembukaan Rapimnas IV Partai Golkar.		

Tulisan kedua yang diturunkan Suara Karya berkenaan dengan Rapimnas IV Partai Golkar bertepatan dengan Pembukaan Rapimnas IV dan HUT Ke-44 Partai Golkar tahun 2008, politik komunikasi yang digunakan Suara Karya dengan nara sumber Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Presiden RI dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang menghadiri acara Pembukaan Rapimnas IV dan Puncak Peringatan HUT Ke-44 Partai Golkar.

Suara Karya banyak menyitir ungkapan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sumber berita, terutama pidato atau sambutan SBY pada acara tersebut di atas. Susilo Bambang Yudhoyono, berharap Partai Golkar sebagai Partai besar

punya kearifan berkaitan dengan digulirkannya wacana koalisi menjelang Pemilu 2009. Pada kesempatan ini SBY memuji dan menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Partai Golkar dalam pemerintahan, dan berharap peran yang lebih besar masih bisa ditingkatkan oleh Partai Golkar.

Pujian dan penghormatan SBY pada Partai Golkar, langsung mendapat sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menyampaikan terima kasih kepada SBY selama menjadi Pembina Partai Golkar dari jalur A (ABRI). Pada kesempatan tersebut, Jusuf Kalla juga menyampaikan suet SBY-JK telah banyak membawa perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti ungkapan berikut;

'Kinerja pemerintah di semua sektor terbaik dibanding masa sebelumnya. Ekonomi tumbuh, keamanan stabil. Penegakan hukum memang masih ada yang diperbaiki'.

Berita ini selanjutnya juga tetap memuat Rencana Rapimnas IV, yang disampaikan Yorris Raweyai, selaku Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas IV. Yorris, menyampaikan empat agenda pokok Rapimnas IV yaitu, konsolidasi organisasi, pemenangan pemilu, pernyataan politik dan pemberian penghargaan.

5.2.2.3 Jusuf Kalla Persilahkan Kader Saring Nama Capres

Berdasarkan judul yang disajikan Suara Karya, 'Jusuf Kalla Persilahkan Kader Saring Nama Capres', merupakan upaya Suara Karya melihat keinginan beberapa daerah memunculkan nama capres dari Partai Golkar, tetapi bukan sebuah keputusan organisasi. Adapun ide sentral yang dimuat dalam berita ini adalah: Partai Golkar Belum Menentukan Capres dan Cawapres walau telah menyebutkan nominasi karena fokus pada pemilu legislatif.

Dalam pengembangan konstruksi ide sentral (*core frames*) dalam berita ini menggunakan perangkat framing (*framing devices*), seperti penggunaan penggandaian (*metaphors*) seperti:

“Apakah dia siap *bertarung* dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung untuk memperebutkan posisi capres atau cawapres dari Partai Golkar”.

Untuk meyakinkan pembaca, maka dalam berita ini diambil beberapa contoh (*exemplars*) yang menguatkan ide sentral seperti: “Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla memaklumi keinginan sejumlah kader dan pengurus Partai Golkar yang menghendaki adanya nominator calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilu legislatif berlangsung”.

Penguatan berita ini juga dilakukan dengan memuat frase yang menarik (*catchphrases*), seperti: “ Kita akan menentukan pilihan nanti, karena belum dibuka. Dan kita sepakat belum waktunya”. Dan juga dilakukan penggunaan istilah konotatif (*depictions*), seperti: “Sekarang ini kita fokus supaya suara Golkar naik”.

Penguatan konstruksi berita atas ide sentral yang ada, juga dilakukan menggunakan perangkat alasan (*reasoning devices*), maka dalam berita ini disajikan fakta dan kutipan komentar yang mendukung ide sentral. Alasan kausal (*roots*), yang dilakukan dalam memperkuat berita ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

“Meski mempersilahkan sejumlah kader menjajakan nama capres dan cawapres, Jusuf Kalla menegaskan Partai Golkar tidak akan menetapkan sosok capres-cawapres sebelum pemilu legislatif”.

Sementara, premis dasar (*apeal to principle*) berita ini tulis dari kutipan dalam rangka memperkuat ide sentral, yaitu: “Dengan mendahulukan pemilu legislatif, kekompakan di tubuh Partai Golkar makin solid. Partai Golkar akan mengatur mekanisme pengaturan capres - cawa-pres dengan baik”. Sementara untuk memberikan keyakinan pembaca, maka efek bingkai (*consequences*) yaitu: “Pasti ada mekanisme pada waktunya nanti. Sederhana kita bekerja”.

Skema 8. Frame “Jusuf Kalla Persilahkan Kader Saring Nama Capres”

Core Frame
Partai Golkar Belum Menentukan Capres dan Cawapres
walau telah menyebutkan nominasi karena fokus pada
pemilu legislatif

Framing Devices		Reasoning Devices	
Methahors	Apakah dia siap <i>bertarung</i> dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung untuk memperebutkan posisi capres atau cawapres dari Partai Golkar.	Roots	Meski mempersilahkan sejumlah kader menjajakan nama capres dan cawapres, Jusuf Kalla menegaskan Partai Golkar tidak akan menetapkan sosok capres-cawapres sebelum pemilu legislatif.
Exemplars	Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla memaklumi keinginan sejumlah kader dan pengurus Partai Golkar yang menghendaki adanya nominator calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilu legislatif berlangsung.	Appeal to Principles	Dengan mendahulukan pemilu legislatif, kekompakan di tubuh Partai Golkar makin solid. Partai Golkar akan mengatur mekanisme pengaturan capres - cawapres dengan baik
Cathpharases	Kita akan menentukan pilihan nanti, karena belum dibuka. Dan kita sepakat belum waktunya.	Consequences	Pasti ada mekanisme pada waktunya nanti. Sederhana kita bekerja.
Depictions	Sekarang ini kita fokus supaya suara Golkar naik.		
Visual Image	---		

Pada penulisan berita ini, Suara Karya terlihat menggunakan politik komunikasi dengan mewawancarai Jusuf Kalla sebagai nara sumber tunggal selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar terkait dengan usulan nama-nama Capres dari Partai Golkar. Tulisan berita ini dimulai dengan pemakluman Jusuf Kalla

atas penyebutan nominasi capres dari Partai Golkar oleh kader dan pengurus Partai Golkar, serta mempersilakan menjaring nama yang cocok. Ini dapat dilihat pada ungkapan berikut, 'Senua orang sudah menyebut. Silakan saja'.

Pada kesempatan yang sama Jusuf Kalla menyinggung masa lalu dalam perekrutan dan penetapan capres dari Partai Golkar, yaitu Konvensi. Jusuf Kalla menyebutkan, 'Kita fokus agar kita bicara soal (pemilu) legislatif saja, jangan sampai pengalaman lalu terjadi'. Ungkapan ini diletakan pada alenia lebih awal dibandingkan pernyataan mekanisme perekrutan dan penetapan capres dari Partai Golkar, Jusuf Kalla mengungkapkan, 'Pasti ada mekanisme pada waktunya nanti. Sederhana kita bekerja'.

Berkenaan dengan kemungkinan Akbar Tanjung dicalonkan dan kesiapan menghadapinya, Jusuf Kalla menyampaikan ungkapan berikut;

'Wah, tidak bakal seperti itu, cuma (pandangan) teman-teman saja. Kita fokus agar kita bicara legislatif saja'. Sebagai sebuah upaya menetralsir pertentangan Kalla-Akbar.

5.2.2.4 Golkar Tak Akan Sembarangan Berkoalisi

Berkenaan dengan Pilpres 2009 dan Rapimnas IV Partai Golkar, Suara Karya memuat berita dengan judul 'Golkar Tak Akan Sembarangan Berkoalisi'. Judul ini memuat ide sentral (*core frames*) berita, yaitu: 'Koalisi Dibangun untuk Memenangkan Pemilihan Presiden'. Ide sentral yang dikonstruksi berita ini dikembangkan dengan memuat *framing devices* dan *reasoning devices* sehingga pembaca memahami dan yakin akan ide yang disampaikan.

Penggandaian (*methaphors*) yang digunakan dalam berita ini seperti: 'Konvensi hanya akan memunculkan "*penumpang gelap*", yaitu figur capres dari tokoh di luar partai. Penggandaian ini menggambarkan bahwa penetapan Capres dari Partai Golkar jangan sampai menghasilkan penumpang gelap. Hal tersebut semakin di perkuat dengan penggandaian lainnya, yaitu: 'Golkar sudah *setengah*

mati, tiba-tiba ada orang di tengah jalan *naik kendaraan* yang sudah setengah mati kita bina’.

Selanjutnya perkuatan terhadap ide sentral dapat dilihat dari penyajian beberapa contoh (*exemplars*), yaitu: "Partai Golkar tidak mengukur dulu bagaimana partai lain, tetapi harus yakin bahwa koalisi dengan partai A atau partai B memberikan kemungkinan besar bagi Golkar untuk memenangi Pilpres". Sementara pemilihan frase menarik yang disajikan berita ini dalam memperkuat berita ini adalah: "Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana sinergi antar calon terjalin baik dan didukung oleh partai yang kuat".

Perkuatan terhadap ide sentral berita ini dilakukan dengan penggunaan istilah konotatif (*depictions*) yang terdapat pada: "Jadi bukan masalah ukuran besar kecilnya partai, tetapi dapatkah figur-figur itu memenangi pilpres".

Pengembangan ide sentral juga dilakukan dengan perangkat alasan (*reasoning devices*), upaya meyakinkan pembaca akan ide sentral ini dilakukan dengan mengutip komentar dan fakta yang mendukung, bahwa koalisi ditujukan untuk memenangi pemilihan presiden.

Alasan kausal (*roots*) yang disajikan dalam berita ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

"Koalisi permanen antar partai merupakan keharusan dalam pilpres 2009. Koalisi itu sendiri harus dilakukan sebelum pilpres. Koalisi adalah suatu keharusan karena syarat-syarat pilpres nanti lebih berat. Kedua, apabila menang, koalisi harus meletakkan pemerintahan yang melebihi 50 persen agar nanti dengan DPR baik dan kuat".

Sementara premis dasar (*appeal to principle*) yang digunakan untuk meyakinkan pembaca ditujukan bahwa koalisi dibangun atas dasar saling sepeham dalam tujuan serta bagaimana mensejahterakan bangsa dan melaksanakan pemilu yang demokratis. Premis ini disajikan sebagai upaya bahwa membangun sebuah koalisi bukanlah pekerjaan mudah, melainkan bagaimana menyatukan dua hal yang berbeda untuk sebuah tujuan.

Untuk lebih meyakinkan pembaca, berita ini menyajikan efek bingkai (*consequences*), yaitu: “Partai Golkar menganggap terlalu pagi berbicara calon presiden sejak sekarang. Kami tidak ingin bicara soal capres sebelum tahu apa hasil pemilu legislatif”. Hal ini semakin memperkuat Koalisi dibangun bukan secara sembarangan tetapi perlu perhitungan, dan yang terpenting hasil pemilu legislatif sebagai faktor berpengaruh.

Skema 9. Frame “Golkar Tak Akan Sembarangan Berkoalisi”

Core Frame			
Koalisi Dibangun untuk Memenangkan Pemilihan Presiden			
Framing Devices		Reasoning Devices	
Methaphors	<ul style="list-style-type: none"> - Konvensi hanya akan memunculkan “<i>penumpang gelap</i>”, yaitu figur capres dari tokoh di luar partai. - Golkar sudah <i>setengah mati</i>, tiba-tiba ada orang di tengah jalan <i>naik kendaraan</i> yang sudah setengah mati kita bina. 	Roots	Koalisi permanen antar partai merupakan keharusan dalam pilpres 2009. Koalisi itu sendiri harus dilakukan sebelum pilpres. Koalisi adalah suatu keharusan karena syarat-syarat pilpres nanti lebih berat. Kedua, apabila menang, koalisi harus meletakkan pemerintahan yang melebihi 50 persen agar nanti dengan DPR baik dan kuat.
Exemplars	Partai Golkar tidak mengukur dulu bagaimana partai lain, tetapi harus yakin bahwa koalisi dengan partai A atau partai B memberikan kemungkinan besar bagi Golkar untuk memenangkan Pilpres.	Appeal to Principles	Masing-masing partai juga harus sepaham dalam tujuan. Masing-masing harus berbicara bagaimana bangsa sejahtera, bagaimana kita menjalankan pemilu yang demokratis.
Cathpharases	Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana sinergi antar calon terjalin baik dan didukung oleh partai yang kuat.	Consequences	Partai Golkar menganggap terlalu pagi berbicara calon presiden sejak sekarang. Kami tidak ingin bicara soal capres sebelum tahu apa hasil pemilu legislatif.
Depictions	Jadi bukan masalah ukuran besar kecilnya partai, tetapi		

	dapatkah figur-figur itu memenangi pilpres
Visual Image	Photo Jusuf Kalla, didampingi Fahmi Idris, anggota Dewan Penasehat dan Sumarsono, Sekjen DPP Partai Golkar saat tasyakuran HUT ke-44 Partai Golkar di DPP Partai Golkar.

Tulisan berita Suara Karya yang tetap berkenaan dengan Rapimnas IV dengan ide sentral Koalisi untuk memenangi Pilpres, terlihat menggunakan politik komunikasi dengan tetap menjadikan Jusuf Kalla sebagai nara sumber, walau tidak sendiri. Jusuf Kalla menanggapi koalisi sebagai berikut, 'Jadi yang paling pokok, disamping searah, setujuan, juga harus yang paling mungkin mengangkat calon presiden'.

Berkenaan dengan koalisi, Jusuf Kalla mengungkapkan beberapa pernyataan; *pertama*, 'Koalisi adalah suatu keharusan karena syarat-syarat pilpres nanti lebih berat. Kedua, apabila menang, koalisi harus meletakkan pemerintahan yang melebihi 50 persen agar nanti dengan DPR baik dan kuat'. *Kedua*, 'Selain itu, masing-masing partai juga harus sepaham dalam tujuan. Masing-masing harus berbicara bagaimana bangsa sejahtera, bagaimana kita menjalankan pemilu yang demokratis'.

Menyingung masalah Konvensi dalam penetapan calon presiden dari Partai Golkar, Jusuf Kalla menungkapkan;

'Golkar sudah setengah mati, tiba-tiba ada orang di tengah jalan naik kendaraan yang sudah setengah mati kita bina. Kita tidak mau lagi begitu'.

Sementara menyikapi kemungkinan kader Partai Golkar dicalonkan partai politik lain, Jusuf Kalla mengungkapkan, 'Tak ada masalah. Silakan saja'. Hal ini berkenaan dengan pencalonan Sultan Hamengkubuwono X oleh partai lain.

Keteguhan Partai Golkar untuk menetapkan Capres setelah Pemilu legislatif 2009, disampaikan oleh Firman Subagyo, selaku Ketua DPP Partai Golkar yaitu, 'Partai Golkar menganggap terlalu pagi berbicara calon presiden sejak sekarang. Kami tidak ingin bicara soal capres sebelum tahu apa hasil pemilu legislatif, karena hal itu sangat menentukan. Kita bisa malu kalau bicara calon presiden terlalu pagi, ternyata kalah di pemilu legislatif'. Dan ungkapan yang menjadi kunci dan penutup berita ini adalah, mempertahankan duet SBY-JK sebagai pilihan yang realistis untuk kepentingan bangsa.

5.2.2.5 Bangunan Berita Suara Karya tentang Calon Presiden dari Partai GOLKAR

Konstruksi berita yang dibangun oleh Suara Karya mengenai isu calon presiden dari Partai Golkar selama Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2009, lebih menekankan pada proses dan tidak terlalu untuk mengungkapkan nama-nama calon presiden. Hal ini dapat dilihat dari judul berita yang tidak menonjolkan tokoh untuk menjadi capres dari Partai Golkar.

Konstruksi yang dilakukan Suara Karya berkenaan dengan isu calon presiden dari Partai Golkar tetap berpedoman pada keputusan organisasi, yaitu penetapan setelah pemilu legislatif. Dari berita yang diturunkan Suara Karya selama Rapimnas IV, isu capres diimbangi dengan agenda lain yang terjadi selama Rapimnas seperti keberhasilan pemerintah, sistem suara terbanyak yang digunakan dalam pemilu legislatif.

Penyebutan nama-nama capres tidak menjadi porsi utama Suara Karya dalam berita-berita yang diturunkan, malahan kemungkinan koalisi maupun mempertahankan duet SBY-JK menjadi cukup mendapat kajian dalam berita Suara Karya.

5.3 Kecenderungan Framing

Konstruksi sosial terhadap realitas tidak lepas dari pemahaman terhadap proses produksi makna yang dilakukan oleh setiap pelaku sosial. Makna yang diproduksi ini sebenarnya mengikuti proses pertukaran yang menjadi karakteristik dari sebuah interaksi sosial. Di dalam proses tersebut suatu realitas yang dikonstruksi juga tidak selalu diterima secara langsung oleh setiap pelaku sosial, namun melalui suatu proses yang dialektis dan berulang-ulang terjadi. Demikian pula setiap pelaku sosial yang terlibat di dalam proses produksi makna dan penginterpretasiannya memiliki pengalaman yang berbeda-beda satu sama lain di dalam memandang realitas yang sama. Perbedaan ini pun terjadi tidak hanya pada setiap pelaku sosial namun juga terjadi pada setiap periode, dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, pada tahap kedua, obyektivikasi, gagasan yang merupakan realitas subyektif pelaku sosial akan disampaikan kepada para pelaku sosial lainnya. Pada tahap ini, kembali sebuah realitas akan mengalami pemaknaan di dalam kesadaran subyektif individu atau pelaku sosial lainnya.

Sebagai sebuah konstruksi sosial, realitas yang terbentuk sebenarnya dapat bersifat subyektif maupun bersifat obyektif. Dikatakan bersifat subyektif jika ia mejemuk, yaitu ditentukan oleh makna, interpretasi, maupun interaksi subyektif individu dengan realitas itu sendiri. Sementara, suatu realitas dapat dikatakan obyektif jika ia bersifat eksternal dan *coersive* yang tidak dapat ditiadakan dengan dugaan-dugaan.

Perbedaan penyikapan ini pula yang mengakibatkan proses dialektika dalam konstruksi realitas oleh setiap pelaku sosial di setiap tahap pembentukan makna—eksternalisasi, obyektivikasi, dan internalisasi—tidak selalu menghasilkan makna yang sama. Dengan kata lain, setiap pelaku sosial dalam memproduksi atau menerima makna suatu realitas ia tidak harus bersikap obyektif atau mengikuti perspektif pelaku sosial lainnya namun dapat pula bersikap subyektif dengan mengikuti perspektif yang ada pada dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini penerimaan maupun penolakan suatu makna pada akhirnya merupakan hasil negosiasi subyektif di antara para pelaku sosial. Pada kondisi

seperti ini pula dikatakan suatu realitas selalu bersifat majemuk, tidak bersifat tunggal, dinamis dan tidak statis, serta dialektis dan tidak final.

Di dalam perspektif konstruksi sosial posisi media massa bersama segenap profesional media yang terlibat di dalamnya menghadapi berbagai tahapan dalam proses konstruksi sosial. Dikatakan demikian, sebab media massa menerima suatu realitas yang terbentuk dari suatu proses eksternalisasi oleh pelaku sosial (nara sumber), melakukan interpretasi, signifikansi maupun pemaknaan ulang terhadap realitas yang diterima dan kemudian pada akhirnya mengkonstruksikan realitas yang akan diinternalisasikan oleh khalayaknya. Di dalam berbagai proses pengkonstruksian ini menunjukkan bahwa isi berita tidak lebih dari suatu realitas subyektif yang dikonstruksi oleh pihak komunikator, didefinisikan dan dikonstruksikan kembali realitas tersebut secara subyektif oleh media massa.

Proses konstruksi sosial atas sebuah realitas penciptaan isi media dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam media itu sendiri (intra media, internal media) maupun faktor yang berasal dari luar media (ekstra media, eksternal media). Kedua faktor tersebut secara simultan bekerja, saling berkontribusi dalam proses produksi pesan.

Menurut Berger dan Luckman (1966) proses dialektik dalam pembentukan makna atau pemahaman terhadap suatu realitas dapat dipisahkan dalam tiga tahapan, yaitu proses eksternalisasi, obyektivikasi, dan internalisasi. Pada tahap awal, proses eksternalisasi, setiap pelaku sosial ketika berinteraksi dengan pelaku sosial lainnya akan menunjukkan gagasan dan pikiran yang mereka miliki. Dalam hal ini, setiap pelaku sosial akan menunjukkan makna subyektif yang mereka anut dalam memandang suatu realitas.

Selanjutnya, pada tahap kedua, obyektivikasi, gagasan yang merupakan realitas subyektif pelaku sosial akan disampaikan kepada para pelaku sosial lainnya. Pada tahap ini, kembali sebuah realitas akan mengalami pemaknaan di dalam kesadaran subyektif individu atau pelaku sosial lainnya.

Sebagai sebuah konstruksi sosial, realitas yang terbentuk sebenarnya dapat bersifat subyektif maupun bersifat obyektif. Dikatakan bersifat subyektif jika ia mejemuk, yaitu ditentukan oleh makna, interpretasi, maupun interaksi subyektif

individu dengan realitas itu sendiri. Sementara, suatu realitas dapat dikatakan obyektif jika ia bersifat eksternal dan *coersive* yang tidak dapat ditiadakan dengan dugaan-dugaan.

Perbedaan penyikapan ini pula yang mengakibatkan proses dialektika dalam konstruksi realitas oleh setiap pelaku sosial di setiap tahap pembentukan makna—eksternalisasi, obyektivikasi, dan internalisasi—tidak selalu menghasilkan makna yang sama. Dengan kata lain, setiap pelaku sosial dalam memproduksi atau menerima makna suatu realitas ia tidak harus bersikap obyektif atau mengikuti perspektif pelaku sosial lainnya namun dapat pula bersikap subyektif dengan mengikuti perspektif yang ada pada dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini penerimaan maupun penolakan suatu makna pada akhirnya merupakan hasil negosiasi subyektif di antara para pelaku sosial. Pada kondisi seperti ini pula dikatakan suatu realitas selalu bersifat majemuk, tidak bersifat tunggal, dinamis dan tidak statis, serta dialektis dan tidak final.

Di dalam perspektif konstruksi sosial posisi media massa bersama segenap profesional media yang terlibat di dalamnya menghadapi berbagai tahapan dalam proses konstruksi sosial. Dikatakan demikian, sebab media massa menerima suatu realitas yang terbentuk dari suatu proses eksternalisasi oleh pelaku sosial (nara sumber), melakukan interpretasi, signifikansi maupun pemaknaan ulang terhadap realitas yang diterima dan kemudian pada akhirnya mengkonstruksikan realitas yang akan diinternalisasikan oleh khalayaknya. Di dalam berbagai proses pengkonstruksian ini menunjukkan bahwa isi berita tidak lebih dari suatu realitas subyektif yang dikonstruksi oleh pihak komunikator, didefinisikan dan dikonstruksikan kembali realitas tersebut secara subyektif oleh media massa.

Proses konstruksi sosial atas sebuah realitas penciptaan isi media dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam media itu sendiri (intra media, internal media) maupun faktor yang berasal dari luar media (ekstra media, eksternal media). Kedua faktor tersebut secara simultan bekerja, saling berkontribusi dalam proses produksi pesan.

Berbicara tentang proses produksi berita oleh redaksi sebuah media pers, Shoemaker dan Reese (1996) mengidentifikasi ada lima faktor yang mereka nilai

sangat memengaruhi proses produksi berita. Pandangan yang tidak jauh berbeda mengenai proses produksi berita dipaparkan oleh Gerbner (1969) yang mengungkapkan bahwa dalam menjalankan perannya, media massa tidak akan lepas dari tekanan kekuatan eksternal seperti tekanan yang berasal dari kliennya yaitu para pengiklan, para pesaing, pihak yang memegang kekuasaan, investor, pemilik media, agen sirkulasi, maupun kekuatan publik yang menekan (*pressure group*) (McQuail, Teori Komunikasi Massa, 1987).

Pertama, peran yang ditampilkan oleh **individu-individu** yang terlibat di dalam proses produksi berita. Dalam hal ini, faktor-faktor yang melekat secara individual seperti latar belakang sosial, ekonomi, ataupun politik para profesional media yang terlibat di dalam proses produksi berita dianggap memberikan kontribusi yang signifikan di dalam proses pengkonstruksian realitas pemberitaan. Freedman & Sears (1965) memaparkan bahwa di dalam diri individu dengan sendirinya akan terjadi rangkaian proses seleksi. Dikatakan, beragam informasi yang datang memberikan daya tarik (*attention*) bagi individu. Pada tahap ini, begitu banyaknya pesan atau informasi yang datang membuat individu dengan sendirinya akan memilih yang menarik baginya (*selective attention*). Selanjutnya, pesan atau informasi yang sudah terpilih tersebut akan diinterpretasikan serta ditransformasikan menjadi sebuah *value* bagi dirinya. Proses demikian tidak akan lepas dari *selective perception* yang dilakukan individu tersebut. Demikian juga di dalam proses pengendapan, proses seleksi juga terjadi saat informasi diendapkan dalam memori individu (*selective retention*). Artinya, penyampaian pesan oleh seorang reporter media, misalnya, tidak terhindar dari distorsi dalam diri si reporter tersebut.

Kedua, faktor *media routine*. Faktor ini berkaitan dengan keseharian dari mekanisme pembentukan berita. Setiap media massa memiliki kebijakan pemberitaan dan pengolahan berita tersendiri yang sudah menjadi ciri khas media tersebut. Kebijakan redaksional tersebut dioperasionalkan di dalam mekanisme kerja redaksional mulai dari proses perencanaan berita, peliputan, penulisan, hingga tahapan akhir dari rangkaian proses produksi berita. Kenyataan juga

menunjukkan mekanisme kerja redaksional ini dibatasi oleh hambatan waktu dan atau ruang (halaman media cetak).

Ketiga, faktor **organisasi media**. Faktor ini berkaitan dengan karakteristik organisasi yang digunakan media massa tersebut. Karakteristik organisasi meliputi komponen kelembagaan organisasi itu sendiri, struktur organisasi, hingga sistem keorganisasian yang diterapkan. Keberadaan komponen kelembagaan lainnya seperti unit sirkulasi dan unit periklanan kerap turut berperan dalam proses pengambilan keputusan redaksional.

Keempat, faktor **ekstra media**, yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan media yang turut memengaruhi proses produksi berita. Berkaitan dengan faktor ini, Shoemaker dan Reese mengidentifikasi tiga aspek yang berpengaruh, yaitu **sumber berita** media massa, **sumber penghasilan** media massa, dan **institusi** lain di luar media, seperti **pemerintah**, **kalangan bisnis**, maupun **dukungan** atau **hambatan teknologi** yang dimiliki media.

Kelima, faktor **ideologi**, yang sering juga diartikan sebagai kerangka referensi yang ada di dalam masing-masing individu dalam melihat suatu realitas dan bagaimana individu-individu tersebut menyikapi realitas tersebut. Melalui faktor ini dapat dilihat kekuatan yang dominan di masyarakat (audiens media yang bersangkutan)—dan juga di media massa—sehingga kekuatan tersebut mampu berperan di dalam penentuan agenda maupun *content* media massa tersebut.

5.3.1 Kecenderungan Kompas

Prinsip analisa framing merupakan sebuah proses seleksi dan penajaman-penajaman terhadap dimensi-dimensi tertentu dari fakta yang akan diberitakan dalam media. Fakta realitas yang ada tidak ditampilkan seperti apa adanya, melainkan dibingkai (*frame*) sehingga pada akhirnya menghasilkan konstruksi makna yang spesifik (Agus Sudibyo, 2001). Dimana sebuah peristiwa atau fakta akan diseleksi oleh media, dimana seleksi tersebut berkenaan dengan penyeleksian sumber berita, pembobotan yang satu diletakkan dari yang lain, dan

mengedepankan suatu perspektif dibanding perspektif lain sehingga terwujud sebuah interpretasi yang lebih diterima dibanding yang lain.

Kompas sebagai sebuah media yang tidak memiliki ikatan dengan Partai Golkar atau independen, melakukan prose framing yang menitik beratkan pada isu-isu nama capres dari Partai Golkar. Kompas mencoba memaparkan sebuah *story line* yang memaparkan bahwa banyak tokoh-tokoh Partai Golkar yang layak menjadi Capres tetapi pada akhirnya terbentur untuk ditetapkan karena menunggu hasil Pemilu Legislatif.

Upaya framing yang dilakukan sebuah media memiliki implikasi signifikan, dimana pengemasan fakta tertentu untuk menggiring pembaca untuk meyakini bahwa capres dari Partai Golkar menjadi penting tetapi partai ini tidak punya keinginan menyebutkan capresnya seperti partai-partai lain, bahkan dikesankan bahwa Partai Golkar masih memelihara kemungkinan untuk mempertahankan duet SBY-JK, disamping kemungkinan membentuk koalisi lain.

Kekurangan yang mungkin ditemukan sepanjang pemberitaan Kompas terkait dengan Rapimnas IV dan isu calon presiden adalah tidak meminta komentar atau pendapat pihak di luar seperti pakar, pengamat politik atau masyarakat.

Akan menjadi menarik apabila Kompas lebih membuka peta pertarungan antar faksi di internal Partai Golkar. Ini yang diterasa kurang di eksplor oleh Kompas. Disinilah yang menjadi pertanyaan Kompas sebagai koran independen terkesan memasukan nilai subjektivitas tertentu. Atau memang dari awal media menangkap kekukuhan sikap Partai Golkar yang tetap akan memutuskan nama capres setelah pemilu legislatif 2009.

5.3.2 Kecenderungan Suara Karya

Sebagaimana layaknya sebuah media yang memiliki hubungan dengan Partai Politik tentu agenda setting beritanya pun tak bisa lepas dari kepentingan partai bersangkutan. Dalam konteks Rapimnas IV Partai Golkar, Suara Karya

lebih berupaya memfokuskan pada agenda dan proses yang terjadi dalam Rapimnas IV dibanding melakukan kajian lebih jauh seputar isu calon presiden dari Partai Golkar yang menjadi agenda dari daerah.

Proses framing yang dilakukan Suara Karya adalah lebih mengedepankan agenda yang dirancang oleh DPP Partai Golkar selaku pelaksana Rapimnas IV dan tidak mengedepan perspektif DPD Provinsi yang ingin penyebutan dan penetapan nama capres dari Partai Golkar. Untuk meyakinkan pembaca, Suara Karya memuat kegiatan-kegiatan Rapimnas lain diluar pembahasan isu calon presiden.

Pada isu calon presiden, suara karya lebih menekankan pada bahwa Partai Golkar tidak akan melakukan konvensi, dengan mengedepankan kerugian dan ketakutan adanya 'penumpang gelap' setelah kader yang ada lelah bekerja. Disamping itu kecenderungan Suara Karya juga mencoba melihat kemungkinan dipertahankannya duet SBY-JK, untuk meyakinkan pembaca disajikan nilai lebih keberhasilan duet tersebut.

Dalam merekonstruksi calon presiden dari Partai Golkar, Suara Karya hanya menjadikan Ketua Umum sebagai nara sumber, dan terkesan Suara Karya mengamankan kebijakan Partai. Disini tidak ada keberanian Suara Karya menungkapkan hasil survei serta peta capres internal.

Selanjutnya, Suara Karya juga mengungkapkan kegagalan Konvensi sebagai sebuah proses demokrasi internal melalui pernyataan Ketua Umum, bukan melalui sebuah fakta, seperti sejauh mana dinamika Partai Golkar saat Konvensi.

Kecenderungan menjaga kebijakan Partai, Suara Karya kurang berani mencari komentar atau pendapat dari tokoh faksi lain di Partai Golkar selain faksi Ketua Umum, juga termasuk tokoh diluar Partai Golkar seperti pengamat politik, pakar atau masyarakat.

Konstruksi yang dibangun oleh Suara Karya, dapat dimaklumi karena keterkaitan Suara Karya dengan Partai Golkar dalam masalah modal. Disamping itu Komisaris dan Pimpinan Redaksi Suara Karya merupakan pengurus DPP Partai Golkar.

BAB 6 DISKUSI

6.1 Framing dan Ideologi Media

Dari hasil framing Kompas dan Suara Karya mengenai isu calon presiden dari Partai Golkar selama berlangsungnya Rapimnas IV Partai Golkar, ditemukan beberapa hal yang cukup kontras antara kedua media peliput dalam merekonstruksi beritanya.

Dalam hal ini, Kompas memilih memunculkan nama-nama calon presiden dari Partai Golkar sebagai fokus pemberitaan selama Rapimnas IV. Sementara Suara Karya, memfokuskan agenda Rapimnas yang telah disusun Panitia Pengarah (DPP Partai Golkar). Hal ini dilakukan secara sadar oleh kedua media seperti yang disampaikan Eriyanto (2007), media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil.

Pemilihan ide sentral sebagai dasar merekonstruksi berita yang dilakukan Kompas dan Suara Karya berangkat dari perspektif yang sangat berbeda. Kompas memandang agenda calon presiden menjadi penting. Sementara Suara Karya melihat konsolidasi organisasi menjadi kunci untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009.

Sudut pandang Kompas dan Suara Karya dalam memberitakan Partai Golkar terutama kegiatan Rapimnas IV tahun 2008 tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang melingkupinya, termasuk di dalamnya ideologi. Karena ideologi akan memberikan warna, pesan dan nilai-nilai budaya, moral, ekonomi, politik yang berwujud dalam teks (Budianto, 1996: 194-195). Di samping ideologi, Kompas juga menyesuaikan diri dengan sasaran pembacanya di kelas menengah ke atas.

Kompas juga tidak bisa lepas dari sosok Jakob Oetama selaku pendiri yang merupakan orang Jawa. Maka dalam penyampaian pesan dan penulisan pesan Kompas tidak bisa lepas dari nilai-nilai tersebut. Pada konteks isu calon

Presiden dari Partai Golkar, Kompas menampilkan kritik atau sumbang saran dengan gaya Jawa walau tetap mencoba melawan arus agenda Rapimnas IV dengan memunculkan nama-nama calon Presiden dari Partai Golkar.

Konstruksi yang dibangun tersebut merupakan agenda publik yang menunggu kepastian Partai Golkar dalam menetapkan calon presidennya. Berita yang dimuat tersebut merupakan kritik bagi Partai Golkar yang terkesan tidak menanggapi perkembangan di internal maupun eksternal Partai. Kritik yang dilakukan Kompas tersebut tetap berpegang pada gaya Jawa. Ini dapat dilihat dari pemunculan nama-nama calon yang didasarkan pada survei dan pendapat DPD-DPD Provinsi. Gaya Jawa ini seperti diungkapkan Nasir (2007: 188).

Ideologi menjadi nilai dan kepercayaan yang turut serta membangun dan menentukan tujuan, tata kerja dan tentu saja isi media, dalam hal ini Kompas melakukan penyampaian kritik akan status quo Golkar berkenaan dengan calon presiden tetapi dengan tetap terkesan tidak memaksakan agenda. Hal ini terlihat dari berita terakhir Kompas tentang Rapimnas yang terkesan mengembalikan isu calon presiden pada keputusan organisasi. Maka dapat dilihat, bahwa Kompas mengambil jalan tengah dalam mengangkat isu calon presiden dari Partai Golkar.

Strategi pembahasan tersebut dilakukan oleh Kompas, dalam rangka tidak ingin menghitam-putihkan partai politik tertentu dalam hal ini Partai Golkar, tetapi ingin menempatkan permasalahan tersebut sebagai sebuah proses untuk berubah dan terkait dengan kepentingan masyarakat dalam demokrasi terutama berkaitan dengan calon pimpinan mereka. Sehingga pola pikir linier sangat dihindari.

Sementara itu Suara Karya sebagai sebuah surat kabar yang memiliki hubungan historis dan emosional dengan Partai Golkar, melihat Rapimnas IV Partai Golkar sebagai sebuah kerja Konsolidasi dan Koordinasi Organisasi (Partai Golkar) untuk memenangkan Pemilu legislatif 2009.

Perspektif Suara Karya dalam melihat hal tersebut dapat dipahami, karena hubungan yang terbangun menjadikan Suara Karya memiliki Ideologi

sebangun dengan Partai Golkar yaitu, 'Karya Kekaryaan'. Ideologi tersebut secara langsung mengkonstruksi berita Suara Karya untuk mengamankan kebijakan Partai Golkar berlandaskan kepentingan bangsa dan negara terutama mensukseskan pemerintahan ini sampai selesai dan aman, serta membentuk pemerintahan yang kuat.

Pengaruh tersebut dapat terlihat dari pemilihan aktor yang didominasi Jusuf Kalla serta internal Partai Golkar. Sehingga bias pemberitaan bisa dihindari. Di samping itu ketergantungan modal Suara Karya pada Partai Golkar juga menjadikan cara pandang dan upaya konstruksi berita tidak bisa lepas dari kepentingan Partai Golkar.

Kondisi tersebut juga diperkuat dengan keterlibatan personel pengurus DPP Partai Golkar dalam Suara Karya, seperti Sumarsono, Sekjen DPP Partai Golkar sebagai salah satu komisaris dan Ricky Rachmadi yang juga salah satu pengurus DPP Partai Golkar sebagai redaksi di Suara Karya. Maka kontrol berita akan dengan mudah dilakukan oleh DPP Partai Golkar.

Menjaga kesolidan demi mencapai kemenangan pada pemilu 2009 atau memuluskan jalan keberlangsungan duet pemerintahan saat itu juga menjadi faktor lain yang membuat Suara Karya tidak ingin lebih jauh mengupas calon presiden dari Partai Golkar, apalagi jika sampai membuka persaingan internal antar faksi, seperti faksi Kalla, faksi Akbar, faksi Paloh atau faksi Ical (Aburizal Bakrie).

Tabel 2. Perbandingan Framing Kompas dan Suara Karya Tentang Isu Calon Presiden dari Partai Golkar

Unsur Framing	Kompas	Suara Karya
Core Frame	Core frame – core frame yang ada dalam berita-berita Kompas secara umum menitik beratkan pada pemunculan nama-nama calon presiden dari Partai Golkar.	Core frame-core frame yang ada dalam berita-berita yang diturunkan Suara Karya secara umum menegaskan penetapan nama-nama calon presiden dari Partai Golkar ditetapkan setelah Pemilu

		Legislatif 2009.
Konstruksi	Konstruksi yang dilakukan Kompas dalam pemberitaan Rapimnas IV Partai Golkar, lebih memunculkan nama-nama calon presiden dari awal hingga akhir pelaksanaan Rapimnas. Mengedepankan nama-nama calon dibanding agenda rapimnas yang lain, ini dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan interpretasi bahwa di Partai Golkar banyak tokoh yang dimungkinkan untuk menjadi pimpinan bangsa.	Konstruksi berita yang berkaitan dengan calon presiden dibuat oleh Suara Karya tetap berpatokan pada Kebijakan internal Partai Golkar, untuk merubah fokus berita maka dimuat dan disampaikan agenda-agenda Rapimnas lainnya seperti sistem suara terbanyak, keberhasilan pemerintah. Bahkan terkesan keinginan mempertahankan duet SBY-JK

6.2 Politik Komunikasi Media

Keberadaan media tidak bisa melepaskan dirinya dari lingkungan sekitarnya, baik sosial, politik, ekonomi dan teknologi. Lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya tersebut akan menjadi suatu faktor dalam merekonstruksi

Selanjutnya Kompas melakukan pemilihan nara sumber berita yang beragam dalam memperkuat ide sentralnya. Kompas membuka semua perspektif mengenai calon presiden yang ada dalam Partai Golkar, mulai dari hasil survei pendapat fungsionaris pusat hingga pendapat DPD-DPD Provinsi.

Pemilihan aktor sebagai nara sumber, sejalan dengan apa yang diungkapkan Chaffee bahwa "*Who gets to say what to whom?*" (siapa yang memperoleh hak untuk berkata apa pada siapa). Sebagai contoh, untuk berbicara mengenai hasil survei, maka dipilih Rully Chairul Azwar untuk mengungkapkan hasil survei calon presiden dan wakil presiden, Rully dipilih dalam kapasitas sebagai Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu yang memang bertanggungjawab terhadap survei- survei pemilu dan pilkada di Partai Golkar.

Dan dari Rully diharapkan dapat muncul nama-nama nara sumber lain, demikian pula nama-nama calon presiden potensial dari partai tersebut.

Sementara itu Suara Karya melakukan pemilihan terhadap nara sumber yang lebih didominasi pengamanan terhadap kebijakan partai, ini terlihat dari dominasi Jusuf Kalla sebagai nara sumber, serta internal Partai Golkar yang fokus pada agenda Rapimnas yang telah disusun DPP Partai Golkar. Pemilihan nara sumber dan bahasa yang dipilih ditujukan agar pembaca/khalayak menginterpretasikan bahwa calon presiden Partai Golkar memang harus ditetapkan setelah Pemilu legislative 2009. Pemilihan secara sadar ini sejalan yang diungkapkan Eriyanto (2007) bahwa media juga memilih (secara sadar atau tidak) aktor yang dijadikan sumber berita sehingga hanya sebagian saja dari sumber berita yang tampil dalam pemberitaan. Selain itu lewat bahasa yang dipilih, media juga berperan mendefinisikan aktor dan peristiwa. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel 3.

Dalam merekonstruksi berita Suara Karya sangat terkesan memberikan hak bicara hanya pada Ketua Umum partai Golkar. Hal ini bisa dimengerti bahwa politik komunikasi media massa tidak bisa lepas dari kekuasaan, dan dalam hal ini kekuasaan yang melingkupi antara Suara Karya dan Partai Golkar adalah sebangun.

Sementara Kompas terasa bebas memilih nara sumber, dari perspektif manapun walau dalam penyampaiannya menggunakan gaya Jawa. Di sini Kompas terlihat ingin membongkar semua kemungkinan calon presiden dari Partai Golkar dan setiap kelompok kepentingan memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan komentarnya.

Persamaan Kompas dan Suara Karya dalam perspektif politik komunikasi mengenai berita seputar Rapimnas IV adalah memiliki sasaran yang sama, yaitu *stakeholder* Partai Golkar. Tetapi, pembaca kedua media tersebut akan menginterpretasikan hal yang berbeda tentang Rapimnas IV dan isu calon presiden dari Partai Golkar, karena berita yang ditulis direkonstruksi secara

berbeda, terutama dalam melakukan framing serta ideologi yang melingkupi kedua media tersebut.

Tabel 3. Analisis Politik Komunikasi Kompas dan Suara Karya Tentang Isu Calon Presiden dari Partai GOLKAR

Unsur	Kompas	Suara Karya
Nara Sumber	<p>Kompas dari seluruh berita yang berkenaan dengan Rapimnas sangat beragam menggunakan nara sumber. Jusuf Kalla hanya dua kali dijadikan rujukan pemberitaan. Sementara yang lain sangat beragam sesuai kepentingan berita, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Golkar; Rully Chairul Azwar, Andi Mattalatta, Yorris Raweyai, Zaenal Binrtang dan DPD-DPD Provinsi serta Meutia Hafidz 2. Eksternal Golkar; SBY, Taufik Kiemas, Bondan Nusantara, Rustam Fathoni. 	<p>Dari empat berita yang dimuat Suara Karya, setengahnya menjadikan Jusuf Kalla (Ketua Umum DPP Partai Golkar) sebagai nara sumber. Adapun nara sumber lain: Andi Mattalatta, Yorris Raweyai, SBY dan Firman Subagyo.</p>
Komentar	<p>Sultan Hamengkubuwono X merupakan capres terkuat dari internal Partai Golkar. Tetapi, pernyataan tersebut juga menyebutkan elektabilitas Sultan mulai menurun dan dikalahkan Prabowo Subianto, yang tidak lagi menjadi kader Partai Golkar. – Rully C A</p> <p>‘Selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Golkar atas kebersamaan dan dukungannya’.—SBY</p>	<p>‘Namun, jika ada peserta yang ingin mengiring rapimnas untuk membicarakan soal capres Partai Golkar, itu tidak masalah. Tapi yang pasti, filosofi Partai Golkar adalah rakyat yang mencari pemimpin, bukan pemimpin yang cari-cari rakyat’—Andi Mattalatta</p> <p>‘Kinerja pemerintah di semua sektor terbaik dibanding masa sebelumnya. Ekonomi tumbuh’. – Jusuf Kalla</p>

	<p>'Orang partai juga setuju supaya say <i>approach</i> dengan Golkar'. — Taufik Kiemas</p> <p>"Akbar kuda hitam, Akbar — Kalla akan bertarung kembali."—Zaenal Bintang</p> <p>"Kita harus jujur, kepentingan partai atau pribadi. Partai yang didukung orang atau orang gunakan partai".—Jubir DPD Lampung</p> <p>'Kalau mau sebut nama silakan saja. Tetapi Partai Golkar belum akan menetapkan nama itu. Tunggu waktunya saja'.—Jusuf Kalla</p>	<p>"Meski mempersilahkan sejumlah kader menjajakan nama capres dan cawapres, Jusuf Kalla menegaskan Partai Golkar tidak akan menetapkan sosok capres-cawapres sebelum pemilu legislatif".—Jusuf Kalla</p> <p>'Partai Golkar menganggap terlalu pagi berbicara calon presiden sejak sekarang. Kami tidak ingin bicara soal capres sebelum tahu apa hasil pemilu legislatif, karena hal itu sangat menentukan'.—Firman S.</p>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Partai Golkar: Pengurus DPP (faksi-faksi), DPD Provinsi dan Kab/Kota, Kader, simpatisan. 2. Partai-partai politik lain yang menunggu kebijakan politik Partai Golkar baik untuk membangun koalisi maupun pesaing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Partai Golkar: Pengurus DPP (faksi-faksi), DPD Provinsi dan Kab/Kota, Kader, simpatisan. 2. Partai-partai politik lain yang menunggu kebijakan politik Partai Golkar baik untuk membangun koalisi maupun pesaing.

Konstruksi berita yang dilakukan oleh Media Kompas dan Suara Karya, juga dipengaruhi oleh kekuatan di sekitarnya, seperti yang digambarkan oleh McQuail, dimana media berada ditengah-ditengah tiga kekuatan penarik dan pendorong yang saling *over-lap*, yaitu ekonomi, politik dan teknologi.

Kompas yang saat ini berada pada era industrialisasi media telah mengarah ke kapilatis sebagai akibat liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan berdirinya Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yang membawahi puluhan terbitan dan usaha. Posisi yang menempatkan Kompas seperti saat ini juga memberikan pengaruh pada pemberitaan partai politik. Kompas tidak memiliki

ketergantungan modal pada pihak lain sehingga pertimbangan pemberitaan Kompas tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan modal dari pihak ketiga. Sehingga akuntabilitas Kompas terhadap kepentingan khalayak dapat terjaga.

Akuntabilitas antara Kompas dengan kekuatan sosial dapat terlihat juga pada pemberitaan Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008 yang berkenaan dengan isu calon presiden, Kompas mampu lepas dari kelompok kepentingan dan penekan yang bertarung dalam Rapimnas IV Partai Golkar. Ini terlihat dari pemilihan sumber berita yang beragam dan agenda yang diusung Kompas dalam Rapimnas IV.

Disisi lain, Kompas juga mampu menjadi *gatekeeper* yang baik dalam komunikasi politik berkaitan dengan Rapimnas IV. Kompas dengan sangat baik menempatkan agenda civil society berkenaan isu calon presiden ke pasar (pembaca) dengan memunculkan alternatif nama-nama calon presiden dari Partai Golkar.

Pada posisi lain Kompas juga telah memainkan peran sebagai penyedia sebuah landasan untuk wacana politik publik yang memfasilitasi pembentukan opini publik dan mengembalikannya kembali ke publik. Sehingga fungsi Kompas sebagai ruang publik telah dijalankan, ini dapat terlihat dari alur berita yang diturunkan dari awal hingga akhir Rapimnas IV, dimana beritanya dibangun secara presisi untuk memberitahukan khalayak atas informasi penting mengenai calon presiden. Dimana Kompas, menyampaikan bahwa banyak tokoh dan negarawan dari Partai Golkar yang layak diperhitungkan sebagai calon presiden.

Kondisi yang melingkupi Kompas dan lingkungannya juga terjadi pada Suara Karya, yaitu lingkungan sekitarnya termasuk tiga kekuatan penarik dan pendorong. Sebagai surat kabar partisan dari Partai Golkar, dengan sendirinya menempatkan Suara Karya pada dua sisi yang berbeda, yaitu publik dan partai.

Ketergantungan modal dan keterlibatan fungsionaris partai dalam Suara Karya, berpengaruh dalam berita-berita yang diturunkan oleh Suara Karya. Dimana semaksimal mungkin berita yang diturunkan tidak memberikan efek

negatif bagi kepentingan Partai Golkar, atau dengan kata lain menjadi corong bagi partai. Ini dapat kita temukan pada pemberitaan seputar Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008, dimana Suara Karya lebih cenderung mengangkat agenda konsolidasi dan kordinasi partai dibandingkan agenda calon presiden dari Partai Golkar. Hal ini bisa dipahami karena Partai Golkar lebih memusatkan kekuatan untuk pemenangan pemilu legislatif 2009, walau desakan internal dan eksternal partai mengenai calon presiden sangat kuat.

Agenda yang diangkat Suara Karya dalam memberitakan Rapimnas IV Partai Golkar tahun 2008, lebih cenderung mewakili kepentingan pemilik. Hal ini dapat kita lihat dari monotonnya nara sumber yang lebih didominasi Jusuf Kalla, termasuk pengabaian adanya faksi-faksi di dalam Partai Golkar sendiri. Kondisi ini menjadikan khalayak mendapatkan informasi sepihak mengenai Rapimnas IV Partai Golkar. Sehingga bisa dipastikan untuk konteks pemberitaan Rapimnas IV tujuan komunikasi yang dibangun berorientasi kepentingan organisasi, baik Suara Karya sebagai organisasi maupun Partai Golkar.

Dalam konsep modern tentang berita, Suara Karya terasa gagal memainkan peran dalam memfasilitasi diskusi publik terkait isu calon presiden. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan ke khalayak lebih di dominasi pemberian informasi dari satu sisi, yaitu sisi DPP Partai Golkar. Dimana berita yang dibangun, menekankan bahwa perekrutan dan penetapan calon presiden setelah pemilu legislatif 2009.

Konstruksi berita yang dikembangkan Suara Karya selama Rapimnas IV, terasa kurang mengembangkan 'situasi berbicara yang ideal' menurut Habermas. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kegagalan Suara Karya mengembangkan hal - hal pokok. Pertama, kebebasan berbicara. Dimana berita yang dibangun Suara Karya, memperkecil kesempatan perbedaan pandangan dengan DPP Partai Golkar. Disamping itu juga terkesan adanya pembatasan topik bahasan.

Kedua, pemilihan narasumber yang dilakukan Suara Karya dengan sendirinya tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok

kepentingan yang terlibat untuk menyuarakan pandangannya. Maka dengan sendirinya publik tidak bisa menjadikan Suara Karya sebagai sebuah landasan diskusi publik karena informasi yang disampaikan sangat terbatas kepada kepentingan organisasi (Partai Golkar).



BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan terhadap Kompas dan Suara Karya, tentang Konstruksi Realitas Calon Presiden dari Partai GOLKAR, dalam pemberitaan seputra Rapimnas IV Partai GOLKAR tahun 2008, telah membuktikan beberapa hal:

1. Isi media bukan hanya sebuah fakta atau peristiwa yang diceritakan apa adanya melainkan melewati proses seleksi untuk menjadi sebuah interpretasi baru akan fakta tersebut. Interpretasi tersebut selanjutnya ditujukan untuk membenarkan apa yang diinginkan media atas fakta dan peristiwa yang terjadi. Dan dalam hal ini media memiliki peranan penting dalam membangun realitas yang ada, baik realitas objektif maupun subjektif. Dan sosialisasi adalah peran yang dimainkan. Selanjutnya apa yang dilakukan Kompas dan Suara Karya dalam memotret realitas menghadirkan dua perspektif yang berbeda yang berkembang sekitar isu calon presiden dari Partai Golkar.
2. Kompas sebagai media tidak selalu bisa atau harus dipandang bebas dan netral, setidaknya Kompas mencoba menghadirkan perspektif yang berkembang di sekitar Partai Golkar, dimana hampir seluruh partai politik telah mengukung capres tetapi Partai Golkar masih menunggu hasil Pemilu Legislatif. Disini Kompas lebih mengedepankan bahwa banyak yang berkepentingan dengan Capres dari Partai Golkar termasuk tokoh-tokoh Golkar sendiri serta proses yang dilakukan untuk menghasilkan capres Partai Golkar itu sendiri. Untuk itu Kompas menampilkan secara lebih bervariasi nama-nama potensial sebagai Calon Presiden yang dapat diusung oleh Partai Golkar.
3. Suara Karya, sebagai media yang memiliki hubungan dengan Partai Golkar tentu tidak bisa lepas dari hal tersebut. Isu Capres memang menjadi sorotan tetapi dari persepektif yang berbeda dengan Kompas. Dimana Capres dilihat

sebagai sebuah proses yang harus diletakan pada aturan organisasi, sehingga nama-nama tokoh Golkar yang sejalan dengan konsolidasi partai mendapatkan porsi yang banyak. Suara Karya, lebih mengedepankan kemungkinan dipertahankannya duet SBY-JK karena dianggap berhasil membuat kondisi Indonesia lebih baik saat ini. Selanjutnya juga, Suara Karya mengintepretasikan sebuah proses konvensi yang pernah dilakukan Golkar akan melahirkan sebuah kerugian bagi Partai Golkar sendiri.

7.2 Rekomendasi

Penelitian seputar konstruksi realitas politik terutama berkaitan dengan partai politik perlu kiranya menambah aspek lain selain kandidat calon presiden serta dikaitkan dengan citra yang dibangun oleh media terhadap partai politik tersebut; termasuk di dalamnya penggunaan perspektif dari teori dan alat analisa lain yang baru untuk memperoleh kedalaman dari sebuah penelitian dari sudut pandang yang lain dari fenomena yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial, 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta, Indeks.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik di Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Berger, PeterL., & Thomas Luckmann. 1996. *The Social Construction of Reality*. New York
- Berger, Charles R., and Steven H. Chaffee, 1987. *Handbook of Communication Science*, Newbury Park: Sage Publication.
- Dhani, Rendro. 2004. *Centang Perenang Manajemen Komunikasi Kepresidenan dari Soekarno sampai Megawati*. Jakarta, LP3ES.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (eds). 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 3rd edition. SAGE Publications. London
- Entman, Robert M., 1993. Framing: *Toward clarification of a Factured Paradigm*, dalam dalam *Jurnal of Comunication*, Autumn.
- Eriyanto, 2001. *Analisa Teks: Pengantar Analisa Teks Medi.*, Yogyakarta, LkiS.
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. 2007. *Analisa Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: LKIS.
- Gazali, Effendi. (2004). *Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability*. NijmegenL Radboud University Pres.
- Graber, Doris A. 1984. *Media Power in Politics*. University of Illinois at Chicago; Congressional Quarterly Inc.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Hidayat, Deddy, N. 2002. *Paradigma dalam Ilmu-ilmu Sosial Dan Metodologi Penelitian*, Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI, Jakarta

- Johnson Cartee, Karen S; Copeland, Gary A. 2004. *Strategic Political Communication – Rethinking Social Influence, Persuasion, and Propaganda*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc, Maryland, USA.
- Kaid, Lynda Lee. 2004. *Handbook of Political Communication Research: Dedicated for Keith R Sanders and Dan Nimmo & Steve Chaffee*. Lawrence Erlbaum Associates, Publisher, LEA, London.
- Krippendorf, Klaus. 1987. "On the Ethics of Constructing Communication." Dalam Brenda Dervin, Barbara J.O'Keefe and Ellen Wartella (ed.). *Rethinking Communication*. Newbury Park: Sage Publication.
- Littlejohn, Stephen W, 2002. *Theories of Human Communication*. Edisi 7. Belmont, California: Wardworth Publishing Company.
- Lull, James. 1997. *Media, Komunikasi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- McNair, Brian.1995. *An Introduction to Political Communication*, Routledge, London
- McQuail, D. & Windahl, Sven. 1996. *Communication Models*. London and New York: Longman.
- McQuail, Dennis, 2000. *Mass Communication Theory*, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publication.
- McQuail, Dennis. 2005. *Mass Communication Theory: An Introduction*. Fifth Edition. London: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung, Rosdakarya
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication*, Sage, London.
- Nasir, Zulhasril, 2007. *Kuasa dan Harta Keluarga Cendana*. Jakarta: Depok, Fisip UI Press.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*; Judul Asli; Political Communication and Public Opinion in America; Penerbit Good Year Publishing Co. Pengantar: Jalaluddin Rakhmat; Penerbit PT Rosdakarya, Bandung, Cetakan Kedua

- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan dan Media*; Judul Asli; *Political Communication and Public Opinion in America*; Penerbit Good Year Publishing Co. Dan Nimmo; Pengantar: Jalaluddin Rakhmat; Penerbit PT.Rosdakarya, Bandung, Cetakan Keenam.
- O'Shaugnessy, Michael; Stadler, Jane. 2005. *Media and Society; an Introduction*. Oxford University Press; London, Third Edition.
- Pawito, 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta, LKiS.
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta, Graha Ilmu.
- Rivers, William L., Jensen, Jay W., Peterson, Theodore. 2008. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta, Kencana.
- Scheufele, Dietram A. 1999. *Framing as Theory of Media Effect*. Makalah. International Communication Assosiation.
- Shoemaker, Pamela J. Dan Stephen D. 1996. Reese, *Mediating The Message, Theories of influence on Mass Media Content*, edisi ke-2, Ney York: Longman Publishers.
- Sobur, Alex, 2006. *Analisis teks Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex, 2006. *Semiotika Komunikasi*, Remaja Rosdakarya.
- Straubhaar, Joseph dan La Rose, Robert. 2006. *Media Now, Understanding Media Culture, and Technology*, Thompson Wadsworth, Belmont USA,
- Sudibyo, Agus, Ibnu Hamad & Muhammad Qodari, 2001. *Kabar-kabar kebencian; Prasangka Agama di Media Massa*, Jakarta.
- Sudibyo, Agus, 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS.
- Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta, ISAI-LKiS.
- Suseno, Franz Magnis. 1992. *Filosafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta, Kanisius.
- Suwardi, Harsono, et.all. 2002. *Politik, Demorasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta, Galang Press.

Tesis/Disertasi/Jurnal

- Chaffee, Steven. 2001. *Studying The New Communication of Politics*. Political Communication, 18:237–244.
- C Mutz, Diana. *The Future of Political Communication Research: Reflection on the Occasion of Steve Chaffee's Retirement from Stanford University*
- Dahlan, M. Alwi. 1989. *Perkembangan Komunikasi Politik sebagai Bidang Kajian*. Jakarta. AIPI
- Farida, Ade Rina. 2004. *Konstruksi Realitas Islam Liberal Dalam Media Cetak: Analisa Framing Najalah Gatra dan Sabili*. Tesis, Fisip UI.
- Rusmulyadi. 2008. *Konstruksi Media Islam Indonesia Tentang Kasus Nuklir Iran: Analisa Framing Terhadap Majalah Sabili dan Adil di Seputar Kasus Nuklir Iran*. Tesis, Fisip UI.

Makalah

- Gazali, Effendi. 2005. *Processing Persuasive Communication*. Bahan Kuliah, Komunikasi Politik UI
- Harsono, Suwardi. 2006. *Media dan Government Relation*. Bahan Kuliah. Komunikasi Politik - Pasca Sarjana UI
- Hidayat, Dedy N. 2005. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Materi Penunjang Kuliah. Universitas Indonesia.
- Panuju, Redi. 2003. *Framing Analysis*. Makalah. Surabaya: Universitas dr. Sotomo.
- Utomo, Mochtar W. 2003. *Perbandingan Content Analysis, Framing Analysis, Discourse Analysis, dan |Semiotic Analysis*. Makalah. Surabaya: Universitas dr. Sotomo.

Surat Kabar/Majalah

- Kompas, edisi 16 Oktober 2008.
- Kompas, edisi 18 Oktober 2008.

Kompas, edisi 19 Oktober 2008.

Kompas, edisi 20 Oktober 2008.

Suara Karya, edisi 16 Oktober 2008

Suara Karya, edisi 18 Oktober 2008

Suara Karya, edisi 20 Oktober 2008

Suara Karya, edisi 21 Oktober 2008

Website

Anonimous. 2004. *Methods for Media Analysis*. www.lboro.com

www.kompas.com

www.suarakartya.com

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : KOMPAS,

Hari/Tgl : KAMIS, 16 OKTOBER 2008

Sultan Masih Unggul di Golkar

Rapimnas IV Tak Agendakan Pengusulan Capres

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei terus mencermati tingkat popularitas para calon presiden. Dari berbagai hasil survei, hingga saat ini posisi Sultan Hamengku Buwono X masih lebih unggul dibandingkan dengan kader Partai Golkar lain, termasuk Ketua Umum Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Rully Chairul Azwar membenarkan fakta itu ketika ditanya pers, Rabu (15/10), sesuai menggelar konferensi pers soal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV yang akan berlangsung 17-19 Oktober 2008. "Ini masih dinamika," ujarnya.

Menurut Rully, dari survei yang ada, Sultan juga sudah dikalahkan Prabowo Subianto. Namun, Prabowo sudah tidak bisa disebut kader Partai Golkar karena sudah mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Untuk posisi calon wakil presiden, menurut Rully, dari berbagai survei yang ada, Jusuf Kalla masih berada di posisi tertinggi.

Dalam Rapimnas IV nanti, Panitia Pengarah tak mengagendakan daerah-daerah untuk mengusulkan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, menurut Rully, tidak

mustahil momentum rapimnas dimanfaatkan daerah untuk memunculkan nama-nama capres.

Agenda rapimnas

Ada empat agenda pokok yang akan dibicarakan di dalam rapimnas. Menurut Ketua Panitia Pengarah Andi Mattalatta, materi itu meliputi soal organisasi, kemenangan pemilu, pernyataan politik, dan pemberian penghargaan pada tokoh-tokoh berjasa.

Soal kemenangan pemilu terkait penentuan calon anggota legislatif, Partai Golkar menetapkan sistem berdasarkan suara terbanyak. Dalam rapimnas ini akan dibahas soal kode etik untuk mencegah persaingan tidak sehat antarcaleg dalam internal partai.

Terkait pernyataan politik, Partai Golkar akan merespons kondisi sosial, politik, ekonomi, keamanan, baik nasional maupun internasional, serta mencoba menawarkan solusi.

Pengusulan capres tak diagendakan dalam Rapimnas IV. Menurut Ketua Panitia Rapimnas Yorris Raweyai, dalam Rapimnas III sudah diputuskan hal itu akan dibahas setelah pemilu legislatif.

Didukung

Berbagai elemen dari masyarakat DI Yogyakarta akan menggelar *pisowanan ageng* pada 28 Oktober. Mereka akan menyampaikan dukungan supaya Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2009.

Menurut Koordinator Seniman Yogyakarta Bondan Nusantara, 18 kelompok masyarakat telah memperoleh izin dari Sultan terkait penyelenggaraan *pisowanan ageng*. Sultan meminta waktu 14 hari untuk kontemplasi. Keputusan Sultan terkait pencalonan presiden akan disampaikan saat *pisowanan ageng*, ujar Bondan, Rabu.

Sejumlah elemen masyarakat ini merasa lega dengan sinyal positif yang diberikan Sultan atas rencana pencalonannya sebagai capres. "Sultan memang sudah memberikan lampu hijau atas permohonan kami agar beliau maju ke kancah nasional," kata Rustam Fathoni, Sekretaris Apdesi. (ENY/WKM/SUT)

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : KOMPAS,

Hari/Tgl : SABTU, 18 OKTOBER 2008

RAPIMNAS

Presiden Berharap Golkar Arif pada Waktunya

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun wacana koalisi partai politik sudah muncul menjelang Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, berharap Partai Golkar akan arif menentukan koalisi pada waktunya.

Hal itu dikemukakan Presiden Yudhoyono saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ke-IV dan peringatan ke-44 ulang tahun Partai Golkar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Jumat (17/10) malam.

Selain Wakil Presiden, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Muhammad Jusuf Kalla, hadir pula sejumlah menteri kabinet yang juga pengurus Partai Golkar, sejumlah sesepuh Partai Golkar, antara lain mantan Presiden RI BJ Habibie dan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung, serta ribuan kader dan pengurus Partai Golkar seluruh Indonesia.

"Sekarang ini sudah mulai diwacanakan dan digulirkan koalisi dan *partnership*, satu partai dengan partai yang lain. Baik menuju Pemilu 2009 maupun pasca-Pemilu 2009. Dengan segala

kerendahan hati, saya berpendapat, Golkar sebagai partai besar tentu memiliki pandangan, posisi, dan kearifan untuk saatnya nanti menentukan sikap dan pilihan politiknya berkaitan dengan koalisi dan kebersamaan itu," ujar Presiden.

Presiden menambahkan, semua pihak berharap posisi dan pilihan Partai Golkar untuk menentukan koalisi. Sebab, koalisi parpol diyakini memiliki tujuan dan niat yang baik bagi kehidupan bangsa.

Menurut Presiden, pernyataannya itu bukan sebuah catatan kaki maupun catatan pinggir, tetapi sebuah catatan politik. Presiden juga tak menyebutkan partai lain yang akan berkoalisi, dengan Partai Golkar.

Dalam kesempatan itu, Kalla menyerahkan penghargaan kepada kader Partai Golkar dan tokoh nasional yang berprestasi di bidang pers, pendidikan, pengusaha, musik, sepak bola, dan menyatakan peluncuran Program Aksi Nasional Partai Golkar.

Tokoh nasional yang menerima penghargaan, antara lain Jakob Oetama, yang diwakili

Pemimpin Redaksi *Kompas* Bambang Sukartiono; Prof Conny Semiwawan; Ir Ciputra; dan Melky Goeslaw. Selain itu, juga diserahkan penghargaan bagi almarhum Ronny Pattinasarany.

Hargai dukungan Golkar

Presiden menyatakan penghargaan atas komitmen Golkar mendukung pemerintahan selama empat tahun terakhir. "Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada Golkar atas kebersamaan dan dukungannya," katanya.

Adapun Kalla dalam pidatonya mengakui, kebanggaan Partai Golkar yang telah mengabdikan selama 44 tahun dalam pemerintahan dan empat tahun bersama Presiden Yudhoyono. "Golkar telah berperan baik dalam periode sekarang ini," kata Kalla.

Kalla juga mengucapkan terima kasih atas pembinaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono saat menjadi kolonel di Jawa Tengah dan panglima kodam di Sumatera Selatan.

Koalisi

Dalam jumpa pers, Jumat di Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufik Kiemas mengatakan, PDI-P tengah berupaya membangun koalisi dengan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat.

Setiap orang yang bertemu dengannya, kata Taufik, selalu menyarankan agar PDI-P membangun koalisi yang sempurna dan berkoalisi dengan Partai Golkar. "Orang partai juga setuju supaya saya *approach* dengan Golkar," paparnya.

Namun, apabila rencana ini tak bisa berjalan karena Partai Golkar tak menghendaki, PDI-P akan membangun koalisi dengan PKS," katanya. Taufik didampingi Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo dan Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto.

Koalisi PDI-P dengan Partai Golkar sempat diupayakan pada Pemilu 2004 meski tidak berjalan efektif. Saat itu, PDI-P, bersama Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa berupaya membangun Koalisi Kebangsaan. (HAR/SUT)



Bambang Yudhoyono berbincang dengan Wakil Presiden, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Muhammad Jusuf Kalla pada acara Rapat Pimpinan Nasional Ke-IV dan HUT Ke-44 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (17/10). Persebut juga dihadiri Ny Ani Yudhoyono, Ny Mufidah Kalla (kanan), Ketua DPR yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Laksono, serta mantan Presiden BJ Habibie (kiri).

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media KOMPAS, MINGGU,

Hari/Tgl : 19 OKTOBER 2008

Kalla Bakal Bertarung Lagi dengan Akbar

Sebut Capres Tak Terbendung

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bakal kembali bertarung dengan mantan

Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Pada tahun 2009, keduanya harus memperebutkan posisi calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Golkar.

Dalam Munas Partai Golkar 2004, keduanya memperebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV dan HUT ke-44 Partai Golkar, Sabtu (8/10), sejumlah dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar menominasikan keduanya sebagai capres/cawapres.

Selaki ketua umum, Kalla adalah yang paling banyak diusulkan DPD. Namun, pencalonan Akbar banyak yang tidak mendengar karena Akbar sudah berada di luar struktur DPP Partai Golkar. DPD yang mencalonkan Akbar antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Gorontalo.

Akbar kuda hitam. Akbar Kalla akan bertarung kembali. Zainal Bintang, salah satu pengurus DPP Partai Golkar, Panitia Pengarah Rapimnas IV sesungguhnya tak mengagendakan DPD untuk menyampaikan

nama-nama capres dan cawapres. Namun, aspirasi DPD tidak bisa dibendung.

Selain Kalla dan Akbar, nama lain yang banyak dinominasikan dalam rapimnas adalah Agung Laksono, Surya Paloh, Sultan Hamengku Buwono X, dan Aburizal Bakrie.

Nama lain yang juga dinominasikan adalah Muladi, Fadel Muharomad, Syamsul Muarif, dan Priyo Budi Santoso. Adapun dari luar Partai Golkar adalah

NAMA CALON PRESIDEN

Aburizal Bakrie

Agung Laksono

Abdullah Mardiyanto

Sultan Hamengku Buwono X

Ginandjar Kartasasmita

Jusuf Kalla

Muladi

Priyo Budi Santoso

Ryamizard Ryacudu

Surya Paloh

Sultan Hamengku Buwono X

Susilo Bambang Yudhoyono

Syamsul Muarif

Syamsul Muarif

Susilo Bambang Yudhoyono, Ginandjar Kartasasmita, Sutanto, dan Ryamizard Ryacudu.

Penentuan setelah pemilu

Penentuan capres-cawapres itu sendiri akan disepakati setelah pemilu legislatif. Dari 33 DPD yang hadir, hanya 1 DPD yang menghendaki penentuan capres-cawapres segera, yaitu DPD Lampung.

"Kita harus jujur, kepentingan partai atau pribadi. Partai yang didukung orang atau orang gunakan partai," kata juru bicara DPD Lampung. Kemarin, Lampung juga mengusulkan empat capres, yaitu Kalla, Paloh, Akbar, dan Sultan. Adapun cawapres adalah Agung, Kalla, Aburizal, dan Muladi.

Meskipun demikian, banyak juga DPD yang mendesak DPP Partai Golkar untuk mulai meng-

Munas Set DPP GK

umunkan nomine capres-cawapres dan kemudian melakukan survei.

Sejumlah DPD bahkan sudah menyebut sederet nama untuk dinominasikan sebagai capres. DPD itu, antara lain, adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah.

DIY, misalnya, mengusulkan tujuh nama yaitu Kalla, Agung Paloh, Sultan, Aburizal, Muladi, dan Akbar. Sementara itu, DPD Partai Golkar di kawasan timur, yaitu NTT, Papua, dan Gorontalo, mencalonkan Fadel.

DPD yang hanya mengajukan Kalla sebagai satu-satunya capres adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, DPD Sulsel, tempat asal Kalla, mengusulkan lima nama, yaitu Kalla, Agung Paloh, Aburizal, dan Sultan. Nama Akbar tidak disebut.

DPD Sulsel juga menekankan bahwa pasangan SBY-JK tetap harus diberikan kesempatan karena telah terbukti menunjukkan kinerjanya. DPD Sulawesi Tenggara juga senada. Selain menyebut tujuh nama, mereka meminta ditambahkan capres dari luar kader Partai Golkar, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara itu, dari tiga organisasi pendiri Partai Golkar, hanya Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang menyebut nama. MKGR mengusulkan sembilan nama, termasuk Akbar dan Priyo Budi Santoso, Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang sebelumnya sudah mencalonkan Sultan justru tidak menyebut nama. Demikian pula dengan Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

Dari lima organisasi yang didirikan Partai Golkar, hanya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Majelis Dakwah

Islamiah, dan Satkar Ulama yang menyebut nama. Satkar mencalonkan tiga capres, yaitu Kalla, Akbar, dan Aburizal. Adapun Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya tidak menyebut nama.

Sementara itu, Gakari mengusulkan capres: Kalla, Sutanto, dan Ryamizard Ryacudu, sedangkan sebagai cawapres adalah Fadel, Agung Akbar, Aburizal, dan Yudhoyono.

Kekecewaan

Dalam evaluasi, DPD yang menyampaikan kritik keras kepada DPP Partai Golkar adalah Lampung, Maluku Utara, dan Gorontalo. Lampung dan Maluku Utara merasa kecewa dengan DPP karena tidak total mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun Gorontalo merasa kecewa karena menolak pencalonan Fadel sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejumlah DPD juga mengingatkan DPP Partai Golkar mengenai tantangan berat yang akan dihadapi Pemilu 2009. Partai baru yang dianggap menjadi ancaman adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.

DPD Aceh juga menyebutkan ancaman partai lokal, yaitu Partai Aceh. DPD Aceh memprediksi keberadaan partai lokal bisa menurunkan perolehan suara di DPRD provinsi dan kota sekitar 15 persen. (SUT)

KLIPING

RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : KOMPAS,

Hari/Tgl : SENIN, 20 OKTOBER 2008

RAPIMNAS GOLKAR

Penetapan Capres Tunggu Hasil Pemilu Legislatif

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar belum menetapkan calon presiden atau wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu 2009. Penetapan calon presiden tetap mengacu pada Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golkar, yakni dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2009, dengan tetap memberikan prioritas dan kesempatan pertama kepada kader terbaik Partai Golkar.

Demikian pernyataan politik Partai Golkar yang dibacakan calon anggota legislatif Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Meutia Hafidz, pada penutupan Rapimnas IV dan Hari Ulang Tahun Ke-44 Partai Golkar di Jakarta Convention Centre, Minggu (19/10) malam. Rapimnas ditutup Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.

Terhadap pelaksanaan Pemilu 2009, Partai Golkar memosisikan sebagai tahap terakhir transisi demokrasi Indonesia. "Pemilu 2009 adalah momentum untuk mengembangkan demokrasi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat," demikian dikatakan Meutia.

Adapun untuk jalannya pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Kalla, Partai Golkar memandang pemerintahan ini solid dan efektif, jauh dari konflik internal. Golkar menegaskan kembali komitmennya untuk tetap mendukung secara kritis, obyektif, dan proporsional hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2009.

Partai Golkar juga menyatakan siap berkoalisi secara permanen dan jangka panjang dengan partai politik lain atas dasar komitmen bersama yang kuat dan kokoh. Partai Golkar juga menyatakan akan menjadi mitra dan kawan seiring dan seperjalanan yang nyaman bagi kekuatan politik mana pun dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Kesiapan Partai Golkar untuk berkoalisi itu didasari oleh keinginan menciptakan pemerintahan yang kuat, efektif, dan stabil, tetapi dengan memprasyaratkan adanya dukungan politik yang kuat dan tecermin dalam lembaga legislatif hasil pemilu.

"Dalam era demokrasi multi-partai perlu digalang koalisi agar muncul kekuatan politik mayoritas dalam Pemilu 2009," ujar Meutia.

Sebelumnya, di Bogor, Jawa Barat, Kalla menegaskan kembali bahwa bagi dirinya saat ini belum waktunya bersaing dengan siapa saja dalam penentuan calon presiden atau wakil presiden. Secara sistematis, Partai Golkar ingin mendahulukan persiapan pemilihan anggota legislatif April 2009, daripada pemilihan presiden-wapres pada Oktober mendatang.

Dalam Rapimnas IV Golkar, kata Kalla, akan disusun mekanisme dan etika pencalonan presiden dan wapres. Kalau mau sebut nama silakan saja. Tetapi Partai Golkar belum akan menetapkan nama itu. Tunggu waktunya saja," katanya. (HAR)

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : **SUARA KARYA** Hari/Tgl : Kamis, 16 Oktober 2008

PARTAI GOLKAR

Rapimnas Tidak Agendakan Pembahasan Capres

JAKARTA (Suara Karya). Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai Golkar tidak akan meng-
agendakan pembahasan soal calon presiden dan
wakil presiden.

Rapimnas hanya mengagen-
dakan konsolidasi internal Partai
Golkar terutama di daerah-da-
erah dalam menghadapi Pemilu
2009.

Agenda utama rapimnas kali
ini lebih menitikberatkan pada
kesiapan Partai Golkar dalam
menyongsong Pemilu 2009 men-
datang, kata Ketua Panitia
Penjarah Rapimnas IV dan HUT
ke-44 Partai Golkar, Andi Mat-
talatta dalam keterangannya
kepada wartawan, di Kantor DPP
Partai Golkar, Jakarta, Rabu
(15/10). Rencananya, Rapimnas
dan perayaan HUT ke-44 Partai
Golkar itu akan dihadiri Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam konferensi pers itu,
Andi Mattalatta didampingi Sek-
jen DPP Partai Golkar Sumarso,
Ketua Panitia Penyelenggara
Rapimnas IV dan HUT ke-44
Partai Golkar Yori-
rys Raweyai, Ketua
Panitia Pelaksana
Rapimnas IV dan
HUT ke-44 Partai
Golkar, Malkan
Amin dan Wakil
Sekjen DPP Partai
Golkar, Rully Cha-
ruf Azwar.

"Namun, jika ada
peserta yang ingin
menggiring rapim-
nas untuk mem-
bicarakan soal ca-
pres Partai Golkar,
itu tidak masalah.

Agenda utama rapimnas
pemilu, menurut Andi, hal ini
akan dibicarakan di rapimnas,
misalnya mengenai strategi kam-
panye bagi caleg-caleg Partai
Golkar dan isu-isu kampanye
yang ingin ditampilkan.

Peserta rapimnas juga akan
membicarakan soal perkiraan
dan target yang akan dicapai
Partai Golkar di pemilu legislatif

2009. Target nasional Partai Gol-

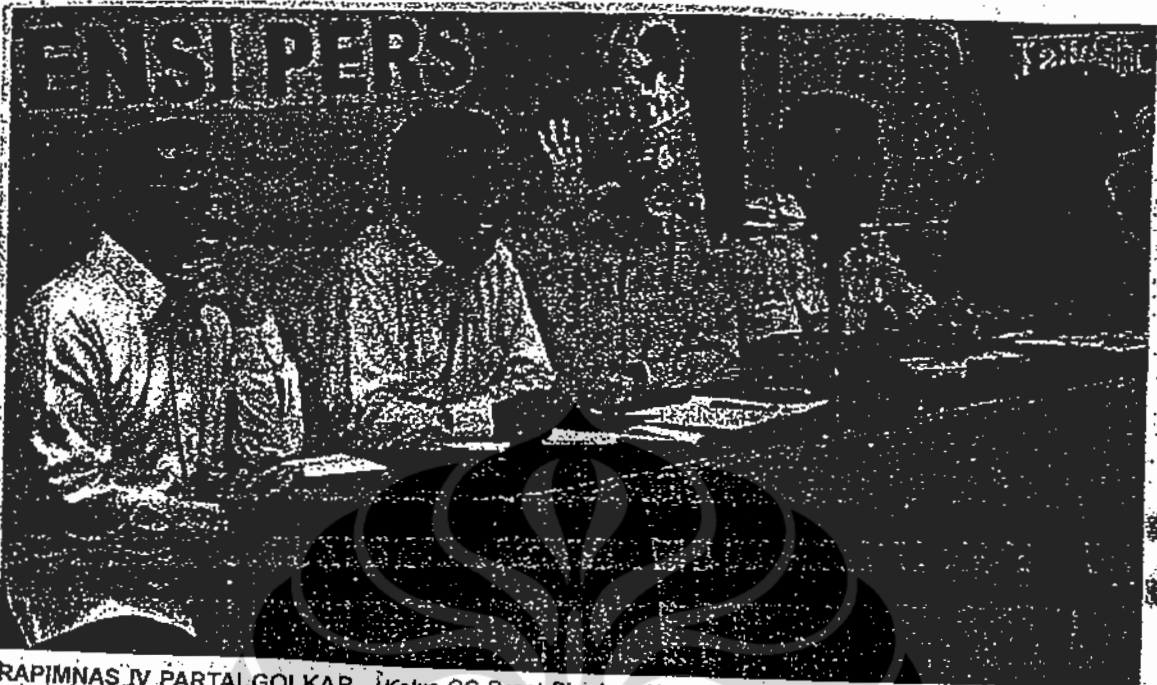
Andi Mattalatta
Ketua Panitia Pengarah
Rapimnas IV Partai Golkar

Andi Mattalatta
yang juga Menteri
Hukum dan Hak
Asasi Manusia ini
menambahkan, Par-
tai Golkar ingin men-
gukur seberapa siap partai ber-
lambang pohon beringin ini dalam
menghadapi Pemilu 2009. Karena
itu, Partai Golkar akan mengevalu-
asi kinerja Badan Pengendali Peme-
nangan Pemilu (Bappil) 2009 Par-
tai Golkar sebagai mesin partai.

Namun, jika ada peserta yang
ingin menggiring rapimnas untuk
membicarakan soal capres, Partai
Golkar itu tidak masalah. Tapi yang
pasti, filosofi Partai Golkar adalah
rakyat yang mecah pemimpin,
bukan pemimpin yang cari cari
rakyat, katanya.

Meski demikian, Andi Mat-
talatta menegaskan, sesuai aturan
internal partai, Partai Golkar belum
akan membahas soal capres atau
cawapres sebelum pemilu legislatif
berlangsung. "Tenfu kita harus
melihat dulu hasil pemilu legislatif
itu seperti apa, ujarnya.

Humas Set DPP GK



RAPIMNAS IV PARTAI GOLKAR — Ketua OC Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai Golkar, Mulkhan Amin, Sekjen DPP Partai Golkar, Sumarsono, Ketua SC Rapimnas IV Partai Golkar, Ardi Mattalatta, Ketua Penyelenggara Rapimnas IV Partai Golkar, Yorrys Raweyat, dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Rully Chaerul Azwar (dari kiri ke kanan) mengadakan konferensi pers terkait persiapan penyelenggaraan Rapimnas tersebut, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (15/10). Rapimnas IV Partai Golkar akan berlangsung 17-19 Oktober 2008. (Suara Karya/Andy Bay)

kan, itu persenyai tidak mungkin kita bagi rata ke seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga perlu ada sinkronisasi antara daerah satu dengan daerah lainnya," katanya.

Menurut Andi Mattalatta, ada empat agenda yang akan dibicarakan di rapimnas, yakni konsolidasi organisasi, agenda pemenangan pemilu, pernyataan politik, dan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa kepada Partai Golkar.

Mengenai agenda yang berkaitan dengan organisasi, kata Andi, di dalamnya akan membicarakan soal petunjuk pelaksanaan, musyawarah-musyawarah daerah yang akan digelar tahun 2009. Selangit juga akan dibicarakan soal implementasi atau penerapan kebijakan penentuan calon anggota legislatif terpilih melalui sistem suara terbanyak.

Sementara dalam agenda pernyataan politik, Partai Golkar akan merespons kondisi sosial politik ekonomi yang berkembang baik secara nasional, internasional maupun lokal. Ini dari pernyataan politik ini adalah respons Partai Golkar terhadap situasi yang berkembang pada bangsa ini. Syukur-

syukur Partai Golkar memberikan solusi, baik itu solusi ideal atau solusi praktis," ujarnya.

Andi Mattalatta mengemukakan, berbeda dengan rapimnas tahun-tahun sebelumnya, rapimnas kali ini tidak digelar dalam suasana pesta meriah. Namun, lebih pada penyelenggaraan acara yang sederhana yang berisi kegiatan-kegiatan sosial pengabdian masyarakat.

Menurut Andi, agenda rapimnas tetap berlangsung sesuai jadwal. Namun, puncak perayaan HUT Partai Golkar akan diisi dengan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat.

Yorrys Raweyat menambahkan dalam rangkaian kegiatan rapimnas dan HUT Partai Golkar akan diselenggarakan kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kemiskinan Sedunia dan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 17 Oktober.

Tapi kegiatan itu akan kami laksanakan secara nasional di Jakarta pada 23 Oktober, ini berkaitan dengan nomor urut Partai Golkar pada Pemilu 2009. Jadi, telah ditetapkan setiap tanggal 23 Partai Golkar akan melakukan kegiatan-kegiatan secara nasional, terutama kegiatan-kegiatan sosial," kata Yorrys. (M Kartono/Kartono DS)

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : **SUARA KARYA** Hari/Tgl : Sabtu, 18 Oktober 2008

WACANA KOALISI

SBY Berharap Golkar Tak Tergoda

JAKARTA (Suara Karya). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Partai Golkar agar berhati-hati dan tidak tergoda oleh pengguiran wacana koalisi yang mulai dikembangkan sejumlah petinggi partai politik.

"Saya kira Partai Golkar sebagai partai besar punya kearifan berkaitan dengan digulirkannya wacana koalisi menjelang Pemilu 2009 ini," kata Presiden saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rapimnas IV dan Perayaan HUT ke-44 Partai Golkar kemarin di Jakarta.

Selain dihadiri Presiden dan Wapres yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla, acara ini juga dihadiri mantan Presiden BJ Habibie dan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung.

Presiden mengaku akan menghormati pilihan Partai Golkar soal koalisi antarpol. Dia yakin, sebagai partai besar, tentu Golkar menentukan pilihan maupun waktu koalisi secara tepat. "Kita hormati keyakinan Partai Golkar sepanjang untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik," ujarnya.

Presiden juga meminta Partai Golkar agar berperan lebih besar

dalam pembangunan negara. Sekalipun saat ini peran Partai Golkar sudah besar, katanya, itu masih bisa ditingkatkan lagi.

Menghadapi Pemilu 2009, Presiden berharap Partai Golkar berhasil dan dapat memberi contoh terbaik dalam berdemokrasi. Jauhkan politik yang menghalalkan segala cara maupun kekerasan yang merusak moral bangsa," katanya.

Di bagian lain, Presiden menyatakan terima kasih atas dukungan Partai Golkar selama empat tahun pemerintahan SBY-JK. Kepaharmonisan kerja selama ini, katanya, memberikan kerja maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu, saat menyampaikan sambutan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla secara terbuka memuji Presiden Yudhoyono. "Dalam perjalanan Partai Golkar yang sudah 44 tahun, tentu banyak hal yang sudah dicapai. Ini tentu tidak

terlepas dari peran para tokoh Partai Golkar. Termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi pembina Partai Golkar dari jalur A (ABRI). Untuk itu, kami dari Partai Golkar mengucapkan terima kasih," ujarnya.

Jusuf Kalla menambahkan, saat ini pendukung utama pemerintah adalah Partai Golkar dan Partai Demokrat. Karena itu, kegagalan pemerintah adalah kekalahan bagi Golkar juga.

Namun, Jusuf Kalla merasa yakin bahwa duet SBY-JK selama empat tahun terakhir banyak membawa perbaikan bagi kehidupan bangsa dan negara. "Kinerja pemerintah di semua sektor terbaik dibanding masa sebelumnya. Ekonomi tumbuh, keamanan stabil. Penegakan hukum memang masih ada yang diperbaiki," ujarnya.

Jusuf Kalla menyatakan, bagi Partai Golkar, panglima adalah kesejahteraan bangsa. "Memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa adalah memang sudah menjadi tujuan Partai Golkar. Sampai kapan pun," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas IV dan Perayaan HUT ke-44 Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, rapimnas diikuti pimpinan DPD I dan DPD II Partai Golkar seluruh Indonesia. Sejumlah agenda rapimnas menitikberatkan pemantapan upaya memenangi pemilu legislatif.

"Ada empat agenda yang akan dibicarakan di rapimnas, yakni konsolidasi organisasi, agenda kemenangan pemilu, pernyataan politik, dan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa kepada Partai Golkar," kata Yorrys.

Rapimnas IV Partai Golkar menganugerahkan penghargaan Bhakti Uta-

ma kepada sejumlah tokoh nasional, antara lain mantan Gubernur Provinsi Papua mendiang JP Solossa. Sementara penghargaan Anugerah Karya Utama dianugerahkan kepada tokoh pers Jacob Oetama dan tokoh sepak bola mendiang Ronny Patniasarani.

Rapimnas juga memberikan penghargaan kepada DPD I Partai Golkar Kepri yang dinilai paling berprestasi karena memenangkan sejumlah pemilihan kepala daerah.

Gubernur Provinsi Gorontalo Padel Muhammad dan Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed juga dianugerahi penghargaan karena memenangkan pilkada dengan suara mayoritas.

(Kardani/Kartoyo)

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : SUARA KARYA

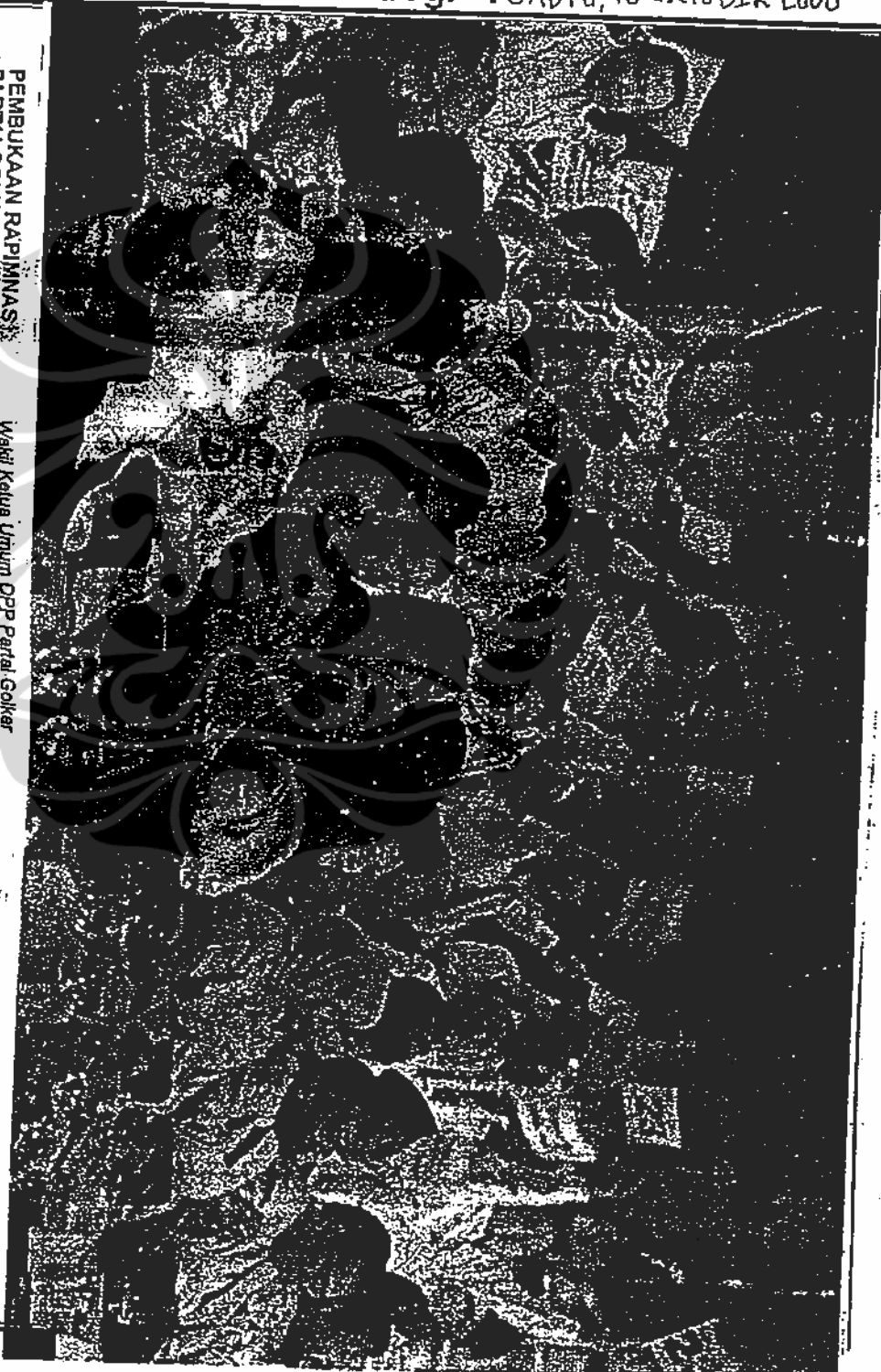
Hari/Tgl : SABTU, 18 OKTOBER 2008

PEMBUKAAN RAPIMNAS PARTAI GOLKAR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Ani Yudhoyono, Ketua Umum DPP Partai Golkar, H.H. Jusuf Kalla, dan Ibu Mufidah Kalla ketika menghadiri pembukaan Rapimnas IV dan HUT ke-44 Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jurnai (17/10) malam. Mereka didampingi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono, sesepuh Partai Golkar BJ Habibie, Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono, Ketua SC Rapimnas IV Partai Golkar Andi Mattalatta, dan Ketua Penyelenggara Rapimnas IV Partai Golkar Yoris Rawayal.

(Suara Karya/Hedi Saipena)



Bumas Set DPP GK

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : **SUARA KARYA** Hari/Tgl : **Senin, 20 Oktober 2008**

PILPRES

Jusuf Kalla Persilakan Kader Saring Nama Capres

BOGOR (Suara Karya). Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla, memaklumi keinginan sejumlah kader dan pengurus Partai Golkar yang menghendaki adanya nominator calon presiden dan wakil presiden, sebelum pemilu legislatif berlangsung.

Untuk itu, Jusuf Kalla memersilakan kader dan pengurus Partai Golkar menyaring sejumlah nama yang cocok untuk mengisi kursi capres dan cawapres Partai Golkar pada Pilpres 2009.

"Semua orang sudah menyebut 'Silakan saja,' kata Jusuf Kalla, menjawab pertanyaan wartawan di sela acara resepsi HUT ke-42 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Silaturahmi Idul Fitri 1429 H, di Bogor, Minggu (19/10).

Sebelumnya, Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden ditanya tentang irisi sejumlah nama capres yang dilontarkan kader dan pengurus DPD Partai Golkar dalam Rapimnas IV dan HUT ke-44 Partai Golkar, di Jakarta, Sabtu (18/10).

Selain nama Jusuf Kalla, nama lain yang dimonasikan peserta Rapimnas adalah Akbar Tandjung, Agung Laksono, Surya Paloh, Sultan Hamengku Buwono X, Aburizal Bakrie, Muladi, Fadel Muhammad, Syamsul Muarif, dan Priyo Budi Santoso. Dari luar Partai Golkar, adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Gimandjar Kartasasmita, Sutanto, dan Ryamizard Ryacudu.

Meski mempersilakan sejumlah kader menarakan nama capres dan cawapres, Jusuf Kalla menegaskan Partai Golkar tidak akan menetapkan sosok capres-cawapres sebelum pemilu legislatif. "Kita akan menentukan pilihan nanti, karena belum dibuka. Dan kita sepakat belum waktunya," ujarnya.

Jusuf Kalla mengingatkan para kader Golkar agar tidak mendesak Partai Golkar mengumumkan calon presiden berikut waktunya sebelum pemilu legislatif. "Kita fokus agar kita bicara soal (pemilu) legislatif saja, jangan sampai pengalaman itu terjadi, ujarnya.

Menurut dia, pada Pemilu

2004, jumlah perolehan suara Partai Golkar melorot hingga delapan persen dibanding Pemilu 1999. Padahal saat itu bangsa dalam kondisi lebih baik.

"Untungnya, PDIP juga mengalami penurunan sehingga Golkar nomor pertama. Jadi, sekarang ini kita fokus supaya suara Golkar naik," ujarnya.

Menurut Jusuf Kalla, dengan mendahulukan pemilu legislatif, kekompakan di tubuh Partai Golkar akan solid. Partai Golkar akan mengatur mekanisme pengaturan capres-cawapres dengan baik. "Pasti ada mekanisme pada waktunya nanti. Sederhana kita bekerja," katanya.

Apakah dia siap bertarung dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung untuk memperebutkan posisi calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Golkar? Jusuf Kalla segera menetralisasi pertanyaan itu. "Wah, tidak bakal seperti itu, cuma (pandangan) teman-teman saja. Kita fokus agar kita bicara legislatif saja, tuturnya." (M. Kardana)

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media : **SUARA KARYA** Hari/Tgl : Selasa, 21 Oktober 2008

PEMILU 2009 Golkar Tak Akan Sembarangan Berkoalisi

JAKARTA (Suara Karya): Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla mengatakan, dalam menghadapi Pemilu 2009, pihaknya tidak akan sembarangan dalam berkoalisi dengan partai lain termasuk PDIP.

Menjawab pertanyaan pers usai syukuran dalam rangka HUT ke-44 Partai Golkar, kemarin, di Jakarta, Jusuf Kalla mengatakan, selama ini tawaran wacana berkoalisi belum pernah secara formal dibicarakan dengan PDIP. Namun, Partai Golkar sangat menghormati dan mengapresiasi tawaran PDIP untuk berkoalisi.

Jusuf Kalla menekankan koalisi dilaksanakan untuk memenangkan pemilihan presiden. Jadi yang paling pokok, di samping searah, setujuan, juga harus yang paling mungkin mengangkat calon presiden, ujarnya. Partai Golkar tidak mengukur dulu bagaimana partai lain tetapi harus yakin bahwa koalisi dengan partai A atau partai B memberikan kemungkinan besar bagi Golkar untuk memenangkan pilpres. Jadi bukan masalah ukuran besar kecilnya partai, tetapi dapatkah figur-figur itu memenangkan pilpres, katanya.

Jusuf Kalla menjelaskan, pada Pilpres 2004 terjadi koalisi antarpol besar, seperti Partai Golkar dan PDIP. Namun, baru tahap penyisihan pilpres, calon mereka sudah kalah. Di putaran kedua, calon mereka tetap kalah. "Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana sinergi antar-calon terjalin baik dan didukung

oleh partai yang kuat," kata Jusuf Kalla.

Dia menambahkan, koalisi permanen antarpol merupakan keharusan dalam Pilpres 2009. Koalisi itu sendiri harus dilakukan sebelum pilpres.

"Koalisi adalah suatu keharusan karena syarat-syarat pilpres nanti lebih berat. Kedua, apabila menangi koalisi harus meletakkan pemerintahan yang melebihi 50 persen agar nanti dengan DPR baik dan kuat," kata

Jusuf Kalla.

Dia melihat, dalam pemilu dengan 38 parpol peserta, agak sulit bagi bisa menang di atas 50 persen. Karena itu, koalisi antarpol menjadi keharusan.

Namun, menurut Kalla, koalisi harus saling melengkapi dalam karakteristik partai, di samping saling melengkapi dalam segi program. Selain itu, masing-masing partai juga harus sepaham dalam tujuan. Masing-masing harus berbicara, bagai-

mana bangsa sejahtera, bagaimana kita menjalankan pemilu yang demokratis," katanya.

Selama ini, syarat-syarat pengajuan capres terlalu mudah sehingga koalisi awal hanya di bawah 10 persen, sehingga ada lagi koalisi setelah pembentukan kabinet. Karena itu, ujar Jusuf Kalla, koalisi tidak terlalu solid.

"Oleh karena itu pula, saya minta (Golkar) lebih tinggi mengajukan angka usulan syarat dukungan suara untuk pengajuan calon presiden," kata Jusuf Kalla.

Dia menegaskan, Partai Golkar tidak akan lagi melakukan konvensi untuk memilih capres/cawapres. Dia menegaskan, konvensi hanya akan memunculkan "penumpang gelap", yaitu figur capres dari tokoh di luar partai.

SANJANI
Golkar berkoalisi...

KLIPING RAPIMNAS IV & HUT KE 44 PARTAI GOLKAR

Media :

Hari/Tgl :

DARI HALAMAN 1

Golkar Tak Akan Sembarangan Berkoalisi

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa hasil Rapimnas IV Partai Golkar tidak menyebutkan serta tidak menyetujui koalisi dengan partai lain. Jusuf Kalla menjelaskan bahwa yang dipilih sebagai kader terbaik Partai Golkar untuk bangsa dan negara.

Menurut Jusuf Kalla, berdasarkan konvensi menjelang Pemilu 2004, figur yang muncul justru capres dari luar partai. Golkar sudah setengah mati, tiba-tiba ada orang di tengah jalan naik kendaraan yang sudah setengah mati kita bina. Kita tidak mau lagi begitu, katanya.

Menurut Jusuf Kalla, saat ini banyak kader partai yang sudah bekerja keras dan baik. Namun itu masih akan dibuktikan lagi pada Pemilu 2009.

Jusuf Kalla mencontohkan Fahmi Idris maupun dirinya sendiri yang merupakan kader lama Partai Golkar. Fahmi tercatat masuk Golkar sejak 1964, sementara Jusuf Kalla tahun 1965.

Jusuf Kalla menambahkan, kader partai tidak akan pernah

pindah dari akan memiliki kesetiaan sampai akhir. Kader utama partai, ujarnya, tetap berkumpul, baik ketika menjelang pemilu maupun di antara Rapimnas IV Partai Golkar.

akhir pekan lalu, Jusuf Kalla

"Golkar sudah setengah mati, tiba-tiba ada orang di tengah jalan naik kendaraan yang sudah setengah mati kita bina. Kita tidak mau lagi begitu."

HM Jusuf Kalla
Ketua Umum DPP
Partai Golkar

sempat menyiratkan bahwa penumpang gelap di Partai Golkar saat Pilpres 2004 adalah Wiranto. Dia menjadi capres dari Partai Golkar setelah memenangi konvensi.

"Kini Wiranto belum apa-apa sudah keluar, melawan

kita (dengan dirikan Partai Hanura). Tanpa (bicara) apa-apa. Kalau Prabowo masih sopan, sampaikan surat," kata Jusuf Kalla. Mengenai pencalonan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai capres partai lain, Jusuf Kalla menyatakan tidak akan melarang-larang. "Tak ada masalah. Silakan saja," katanya.

Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Firmari Subagyo mengatakan, Partai Golkar belum mau berbicara mengenai capres/cawapres karena ingin fokus pada pemilu legislatif.

Partai Golkar menganggap terlalu pagi berbicara calon presiden sejak sekarang. Kami tidak ingin bicara soal capres sebelum tahu apa hasil pemilu legislatif, karena hal itu sangat menentukan. Kita bisa malu kalau bicara calon presiden terlalu pagi, ternyata kalah di pemilu legislatif, ujar Firmari.

Menurut dia, jika membicarakan kepentingan bangsa, mempertahankan duet SBY-JK adalah pilihan yang realistis. (Partayo/Antara)

TASYAKURAN HUT PARTAI GOLKAR Kelia Umilim DPP Partai Golkar HM Jabu Kelia, didampingi anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Fahmi Idris (Ati) dan Sekjen DPP Partai Golkar Sumarmo, memberikan keterangan pers usai tasyakuran HUT ke-24 Partai Golkar, di Gedung DPP Partai Golkar Jakarta. Senin (20/10). (Suara Karya/Hedi Suryono)

